

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Sidoarjo secara geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosiologis merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat;
b. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul;
c. bahwa dalam usaha pengurangan risiko bencana dari setiap kegiatan pembangunan daerah yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana, perlu adanya analisis risiko bencana dalam perencanaan pembangunan yang sinergis dan menyeluruh pada berbagai aspek/bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SidoarjoNomor 70), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk jangka waktu 5 tahun.

Pasal 2

(1) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    - Bab I : Pendahuluan
    - Bab II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah
    - Bab III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
    - Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
    - Bab V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
    - Bab VI : Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi
    - Bab VII : Penutup
    - Lampiran :
        1. Rincian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo.
        2. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo.

(2) Uraian rinci Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman dalam :

a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
b. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 71

NOREG PERBUP : 70 Tahun 2021

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bencana yang terjadi di Indonesia memerlukan mekanisme pengaturan dan perencanaan penanggulangan bencana yang terencana dengan baik mengingat permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengingatkan agar daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang wajib dilakukan serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun untuk dapat menjawab setiap persoalan pada setiap fase penanggulangan bencana dan merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi yang ada di pemerintah daerah. RPB sebagai rencana induk yang nantinya dapat digunakan oleh seluruh instansi terkait penanggulangan bencana di daerah. RPB ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah kerangka efektif yang menjamin pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam waktu 5 (lima) tahun.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan RPB Kabupaten Sidoarjo adalah:

- Mengidentifikasi area di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki risiko terkena bencana serta menyusun pilihan tindakan yang sesuai untuk menurunkan risiko bencana tersebut
- Mengutamakan isu dan upaya penanggulangan bencana di dalam program kerja Kabupaten Sidoarjo
- Menjadi pedoman yang terpadu bagi pemaku kepentingan Kabupaten Sidoarjo untuk menurunkan risiko bencana di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana daerah
- Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi langkah-langkah terkait penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

C. KONSEPSI UMUM

Dasar penyusuran RPB yaitu dilihat dari hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijelaskan kedalam bentuk kegiatan dan aksi penanggulangan bencana disertai rincian anggarannya. Perencanaan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perencanaan pembangunan. Didalamnya memuat kebijakan dan strategi daerah serta pilihan aksi untuk memenuhi capaian sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai pembanding kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sehingga pemerintah daerah dapat melimpahkan tanggung jawab pelaksanaaan RPB kepada para pelaku penanggulangan bencana. RPB ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu yang ditetapkan dan dapat ditinjau

secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau saat terjadi bencana yang memerlukan perbaikan atas Dokumen RPB ini. RPB merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana.

Penyusunan RPB ini melibatkan seluruh pemerintah daerah maupun non pemerintah serta Perangkat Daerah dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). RPB ini diperuntukkan bagi seluruh lembaga atau institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik pemerintah daerah maupun non pemerintah.

Pada pelaksanaannya, RPB ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat advokasi bagi terbangunnya sebuah komitmen bersama, tersedianya sumberdaya, serta adanya kesatuan aksi bagi seluruh lembaga atau institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

D. KEDUDUKAN DOKUMEN

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan
   RPB menjadi bagian perencanaan pembangunan daerah, diharapkan sedapat mungkin dapat diintegrasikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB.
2. RPB sebagai dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
   RPB berlaku bagi multi bahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Diperlukan perencanaan yang lebih mendetail untuk untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB.
3. RPB sebagai standar penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.
   Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kebijakan Strategis Nasional untuk Penanggulangan Bencana (Jakstranas PB), mensyaratkan kesatuan sasaran penanggulangan bencana pada seluruh tingkat pemerintahan. Oleh karenanya, sasaran dan indikator target nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi acuan dalam penyusunan RPB. Keberhasilan implementasi RPB memberi andil pada penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
   - Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa "menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh"
   - Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
   - Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan RENAS PB dilakukan daiam situasi tidak terjadi bencana
   - Pasai 36 ayat 2 bahwa dokumen RENAS PB ditetapkan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusanPemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
   - Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu RENAS PB adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Kepala BNBP No. 01 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
8. Peraturan Kepala BNBP No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 Tahun 2010, tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP).
11. Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
12. Permendagri No. 27 tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur.
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).
17. Peraturan Menteri dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten atau Kota yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

F. RUANG LINGKUP

1. RPB secara garis besar melingkupi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
2. Lingkup pembahasan RPB meliputi seluruh kebijakan dan

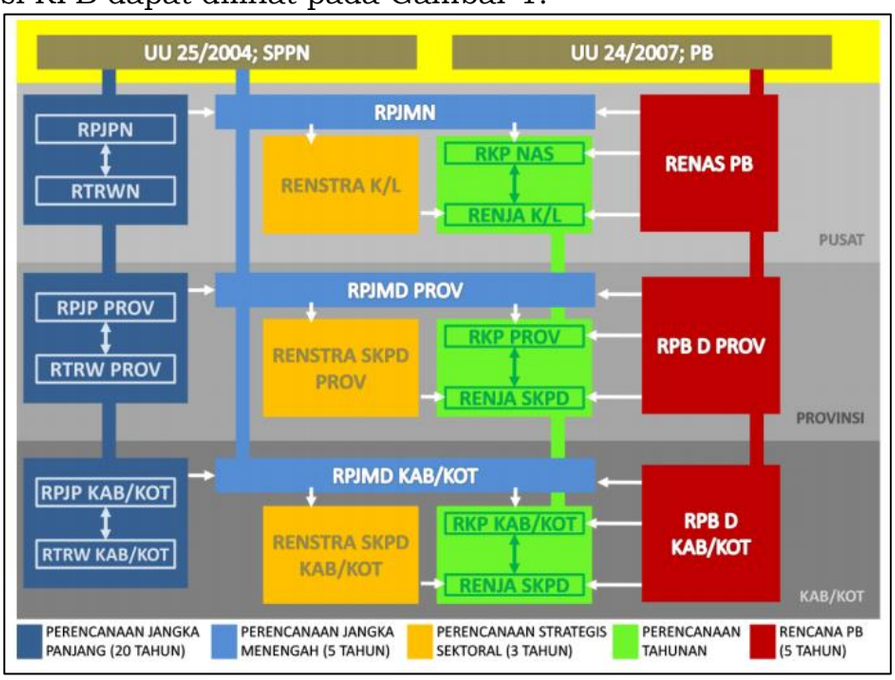
perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra, saat, maupun pasca bencana. Secara singkat lingkup pembahasan RPB dibagi dalam beberapa kelompok, dengan kriteria berikut:

a. Seluruh perencanaan dalam RPB dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Kelompok Penanggulangan Kedaruratan Eencana (PKB).
b. Seluruh aksi pada Kelompok PRB menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
c. Seluruh aksi pada RAD PRB yang menjurus spesifik pada suatu bencana menjadi dasar penyusunan masterplan pengurangan risiko bencana nasional (Masterplan PRB).
d. Seluruh aksi pada Kelompok PKB dapat langsung diimplementasikan sesuai dengan situasi kedaruratan bencana.

3. Lingkup penggunaan RPB
   a. Digunakan bagi seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab nasional;
   b. Digunakan bagi seluruh lembaga atau institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, baik pemerintah, organisasi sosial non pemerintah, dunia usaha dan lembaga donor;
   c. Digunakan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

1.Posisi RPB dengan Dokumen Perencanaan Lain

1. Sebagai sebuah perangkat advokasi di pemerintahan, RPB harus mengacu dan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB perlu mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (RPJMN III) dan RPJMD Provinsi serta RPJMD Kabupaten,/Kota sebagai inti perencanaan pembangunan daerah. Disisi lain RPB Juga perlu mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. Posisi RPB dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 0.1Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan

2. Komponen-komponen RPB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan

penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
Komponen-komponen tersebut diperoleh dari berbagai referensi, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Referensi bersifat politis yang digunakan dalam penyusunan RPB yaitu RPJMN IV, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota. Sedangkan referensi yang bersifat teknis yaitu dengan menggunakan Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah (KRB) Tahun 2018.

3. Seluruh aspek yang dibahas didalam Dokumen RPB yang sesuai dengan referensi tersebut dijadikan sebagai dasar bagi perencanaan lanjutan yang bersifat teknis mendetail baik pada masa aman, masa siaga, masa krisis, darurat dan masa pemulihan.

2.Penyusun

Tim Penyusun RPB terdiri atas 3 (tiga) tim, yaitu Tim Substansi, Tim Penulis, dan Tim Asistensi dimana fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Tim Substansi, berfungsi untuk membahas dan memutuskan substansi dalam RPB 2020-2025. Tim ini merupakan perwakilan institusi terkait penanggulangan bencana di daerah dan masing-masing institusi diwakili oleh unit teknis atau perencana.
2. Tim Penulis, berfungsi untuk menuliskan Dokumen RPB 2020-2025. Pada penyusunan dokumen ini yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BNPB, maka tim penulis ditunjuk oleh BNPB.
3. Tim Asistensi, berfungsi untuk menjamin kualitas hasil dari Dokumen RPB 2020-2025. Tim Asistensi menjamin keabsahan metodologi, proses, serta hubungan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tim Asistensi yang berada di BNPB merupakan gabungan pakar dan Pakar nasional yang ditunjuk oleh BNPB.

3.Mekanisme Penyusunan

1. Penyusunan Dokumen RPB mengikuti dimensi-dimensi perencanaan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimensi tersebut yaitu dimensi teknokratik, topdown, bottom-up, partisipatif dan politis.
2. Rencana Penanggulangan Bencana disusun dari tahun 2020 hingga tahun 2025 dan terbagi dalam 3 (tiga) tahapan. Tahapan tersebut adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap pelaporan.

4.Masa Berlaku

1. Dokumen RPB berlaku dari tahun 2020 hingga Tahun 2025.
2. Dokumen ini dapat diubah pada tahun ke-3 perencanaan bila dibutuhkan.

5.Struktur Penulisan

RPB terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan.

1. Bagian Pertama : Ringkasan Eksekutif
   Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan yang memberikan gambaran umum dan point kunci berupa matriks, diagram dan/atau uraian. Ringkasan Eksekutif tidak lebih dari 10 lembar. Ringkasan Eksekutif ditujukan untuk menjadi perkenalan, pengingat, bahan sosialisasi, dan kebutuhan praktis lainnya untuk para pelaku dan pemegang kebijakan terkait penanggulangan bencana.
2. Bagian Kedua : Buku Utama
   Buku Utama merupakan batang tubuh dari RPB 2020-2025. Buku ini berisikan 7 (tujuh) bab yang memaparkan dasar penulisan RPB,

Risiko Bencana Daerah, Kebijakan Strategis, Rencana Aksi, Strategi Pengarusutamaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pembaharuan RPB, serta Penutup.

3. Bagian Ketiga : LAMPIRAN; terdiri dari :
   a. Lampiran Satu : RAD Penanggulangan Bencana
      Detail RAD PB memaparkan pendekatan detail yang akan diterapkan daerah dengan pendekatan pendekatan distribusi kontribusi dan tahun pelaksanaan per bencana. Bila memungkinkan pagu indikatif juga telah dapat ditampilkan dalam buku ini.
   b. Lampiran Dua : Hasil Sinkronisasi IKD
      Sinkronisasi IKD memaparkan capaian daerah terkait upaya penanggulangan bencana yang dikelompokkan ke dalam IKD yang telah disinkronkan dengan Jakstranas PB.

BAB II
KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

A. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah rawan bencana yang berada di pusat pertumbuhan. Berdasarkan RPJMN IV tahun 2020-2024 diketahui bahwa terdapat beberapa program penanggulangan bencana yang diakomodir dalam program prioritas. Selain itu Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam Kawasan Strategis Perkotaan Metropolitan Gerbangkertasusila (Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan). Kawasan ini ditujukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskata global yang dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian timur.

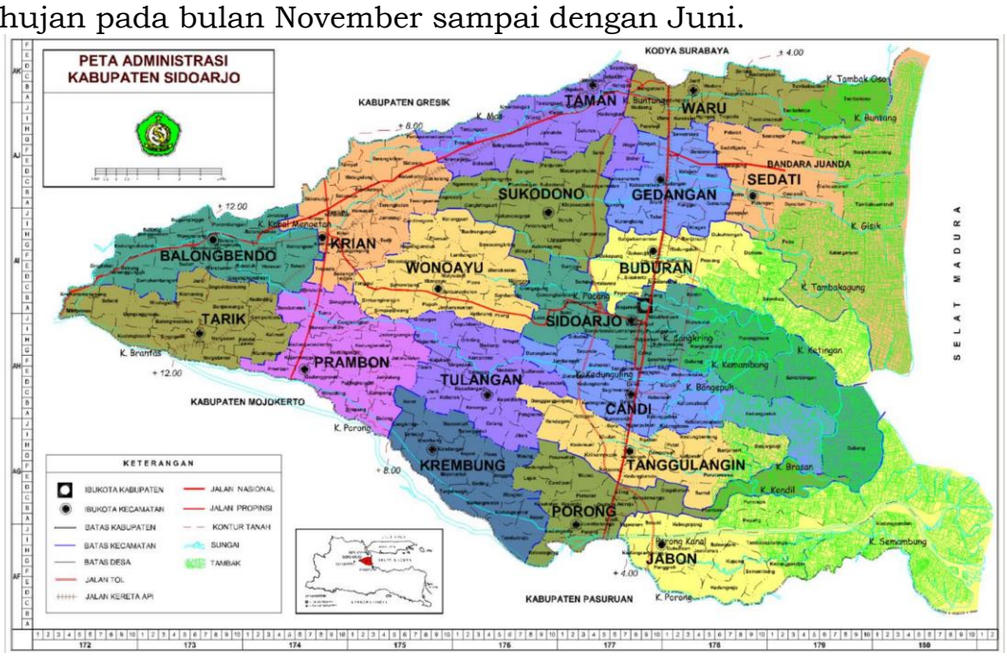
Gambaran umum wilayah Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah dalam pengkajian risiko bencana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi. Dari kondisi wilayah, diperoleh potensi luas daerah dan jumlah penduduk terdampak bencana serta potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Sidoarjo.

1.Geografis

Kabupaten Sidoarjo berada diantara dua sungai, sehingga terkenal dengan sebutan kota “Delta”. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 11,25 – 112,9 ° BT dan 7,3 – 7,5 ° LS, dengan luas wilayah 714.243 Km2, 40,81 persennya terletak di ketinggian 3-10 m yang berada dibagian tengah dan berair tawar, 29,99 persen ketinggian 0-3 m berada di sebelah timur merupakan daerah pantai dan pertambakan, 29,20 persen terletak di ketinggian 10-25 m di bagian barat. Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan:

Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
Timur: Selat Madura
Selatan : Kabupaten Pasuruan
Barat : Kabupaten Mojokerto

Letak yang berada di sekitar garis khatulistiwa membuat Kabupaten Sidoajo mengalami dua musim, musim kemarau dan musim hujan, dimana musim kemarau berkisar antara bulan Juli hingga Oktober dan musim penghujan pada bulan November sampai dengan Juni.



Gambar 2.1. Administrasi Kabupaten Sidoarjo

Secara geografi kabupaten Sidoarjo terbagi dalam 18 kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Berikut tabel yang menjelaskan jumlah kecamatan dan luas wilayahnya masing-masing.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Luas (Km^2)
1	Tarik	36,06
2	Prambon	34,23
3	Krembung	29,55
4	Porong	29,82
5	Jabon	81
6	Tanggulangin	32,29
7	Candi	40,67
8	Tulangan	31,21
9	Wonoayu	33,92
10	Sukodono	32,68
11	Sidoarjo	62,56
12	Buduran	41,03
13	Sedati	79,43
14	Waru	30,32
15	Gedangan	24,06
16	Taman	31,54
17	Krian	32,50
18	Balongbendo	31,40
	Jumlah	714,24

Sumber: Sidoarjo dalam angka 2020

2.Demografis

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan iniberkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapatmenjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lainpenduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuanpembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)
1	Tarik	72.206
2	Prambon	85.157
3	Krembung	75.731
4	Porong	85.700
5	Jabon	61.092
6	Tanggulangin	106.685
7	Candi	168.779

8	Tulangan	107.683
9	Wonoayu	90.794
10	Sukodono	132.644
11	Sidoarjo	228.713
12	Buduran	108.457
13	Sedati	111.788
14	Waru	240.674
15	Gedangan	134.787
16	Taman	235.238
17	Krian	140.183
18	Balongbendo	80.222
	Jumlah	2.266.533

Sumber: Sidoarjo dalam angka 2020

Selama periode 2014-2018 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2014 angka beban tanggungan penduduk sebesar 42,86 persen dan tahun 2015 turun sebesar 40,98 persen. Pada tahun 2016, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 40,15 persen. Pada tahun 2017, angka beban ketergantungan kembali turun menjadi 39,93 persen. Namun, pada tahun 2019 angka beban ketergantungan naik menjadi 40,99 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 41 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Angka tahun 2018 ini merupakan angka terendah dalam 5tahun terakhir. Menurunnya angka beban ketergantungan dipengaruhi oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif dan menurunnya proporsi penduduk usia yang belum dan tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 2.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Kebergantungan Tahun 2014-2019

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan
2014	26,22	70,00	3,78	42,86
2015	24,88	70,93	4,19	40,98
2016	24,16	71,35	4,48	40,15
2017	24,07	71,86	4,07	39,93
2018	23,71	71,53	4,76	39,79
2019	24,87	70,93	4,20	40,99

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupten Sidoarjo 2019/2020

3.Topografi

Wilayah Kabupaten Sidoarjoberada pada ketinggian 0-25 mdpldan terbagi atas tiga kelas, yaitu:

- 0-3 meter, merupakan daerahpantai dan pertambakan yangberair asin/payau, berada disebelah timur.
- 3-10 meter, merupakan daerahbagian tengah yang berair tawar.
- 10-25 meter, terletak di daerahbagian barat.

4.Iklim

Sepanjang tahun 2019, BMKG, Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 34,6oC, terjadi di bulan November. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Juli, sebesar 22,3oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 67 persen. Sementara itu, bersumber dari lokasi penakar hujan yang terdapat di 30 titik berbeda yang tersebar di semua kecamatan di Sidoarjo, diketahui bahwa selama Januari-Desember 2019 terdapat 101 hari hujan. Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan relatif tinggi selama Januari-April, total 82 hari hujan dengan jumlah curah hujan tertinggi sebesar 488 mm di bulan Januari. Dan turun secara signifikan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober, hanya 7 hari hujan dalam 6 bulan.

5.Sejarah Kejadian Bencana

Penentuan sejarah kejadian bencana ini dilihat dari catatan Data dan informasi Bencana Indonesia (DIBI) mengenai keadaan bencana yang pernah terjadi dari kurun waktu tahun 1815 sampai 2016. Catatan data dalam DIBI terangkum dari kabupaten/kota, provinsi yang terangkum menjadi data sejarah Indonesia. Sejarah kejadian bencana perlu menjadi perhatian karena digunakan dalam perencanaan harmonisasi kebijakan antara Kabupaten Sidoarjo sampai pada tingkat nasional.

Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Jawa Timur

Sepanjang tahun 2019, BMKG, Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 34,6oC, terjadi di bulan November. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Juli, sebesar 22,3oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 67 persen. Sementara itu, bersumber dari lokasi penakar hujan yang terdapat di 30 titik berbeda yang tersebar di semua kecamatan di Sidoarjo, diketahui bahwa selama Januari-Desember 2019 terdapat 101 hari hujan. Jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan relatif tinggi selama Januari-April, total 82 hari hujan dengan jumlah curah hujan tertinggi sebesar 488 mm di bulan Januari. Dan turun secara signifikan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober, hanya 7 hari hujan dalam 6 bulan

Provinsi Jawa Timur bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki catatan sejarah kejadian bencana beragam. Beberapa kejadian bencana tersebut memberikan dampak besar, seperti banjir yang memiliki frekuensi kejadian lebih besar dibanding Jenis bencana lainnya. Penjelasan lebih lengkap tentang sejarah bencana Provinsi Jawa Timur juga dilihat berdasarkan DIBI tahun 1915 - 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

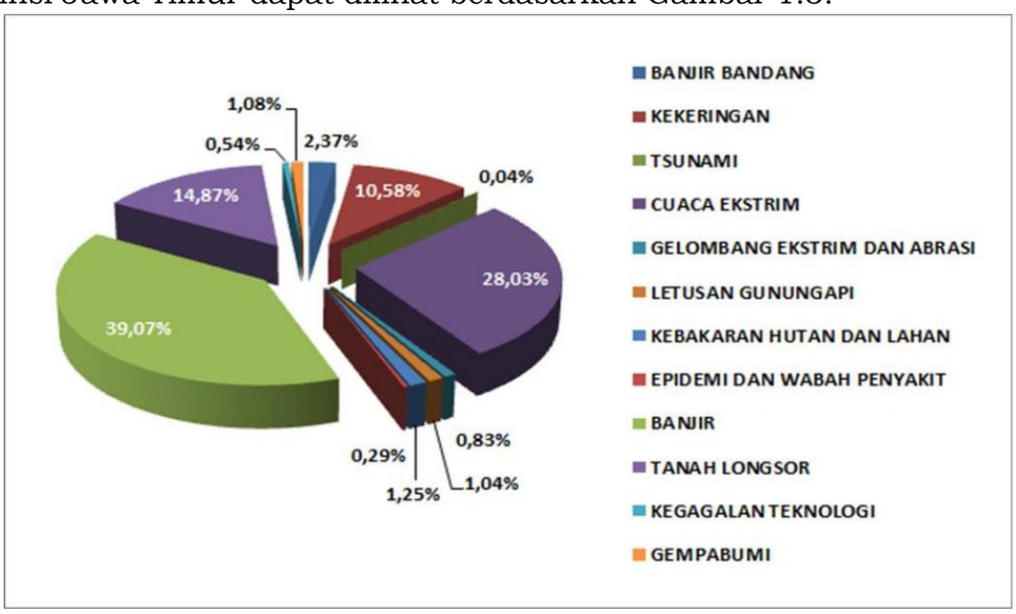
Tabel 2.4 Timeline Kejadian Bencana di Jawa Timur

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Terluka	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan
1. Banjir Bandang	57	246	21	696	12.583	430	1.265	4.780
2. Kekeringan	254	-	-	-	-	-	-	80.547
3. Tsunami	1	75	17	-	-	-	-	-
4. Cuaca Ekstrim	673	48	3	422	176	2.882	19.655	35
5. Gelombang Ekstrik dan Abrasi	20	3	2	-	-	11	95	266
6. Letusan	25	15.937	-	1.430	98149	12.405	5.427	5.260

Gunungapi								
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	30	12	-	2	-	-	-	-
8. Epidemi dan Wabah Penyakit	7	206	-	1.563	-	-	-	-
9. Banjir	938	694	1.671	27.075	203.030	5.077	18.509	126.272
10. Tanah Longsor	357	96	4	291	3.087	647	882	97
11. Kegagalan Teknologi	13	27	2	37.164	13.894	-	-	-
12. Gempa Bumi	26	315	127	690	797	208	320	-
Total	2.401	17.659	1.847	69.333	331.716	213.687	46.153	217.256

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2016

Dari Tabel 5, disimpulkan bahwa masing-masing kejadian memberikan dampak yang tidak sedikit pada setiap bencana. Dampak paling besar terjadi pada bencana banjir dan cuaca ekstrim yang hampir terjadi di beberapa kabupaten/kota. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penanggulangan bencana untuk beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, untuk mengetahui persentase tingkat kejadian bencana di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.3.



Gambar 2.2 Presentase Kejadian Bencana Provinsi Jawa Timur 1815-2016

Berdasarkan Gambar 1.3, terlihat persentase perbandingan jumlah kejadian per bencana dengan total kejadian yang tercatat dari tahun 1815-2016. Dari gambar di atas, terlihat bahwa bencana banjir mendominasi kejadian bencana di Provinsi Jawa Timur dari tahun 1815-2015, dengan persentase kejadian yaitu 39,07%, dilanjutkan bencana cuaca ekstrim dengan 28,03% dan tanah longsor dengan 14,8%. Lalu bencana epidemi dan wabah penyakit dengan 10,58%. Sedangkan bencana lainnya masing-masing memiliki persentase yang relatif rendah.

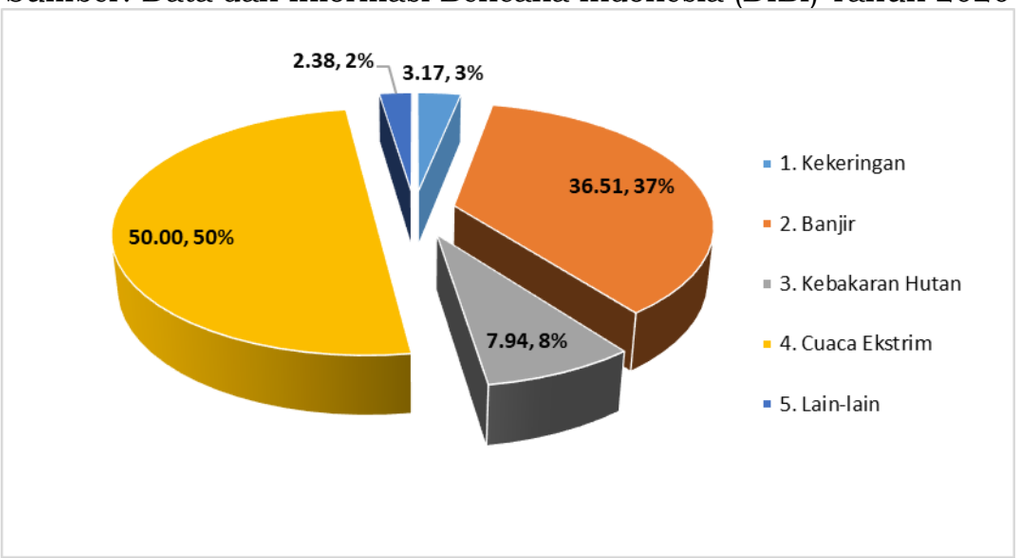
Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo

Untuk melihat kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dilakukan pencarian data kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan data BPBD Kabupaten Sidoarjo bahwa dalam rentang tahun 2003-2019 kabupaten Sidoarjo telah mengalami 4 jenis kejadian bencana yaitu: banjir, angin kencang, kekeringan dan kebakaran hutan. Bencana terjadi tersebut memberikan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada tabel .

Tabel 2.5 Timeline Kejadian Bencana di Kabupaten Sidoarjo

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Terluka	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1. Kekeringan	4	-	-	-	-	-	-	154
2. Banjir	46	-	-	-	537	-	-	2.466
3. Kebakaran Hutan	10	-	-	-	-	-	-	-
4. Cuaca Ekstrim	63	3	-	49	162	698	428	-
5. Lain-lain	3	11	2	36.771	12463	10.426	-	229,7
Total	126	-	2	36.820	13.162	11.124	428	2849,7

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2020



Gambar 2.3 Presentase Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo 2003-2019

B. RISIKO BENCANA DAERAH

1. Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana mencakup perhitungan terkait pendataan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dengan menggunakan analisis komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu wilayah kajian dan peta risiko bencana ini harus menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana sehingga dapat memenuhi tujuan untuk mengurangi potensijiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak.

Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik,dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan

parameter kapasitas regulasi,kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistemkesiapsiagaan. Pada dasarnya kebijakan disusun berdasarkan komponen bahaya, kerentanan,dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitaskejadian. Sehingga dari gambar di atas, diuraikan hal-hal yang akan dihasilkan dalampengkajian risiko bencana, yang secara umum adalah untuk menghasilkan kebijakanpenanggulangan bencana.

Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB dan juga menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Mekanisme penyusunan peta risikobencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen kajian risiko bencana.



Gambar 0.4 Metode Pengkajian Resiko Bencana

2. Penilaian Ancaman Bencana

Pengkajian ancaman bencana atau bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahamiunsur-Unsur ancaman yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahayapada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain.Pengkajian karakter bahaya dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan denganmengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

Potensi bahaya antara lain geologis, sosial, ekonomi, politik, situasi, kondisi ataukarakteristik biologis, klimatologis, geografis, budaya dan teknologi dari suatu kelompokmasyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwadan kerusakan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan pemahaman tentang potensibahaya, maka perlu menyamakan persepsi tentang jenis bahaya itu sendiri. Terdapat 12 (duabelas) jenis bahaya yang telah diatur dan diseragamkan penamaannya oleh BNPB.

Potensi bahaya di Kabupaten Sidoarjo telah disepakati meliputi 7 (tujuh) jenis bahayayang berpotensi terjadi. Potensi bahaya tersebut dikaji dan dianalisis hingga menghasilkanindek dan tingkat bahaya. Penentuan

tingkat bahaya diperoleh dari hasil pengkajian bahayarendah, sedang atau tinggi yang memiliki luas bahaya paling besar. Hasil lengkap dari indek bahaya dan luas bahaya tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2022. Rekapitulasikajian tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihai pada tabel berikut ini.

Tabel 0.6 Perhitungan Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	LUASAN BAHAYA (Ha)	KELAS BAHAYA
1.	BANJIR	71.252	TINGGI
2.	BANJIR BANDANG	973	TINGGI
3.	CUACA EKSTRIM	71.246	TINGGI
4.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	215	SEDANG
5.	GEMPABUMI	71.256	RENDAH
6.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	1.694	TINGGI
7.	KEKERINGAN	71.256	SEDANG

Sumber: Dokumen KRB Kab. Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat rendah hingga tinggi. Tingkat bahaya didapat dari kelasbahaya makimum per bahaya untuk seluruh potensi bahaya.Penyusunan setiap peta bahaya berdasarkan kepada data indikator pada setiapkomponen dari sumber data yang ditetapkan. Penjelasan hasil analisis dan luas daerah yangterpapar bahaya di Kabupaten Sidoarjo akan dijelaskan dalam sub-sub bab berikut.

a.Banjir

Pengkajian bahaya banjir disusun untuk mengetahui besar luasan daerah terpapar sertatingkat bahaya pada suatu kawasan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 71.252 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak. Bila dilihat secara keseluruhan semua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo berada pada kelas tinggi dengan 5 kecamatan berada pada kelas sedang. Lima kecamatan pada kelas sedang adalah Kecamatan Gedangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tarik, dan Kecamatan Waru.

b.Banjir Bandang

Pengkajian bahaya banjir bandang diperoleh dari parameter data sungai utama, topografi dan potensi longsor di hulu sungai. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir bandang di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 973 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak. Secara umum empat kecamatan (Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong dan Kecamatan Tarik) memiliki tingkat bahaya kelas tinggi.

c.Cuaca Ekstrim

Pengkajian bahaya cuaca ekstrim diperoleh dari parameter data keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 71.246 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan

kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak. Secara umum seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat bahaya kelas tinggi.

d.Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pengkajian bahaya cuaca ekstrim dan abrasi diperoleh dari parameter data tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi dan bentuk garis pantai. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 5 kecamatan yaitu, Kecamatan Buduran, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamtan Waru. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 215 Ha yang berada pada kelas sedang. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

e.Gempa Bumi

Pengkajian bahaya cuaca ekstrim dan abrasi diperoleh dari parameter data kelas topografi, dan intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukimaan. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 18 kecamatan atau seluruh kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 71.256 Ha yang berada pada kelas rendah. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

f.Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengkajian bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari parameter data jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo terdapat di seluruh kecamatan dengan kelas sedang, dan hanya 1 kecamatan berada pada kelas tinggi. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo, total luas bahaya adalah 1.694 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

g.Kekeringan

Pengkajian bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari parameter curah hujan bulanan. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 18 kecamatan dengan kelas sedang. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas kekeringan di Kabupaten Sidoarjo, total luas bahaya adalah 71.256 Ha yang berada pada kelas sedang. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3. Penilaian Kerentanan

Penilaian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapatmengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kerentanan dapat ditetapkan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana, Indikator yang digunakan dalam analisis kerentanan yang utama yaitu infiormasi keterpaparan baik dalam jumlah jiwa, dari segi kerugian rupiah yang hilang serta luas hektar lingkungan yang rusak.

Dari penilaian komponen kerertanan tersebut, maka diketahui potensi penduduk terpapar, potensi kerugian (dalam rupiah), dan potensi kerusakan tingkungan (dalam hektar). Hasil analisis dan perhitungan dari komponen kerentanan didapatkan dari beberapa hasil perhitungan yang dikelompokkan berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh BNPB. Perhitungan dilakukan untuk mendapatkan kelas penduduk terpapar, kelas kerugian rupiah, kelas kerusakan lingkungan sehingga menghasilkan tingkat kerentanan. perhitungan lebih mendalam dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo.

Adapun rekapitulasi hasil kajian kerentanan untuk menghitung potensi penduduk terpapar seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.7 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	Total Penduduk	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Umur Rentan
1	BANJIR	2.233.515	104	4.067	40.831	72.562
2	BANJIR BANDANG	13.668	96	79	1.003	2.003
3	CUACA EKSTRIM	2.233.630	104	4.069	369.303	325.246
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	-	-	-	-	-
5	GEMPABUMI	2.233.825	102	4.069	369.339	325.273
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
7	KEKERINGAN	2.233.825	104	4.058	287.015	324.532

Sumber: Dokumen KRB Kab. Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa potensi penduduk terpapar di Kabupaten Sidoarjo berbeda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkn kerentanan sosial budaya yang ada. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penduduk terpapar untuk seluruh potensi bencana berada pada kelas tinggi. Sedangkan hasil kajian kerentanan untuk menentukan potensi kerugian bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.8 Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	Potensi Kerugian (Rp. Juta)			Potensi Kerusakan Lingkungan	Kelas
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian		
1	BANJIR	3.468.945	3.495.632	6.964.577	-	Sedang
2	BANJIR BANDANG	58.160	435.561	493.721	-	Sedang
3	CUACA EKSTRIM	5.862.392	3.004.768	8.867.160	-	Sedang
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	2.186	483.500	485.686	-	Rendah

5	GEMPABUMI	219.550	430.413	649.963	-	Rendah
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	143.034	143.034	-	Sedang
7	KEKERINGAN	-	1.763.378	1.763.378	-	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kab. Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa potensi kerugian baik itu kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo berbeda-beda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan kerentanan fisik ekonomi dan lingkungan yang ada. Secara umum terlihat bahwa dominan potensi kerugian rupiah dan kerusakan lingkungan berada pada kelas sedang dan rendah. Penggabungan kajian penduduk terpapar dan kerugian bencana menghasilkan kajian kerentanan.

Adapun kajian kerentanan seluruh potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 0.9 Rekapitulasi Kajian Kerentanan Bencana di Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	Kelas			
		Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan Lingkungan	Tingkat Kerentanan
1	BANJIR	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
2	BANJIR BANDANG	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
3	CUACA EKSTRIM	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5	GEMPABUMI	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
7	KEKERINGAN	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah

Sumber: Dokumen KRB Kab. Sidoarjo 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan hasil pengkajian kerentanan terhadap 7 (tujuh) potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo Secara keseluruhan, kerentanan bencana berada pada tingkat sedang.

4. Penilaian Kapasitas

Perhitungan kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuanindividu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalammenangani ancaman bencana dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakanpencegahan, mitigasi dan mempersiapkan penanganan darurat, sedang menangani kerentananyang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Aspek kemampuan diantaranya adalah kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kapasitas suatu daerah meliputi aspek pemerintahan dan masyarakat yang dapat disinkronkan untuk menilai kapasitas daerah.

Penentuan kapasitas daerah dilakukan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan untuk setiap jenis bahaya. Ketahanan daerah merupakan perangkat untuk menilai kemampuan pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah. Sedangkan

kesiapsiagaan desa/kelurahan merupakan perangkat untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Kesiapsiagaan dilihat berdasarkan 5 (lima) indikator kesiapsiagaan, penilaian tersebut dilakukan dengan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat.

Penggabungan hasil kajian komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan menghasilkan kajian kapasitas Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi. Penggabungan tersebut memiliki persentase tersendiri. Bobot persentase tersebut disepakati bersama oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo yaitu 40% untuk ketahanan daerah dan 60% untuk kesiapsiagaan. Adapun hasil perhitungan tingkat kapasitas masing-masing bahaya di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 0.10 Rekapitulasi Kajian Kapasitas Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	Ketahanan Daerah	Kesiapsiagaan	Tingkat Kapasitas
1	BANJIR	0,73	-	Rendah
2	BANJIR BANDANG	0,73	-	Rendah
3	CUACA EKSTRIM	0,73	-	Rendah
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	0,73	-	Rendah
5	GEMPABUMI	0,73	-	Rendah
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	0,73	-	Rendah
7	KEKERINGAN	0,73	-	Rendah

Sumber: Dokumen KRB Kab. Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketahanan daerah pada tingkat sedang, hal tersebut dinilai berdasarkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi ancaman bencana. Sedangkan kesiapsiagaan desa/kelurahan berbeda tiap jenis bencnna, hal tersebut dikarenakan kesiapsiagaan lebih ditujukan pada kemampuan masyarakat Kabupaten Gresik dalam menghadapi potensi bencana yang mengarcam.

Penggunaan hasil penilaian kapasitas daerah untuk menghasilkan analisis kebijakan penanggulangan bencana daerah harus disinkronisasi dengan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang juga digunakan sebagai salah satu alat ukur nasional dalam melihat efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Mekanisme sinkonisasi 22 Indikator Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dengan 71 IKD adalah seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 0.11 Sinkronisasi Perka BNPB No. 3 dengan 71 Indikator Ketahanan Daerah

NO	JENIS BENCANA	SUB-SUB INDIKTOR/AKSI		PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
1	PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAG	1	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	P1 I1 (1, 2, 3, 4)	UTAMA
				P1 13 (10, 11); P5 13 (82)	PENDUKUNG
		2	Peraturan Daerah tentang	P1 I2 (5,6,7,8)	UTAMA
				P1 I1 (2,3,4); P1	PENDUKU

NO	JENIS BENCANA		SUB-SUB INDIKTOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
	AAN		Pembentukan BPBD	I3 (11, 12); P1 I4 (15,16); P2 I1 (19,20); P2 I2 (23,24); P2 I3 (27,28); P2 I4 (31,32); P3 I1 (35,36); P3 I4 (47); P4 I5 (65,66); P4 I6 (69,70); P5 I1 (73); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (82); P5 I4 (85)	NG
		3	Peraturan tentang pembentukan Forum RPB	P1 14 (13, 14, 15, 16)	UTAMA
				P1 I1 (2, 3); P1 13 (9, 10, 11, 12); P3 13 (43); P3 14 (47); P4 12 (54); P4 I3 (59); P4 I4 (63); P4 I5 (64); P4 16 (71); P5 13 (83); P5 I4 (87)	PENDUKUNG
		4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	P3 I1 (33, 34, 3s, 36)	UTAMA
				P1 I1 (2, 3); Pl I3 (9, 10, 11); P2 14 (31)	PENDUKUNG
		5	Peraturan Daerah tentang RPB	-	UTAMA
				P1 I1 (1, 2,3); P1 I3 (9, 10); P1 I4 (14, 15); P3 I3 (41, 42, 41); P4 I2 (53, 54, 55); P4 13 (57); P4 I4 (62, 63); P4 I5 (65); P5 I3 (81, 82, 83, 84)	PENDUKUNG
		6	Peraturan Daerah tentang Tataruang berbasis RPB	P4 I4 (61, 62, 63, 64)	UTAMA
				P1 I1 (2, 3, 4); P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
		7	BPBD	P1 I2 (5, 6, 7, 8)	UTAMA
				P1 I1 (2,3,4); P1 I3 (11, 12); P1 I4 (13, 15,16); P2 I1 (19,20); P2 I2 (23,24); P2 I3	PENDUKUNG

NO	JENIS BENCANA		SUB-SUB INDIKTOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
				(27,28); P2 I4 (31,32); P3 I1 (35,36); P3 I4 (47, 48); P4 I3 (59,60); P4 I4 (64); P4 I5 (65,66, 67, 68); P4 I6 (69,70, 71, 72); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I2 (77, 78, 79, 80); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	
		8	Forum RPB	P1 I4 (11, 14, 15, 16)	UTAMA
				P1 I1 (2,3); P1 I3 (9, 10, 11, 12); P3 I3 (43,44); P3 I4 (47, 48); P4 I2 (54 ,56); P4 I4 (63, 64); P4 I5 (67, 68); P4 I6 (71, 72); P5 I3 (83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		9	Komitmen DPRD terhadap PRB	-	UTAMA
				P1 I1 (2); P1 I2 (5, 6, 7, 8); P1 I3 (9); P1 I4 (14, 15, 16); P4 I1 (49, 50, 51, 52,); P4 I2 (54 , 55, 56); P4 I3 (60); P4 I2 (54, 55, 56); P4 I4 (61, 62, 63, 64); P5 I3 (82, 83, 84)	PENDUKUNG
2	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10	Peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	P2 I1 (17, 18, 79, 20)	UTAMA
				P2 I4 (29, 30, 31, 32); P4 I6 (69, 70,71,72)	PENDUKUNG
		11	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	P2 I1 (17, 18, 19, 20)	UTAMA
				P2 I2 (21, 22, 23, 24); P2 I4 (29, 30, 31, 32); P4 I6 (69 , 70, 71, 72)	PENDUKUNG
		12	Peta Kapasitas dan	P2 I1 (17, 18, 19,	UTAMA

NO	JENIS BENCANA		SUB-SUB INDIKTOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
			kajiannya	20)	
				P2 I2 (21, 22, 23 24); P2 I4 (29, 30, 31, 32); P4 I6 (69 , 70, 71, 72)	PENDUKUNG
		13	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	-	UTAMA
				P1 I1 (2,3); P1 I3 (9, 10, 11); P1 I4 (14, 15, 16); P3 I3 (41, 42, 43, 44,); P4 I2 (53, 54 , 55, 56); P4 I3 (57, 58, 59, 60); P4 I4 (62, 63, 64); P5 I3 (81, 82, 83, 84)	PENDUKUNG
3	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	P3 I1 (33, 34, 15, 36)	UTAMA
				P2 I2 (21, 22, 23, 24); P3 I4 (45 ,47, 48)	PENDUKUNG
		15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	-	UTAMA
				P2 I2 (22, 24); P3 I3 (41, 42); P3 I4 (45, 46, 47, 48); P4 I1 (57, 58, 59, 60)	PENDUKUNG
		16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemeritah, masyarakat mau pun dunia usaha	Pl I4 (13, 14, 15, 16)	UTAMA
				P1 I1 (2, 3); P1 I2 (s); P1 I3 (9, 10, 11)	PENDUKUNG
		17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa kritis	P5 I7 (73,74,75,76)	UTAMA
				P2 I3 (26, 27, 28); P2 l2 (79, 80); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan	P3 I1 (33, 34, 35, 36)	UTAMA
				P2 I2 (21, 22,	PENDUKU

NO	JENIS BENCANA		SUB-SUB INDIKTOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
			sistem pendataan bencana nasional	23,24)	NG
		19	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	-	UTAMA
				P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73,74,75); P5 12 (77); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		20	Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan	-	UTAMA
				P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73,74,75); P5 12 (77); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		21	Kajian Kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	-	UTAMA
				P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73,74,75); P5 12 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		22	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	-	UTAMA
				P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73,74,75); P5 12 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		23	Penyimpanan/pergudangan logistik PB	-	UTAMA
				P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73,74,75); P5 12 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		24	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	-	UTAMA
				P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73,74,75); P5 12 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		25	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	-	UTAMA
				P1 I2 (7); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (73,74,75); P5 12 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	PENDUKUNG
		26	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan daerah	-	UTAMA
				P1 I2 (6, 7); P1 I3 (10, 11); P4 I1 (49, 50, 5l, 52); P4 I2 (54, 55, 56);P5 I1	PENDUKUNG

NO	JENIS BENCANA		SUB-SUB INDIKTOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
				(73,74,75); P5 12 (77, 78, 79, 80); P5 I4 (86, 87, 88)	
4	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27	Penataan ruang berbasis PRB	P4 I4 (61, 62, 63, 64)	UTAMA
				P1 I1 (2, 3, 4); P4 I1 (50, 51); P4 I5 (67, 68); P4 I6 (69, 70, 71, 72)	PENDUKUNG
		28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	PE I1 (33, 34, 35, 36)	UTAMA
				P2 I2 (21, 22, 23, 24); P3 I4 (45, 47, 48)	PENDUKUNG
		29	SMAB	P3 I2 (37, 38, 39, 40)	UTAMA
				Pl I3 (9, 10. 11, 12); P1 I4 (13, 14 ,15); P3 I3 (41, 42); P5 I2 (77,78,79,80); P5 I3 (81, 82, 83)	PENDUKUNG
		30	RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	-	UTAMA
				Pl I3 (9, 10. 11); P1 I4 (13, 14 ,15); P4 I6 (69, 70, 71, 72); P5 I1 (73); P5 I2 (77,78,79,80); P5 I3 (81, 82, 83)	PENDUKUNG
		31	Desa Tangguh Bencana	P3 I4 (45, 46, 47, 48)	UTAMA
				Pl I3 (9, 10. 11, 12); P1 I4 (13, 14 ,15, 16); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P3 I1 (33, 34, 35, 36); P3 I3 (41, 42); P4 I2 (53, 54, 55, 56); P4 I3 (57, 58, 59, 60); P4 15 (65, 66, 67, 68); P5 I1 (73); P5 I2 (77,78,79,80); P5 I3 (81, 82, 83)	PENDUKUNG
5	PENINGKATAN EFEKTIVITAS	32	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG

NO	JENIS BENCANA		SUB-SUB INDIKTOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
	PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	33	Perlindungan daerah tangkapan air	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
		34	Restorasi sungai	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63,64)	PENDUKUNG
		35	Penguatan lereng	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
		36	Penegakan hukum	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
		37	Optimalisasi berkala hulu sungai	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
		38	Pemantauan berkala hulu sungai	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
		39	Penerapan bangunan tahan gempabumi	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
		40	Tanaman dan/ atau bangunan penahan gelombang tsunami	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
		41	Revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
		42	Restorasi lahan gambut	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61,	PENDUKUNG

NO	JENIS BENCANA	SUB-SUB INDIKTOR/AKSI		PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
				62, 63, 64)	
		43	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	P3 I3 (41, 42, 43, 44)	UTAMA
				P4 I1 (49, 50, 51, 52); P4 I4 (61, 62, 63, 64)	PENDUKUNG
6	PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	44	Rencana kontijensi gempabumi	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
				PL I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		45	Rencana kontijensi tsunami	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		46	Sistem peringatan dini Bencana Tsunami	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
				P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		47	Rencana evakuasi bencana tsunami	-	UTAMA
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		48	Rencana kontijensi banjir	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		49	Sistem peringatan dini bencana banjir	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
				P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		50	Rencana kontijensi	P5 I2 (77, 78, 79,	UTAMA

NO	JENIS BENCANA		SUB-SUB INDIKTOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
			tanah longsor	80)	
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
				P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		52	Rencana kontijensi karkahut	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		53	Sistem peringatan dini bencana karkahut	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
				P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		54	Rencana kontijensi erupsi gunungapi	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		55	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
				P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	-	UTAMA
				P2 I3 (10,11); P2 I3 (25, 26, 27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		57	Rencana kontijensi kekeringan	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28);	PENDUKUNG

NO	JENIS BENCANA		SUB-SUB INDIKTOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
				P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	
		58	Sistem peringatan dini bencana kekeringan	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
				P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		59	Rencana kontijensi banjir bandang	P5 I2 (77, 78, 79, 80)	UTAMA
				P1 I3 (10, 11); P2 I3 (25,26,27, 28); P5 I1 (73, 74, 75, 76); P5 I3 (81, 82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87, 88)	PENDUKUNG
		60	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	P2 I3 (25, 26, 27, 28)	UTAMA
				P5 I2 (77, 78, 79, 80)	PENDUKUNG
		61	Penentuan status tanggap darurat	-	UTAMA
				P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87), 88)	PENDUKUNG
		62	Penerapan sistem komando operasi darurat	-	UTAMA
				P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87), 88)	PENDUKUNG
		63	Pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana	-	UTAMA
				P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87), 88)	PENDUKUNG
		64	Pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban	-	UTAMA
				P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87), 88)	PENDUKUNG

NO	JENIS BENCANA		SUB-SUB INDIKTOR/AKSI	PERKA BNPB 3/2012 PRIORITAS INDIKATOR (NO PERTANYAAN)	KETERANGAN
				-	UTAMA
		65	Perbaikan darurat	P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87), 88)	PENDUKUNG
				-	UTAMA
		66	Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87), 88)	PENDUKUNG
				-	UTAMA
		67	Penghentian status tanggap darurat	P1 I1 (2, 3); P1 I3 (10, 11); P5 I1 (74, 75); P5 I3 (82, 83, 84); P5 I4 (85, 86, 87), 88)	PENDUKUNG
7	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
				P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG
		69	Pemulihan infrastruktur penting	P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
				P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG
		70	Perbaikan rumah penduduk	P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
				P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG
		71	Pemulihan penghidupan masyarakat	P4 I5 (65, 66, 67, 68)	UTAMA
				P1 I2 (6, 7); P1 I3 (9, 10, 11); P3 I4 (46); P4 I2 (54, 55, 56)	PENDUKUNG

Beberapa indikator yang tidak didapat sinkonisasi dengan Perka BNPB Nomor 3, maka hal ini dilakukan verifikasi langsung ke daerah melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif dengan melibatkan aktor-akor kunci penyelengga|ilan penanggulangan bencana di daerah.

5. Penilaian Risiko Bencana

Pengkajian dan penentuan level risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan dan kemampuan/kapasitas suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna mengurangi risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penaksiran terhadap risiko bencana suatu daerah melalui proses penggabungan bahaya, kerentanan dan kapasitas. Selain hasil tingkat risiko, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya. Hasil penilaian risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo akan diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

a.Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo

Penentuan tingkat risiko bencana saling berhubungan dengan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Analisis penentuan tingkat risiko yang dikaitkan tersebut sesuai dengan upaya pengurangan risiko bencana. Hasil Penilaian tingkat yang dihasilkan disesuaikan dengan peta risiko yang dihasilkan untuk setiap jenis bahaya yang berpotensi di Kabupaten Sidoarjo.

Penentuan tingkat risiko bencana merupakan analisis dari pengkalian tingkat bahaya dengan tingkat kerentanan yang berbanding terbalik dengan tingkat kapasitas. Hasil penilaian indeks tersebut dikelompokkan berdasarkan analisis tingkat sesuai dengan pedoman pengkajian risiko bencana. Adapun hasil dari tingkat risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 0.12 Rekapitulasi Kajian Kapasitas Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	BANJIR	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	RENDAH	RENDAH	SEDANG
5	GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
7	KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH	TINGGI

Sumber: Dokumen KRB Kab. Sidoarjo 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat risiko yang bervariasi dengan mayoritas pada tingkat risiko tinggi. Untuk bencana gempabumi memiliki tingkat resiko rendah, dan bencana gelombang ekstrim dan abrasi berada di tingkat sedang.

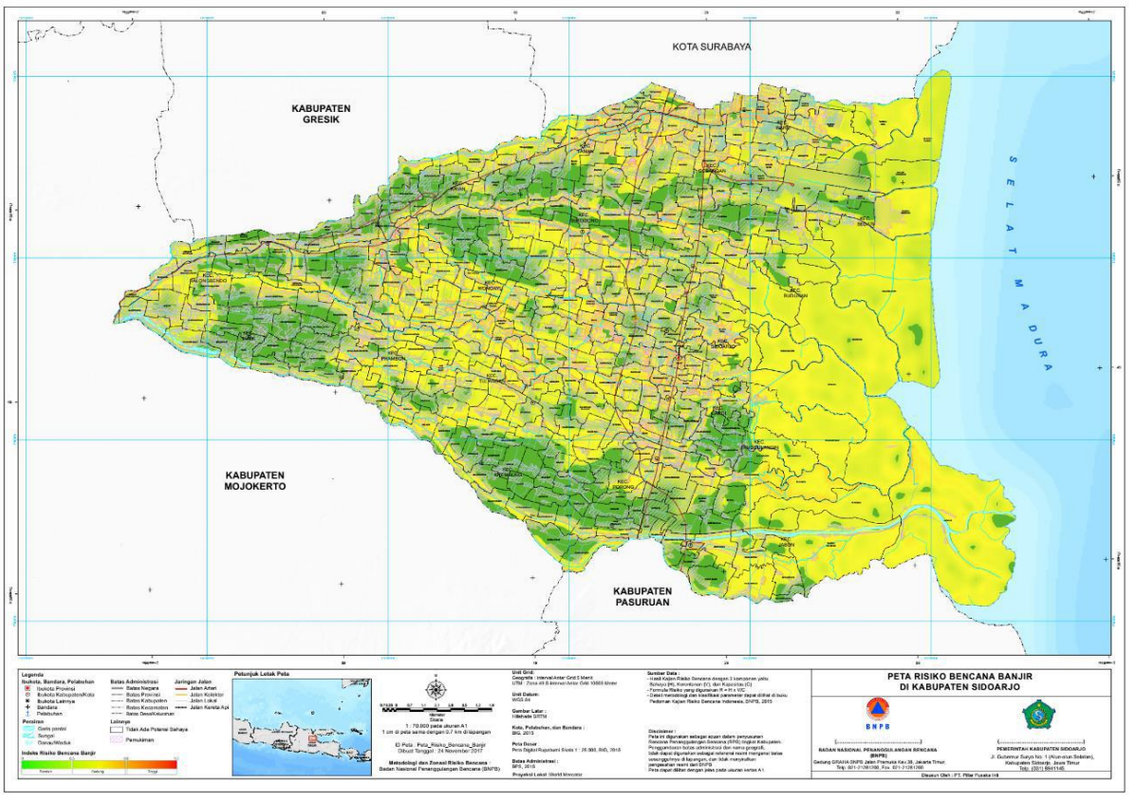
b.Peta Risiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo

Peta risiko bencana disusun dengan melakukan overlay peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Pemetaan risiko untuk setiap jenis potensi yang ada diselaraskan dengan hasil dan pengelompokkan nilai indeks yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar lebih mendetailkan hasil perhitungan yang dapat dilihat secara visual melalui sebuah peta.

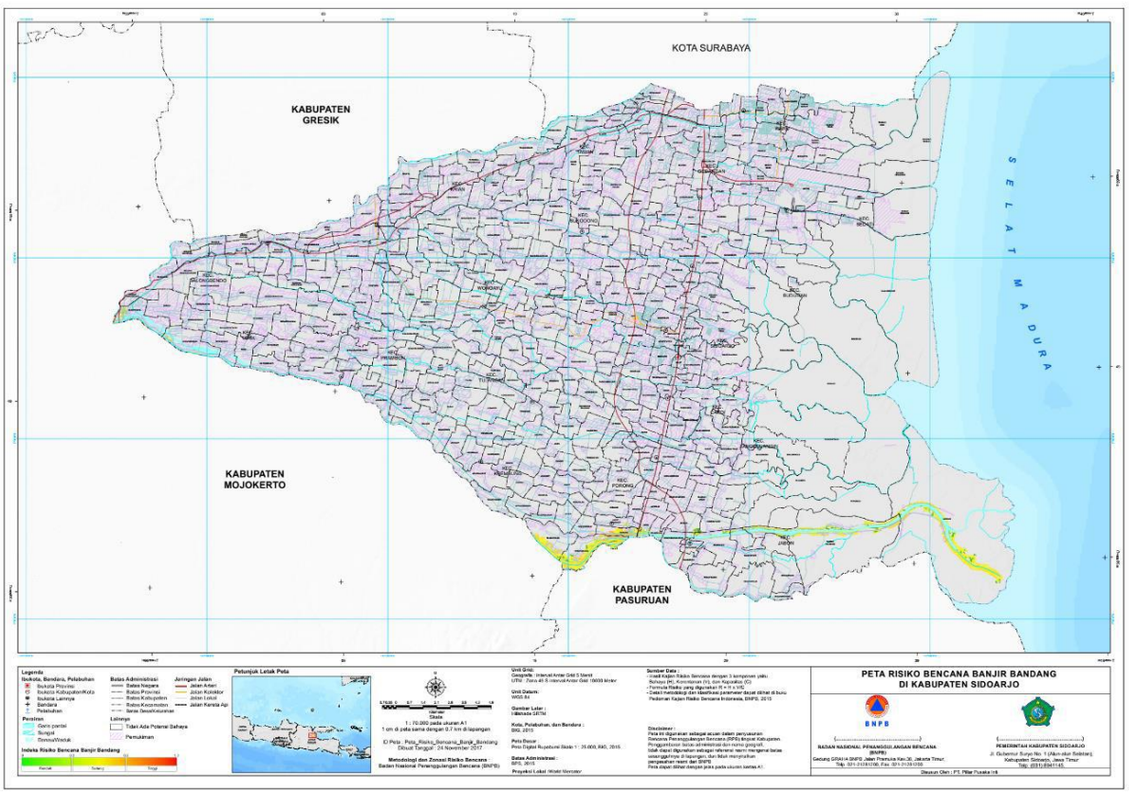
Untuk menghasilkan peta tersebut maka harus memenuhi prasyarat utama yang diatur oleh BNPB. Adapun prasyarat dalam pembuatan peta tersebut adalah:

1. Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hinqga tingkat desa/kelurahan).
2. Skala peta minimal adalah 1:50.000 untuk kabupaten/kota di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
3. Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa).
4. Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah).
5. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
6. Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 ha) dalam pemetaan rjsiko bencana.

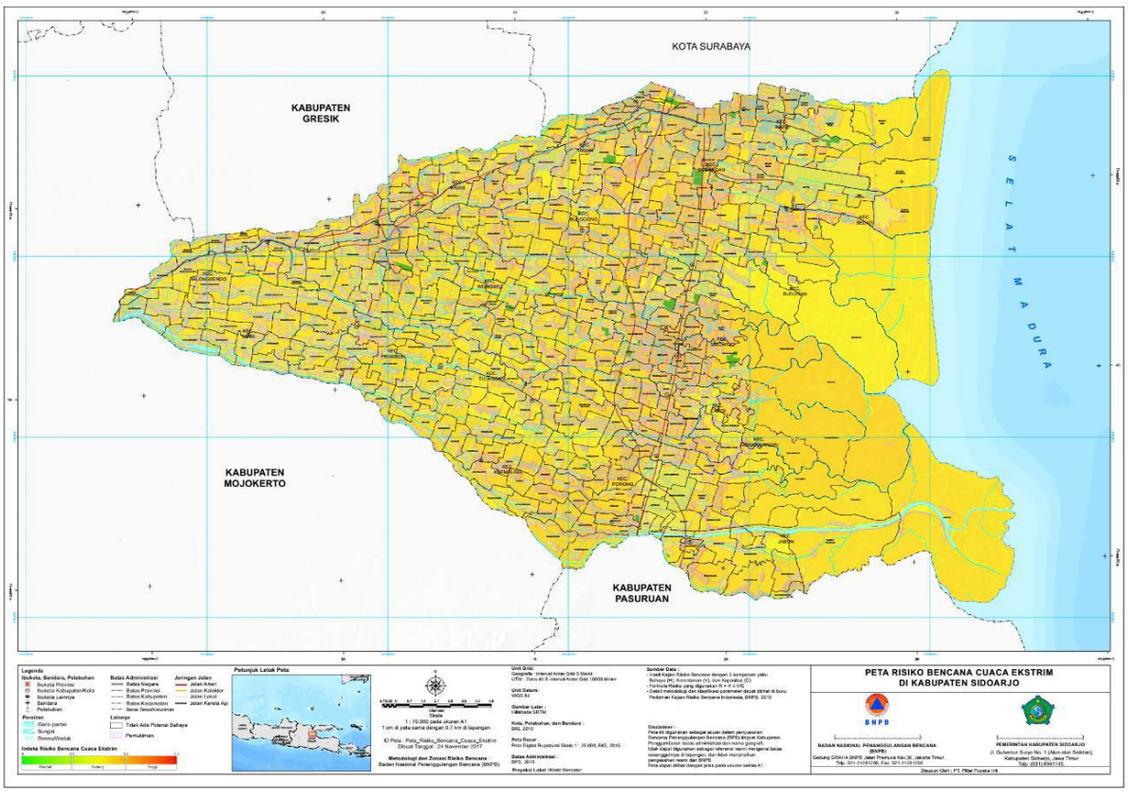
Visualisasi hasil peta telah diperhalus untuk lebih menjelaskan analisis tingkat risiko bencana di suatu daerah. Adapun peta risiko bencana yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar 2.2 sampai gambar 2.9. Peta risiko multi bahaya diperoleh berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing bahaya berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing. Peta risiko multi bahaya di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar 2.8.



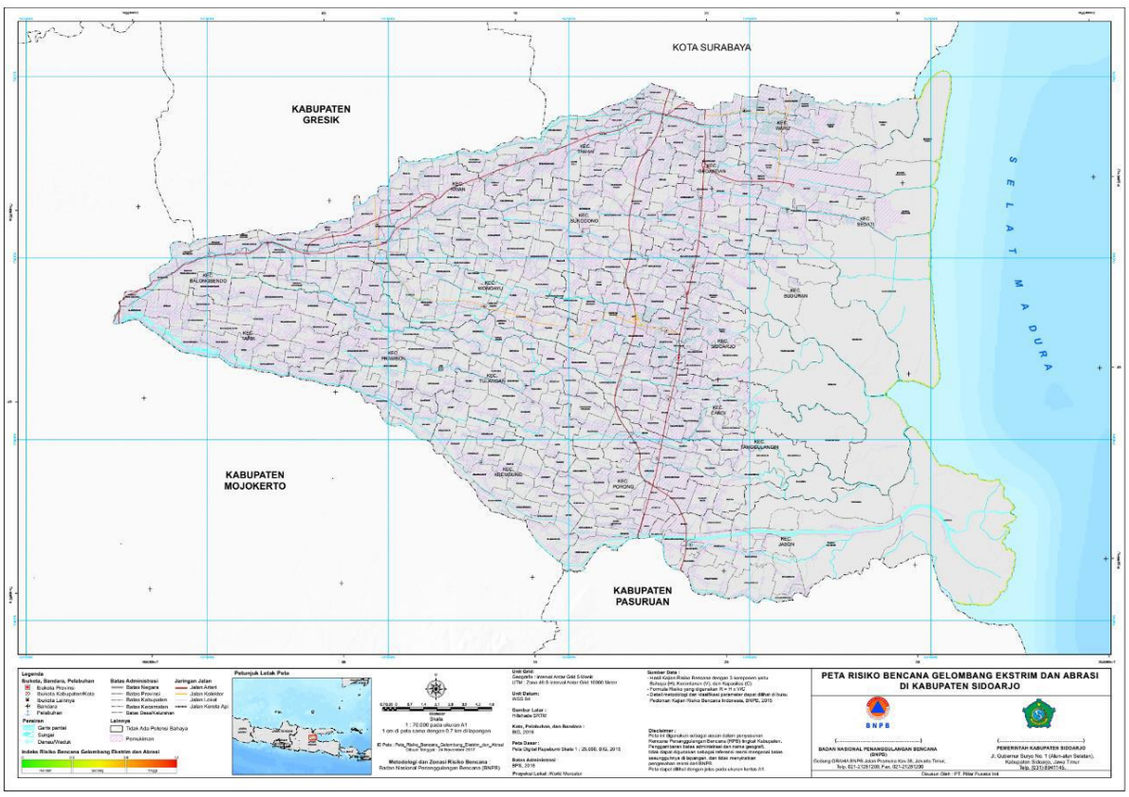
Gambar 0.5 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo



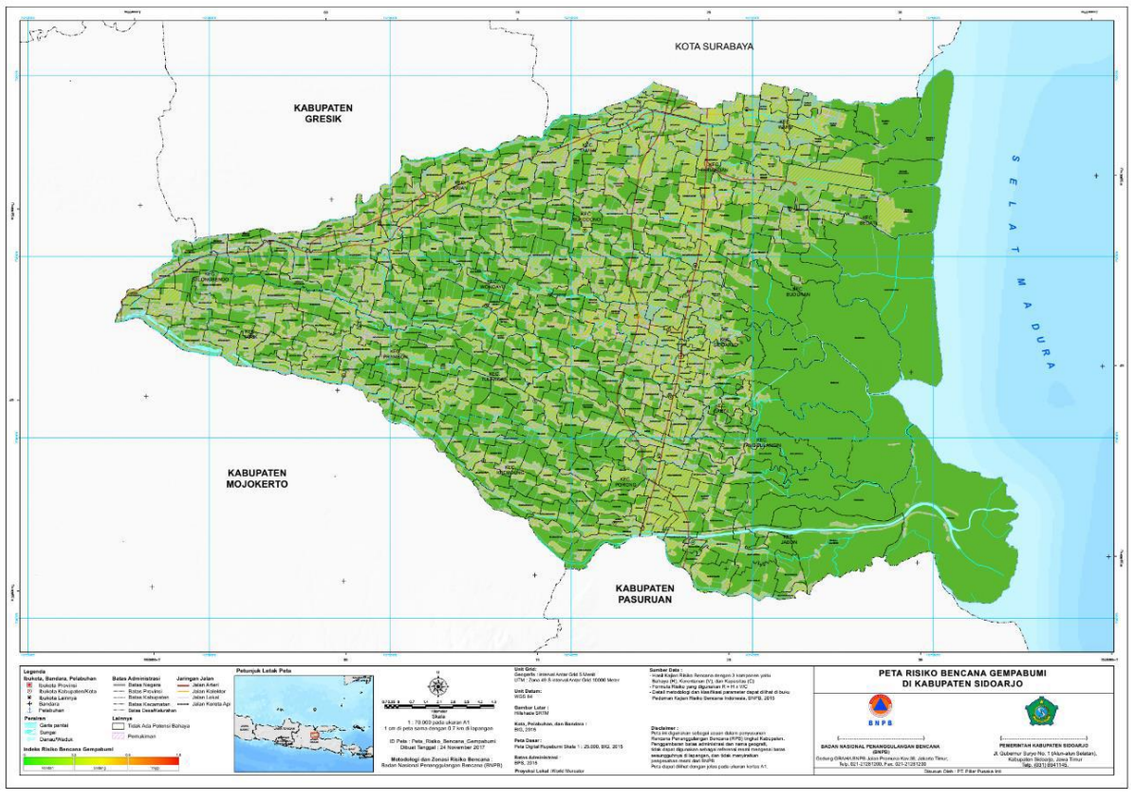
Gambar 0.6 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sidoarjo



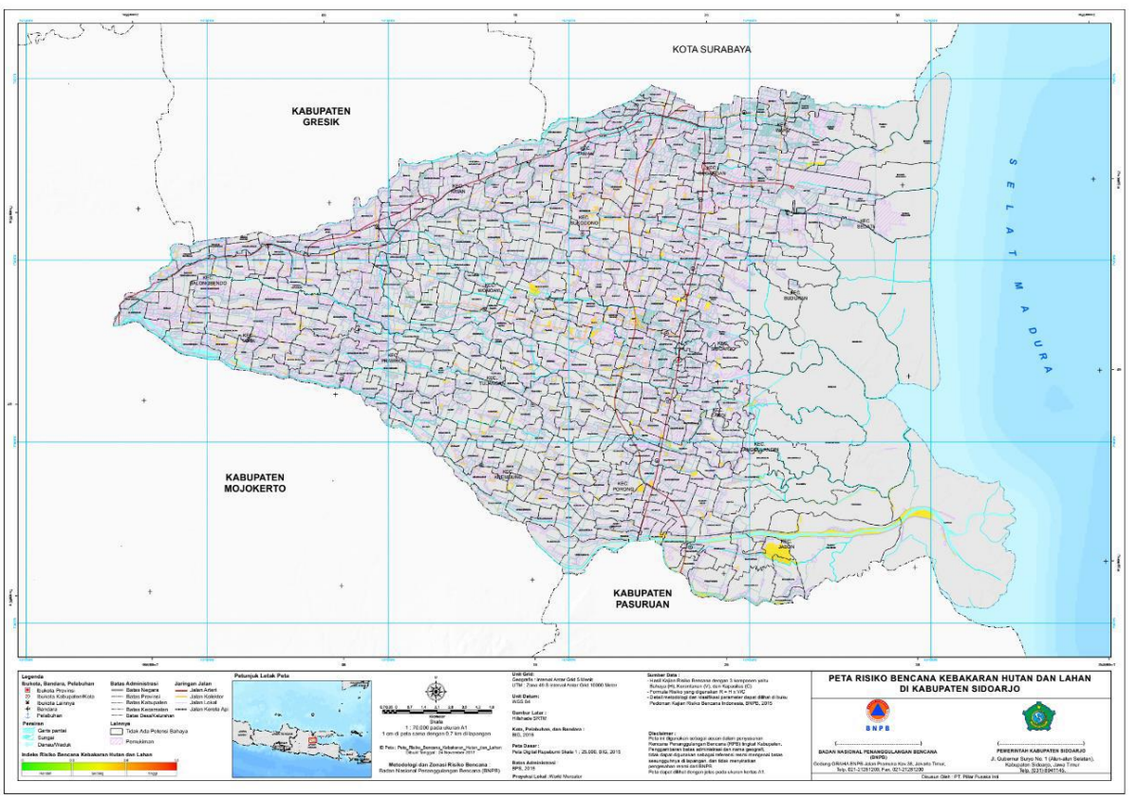
Gambar 0.7 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sidoarjo



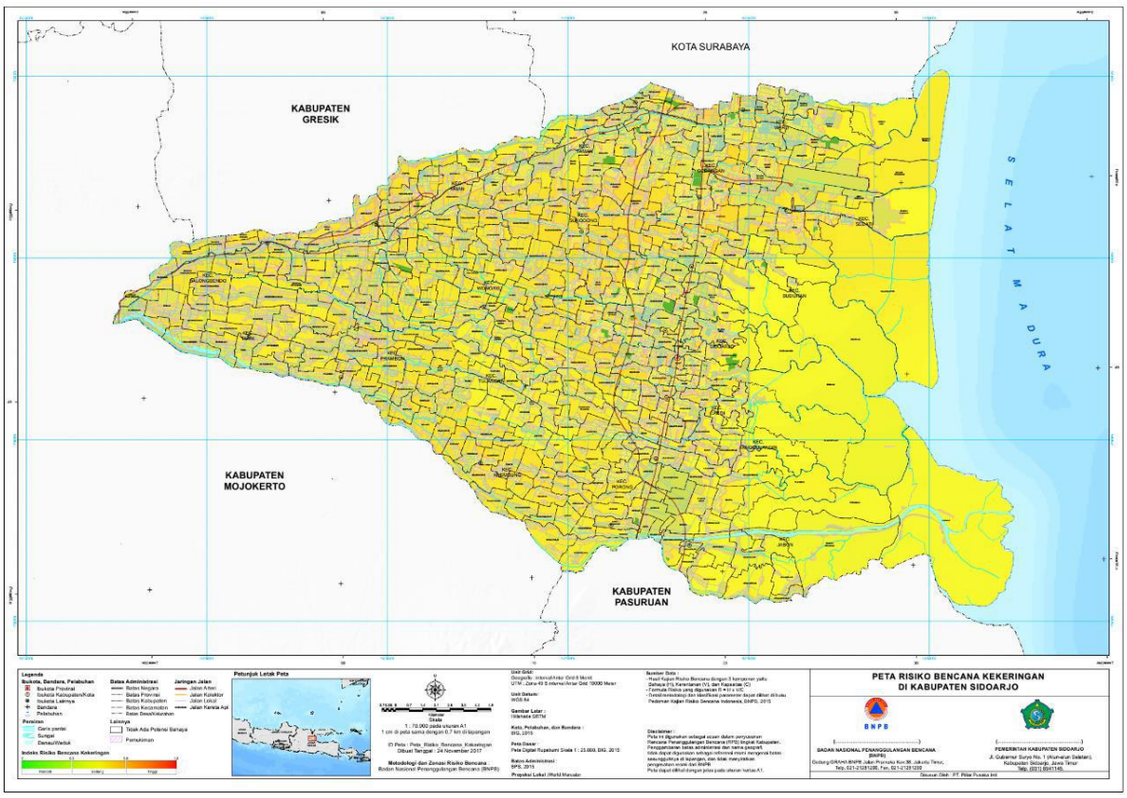
Gambar 0.8 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sidoarjo



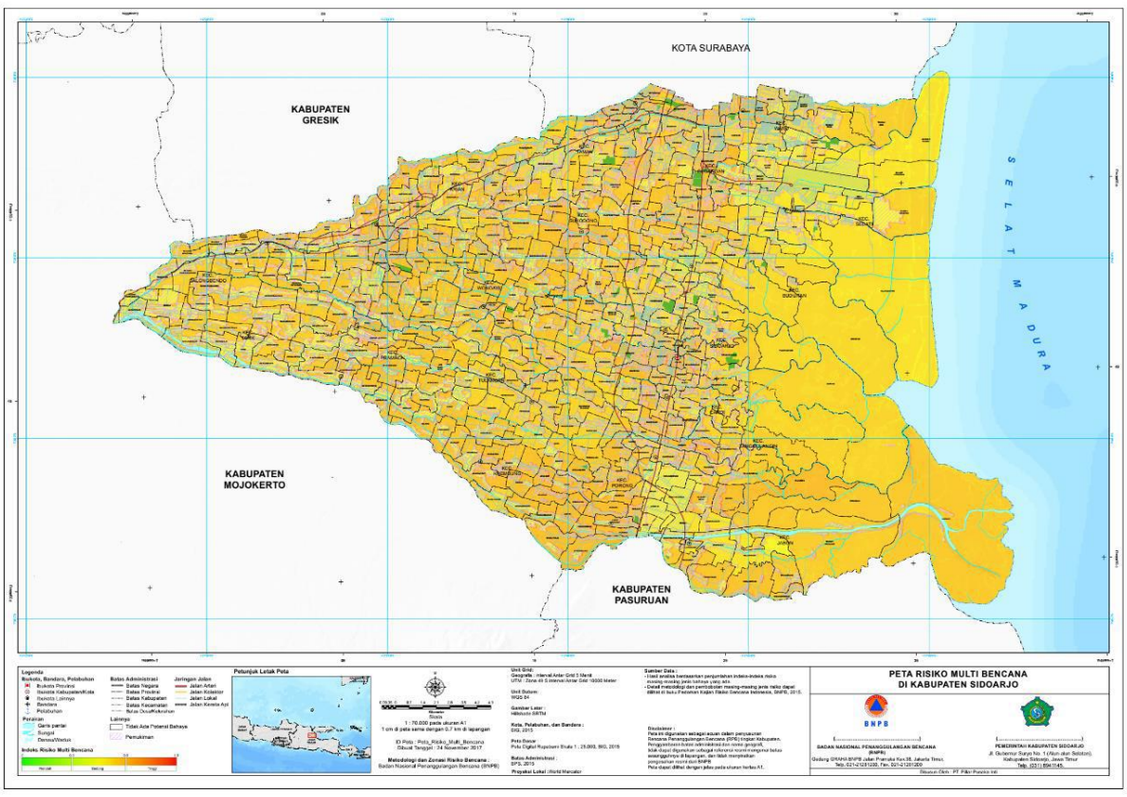
Gambar 0.9 Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 0.10 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 0.11 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 0.12 Peta Risiko Multi-Bencana di Kabupaten Sidoarjo

C. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI

Hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebuakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaran penanggulangan bencana. Terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kewenangan Kabupaten Sidoarjo dibutuhkan suatu perangkat yang mampu membatasi intervensi kebijakan secara objektif.

Perangkat tersebut sedapat mungkin mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif. Oleh karena itu, perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo yang didapatkan pada bab sebelumnya. Adapun hasil penentuan ancaman bencana prioritas penanganan di Kabupaten Sidoarjo dapat tertihat pada Gambar 2.9.

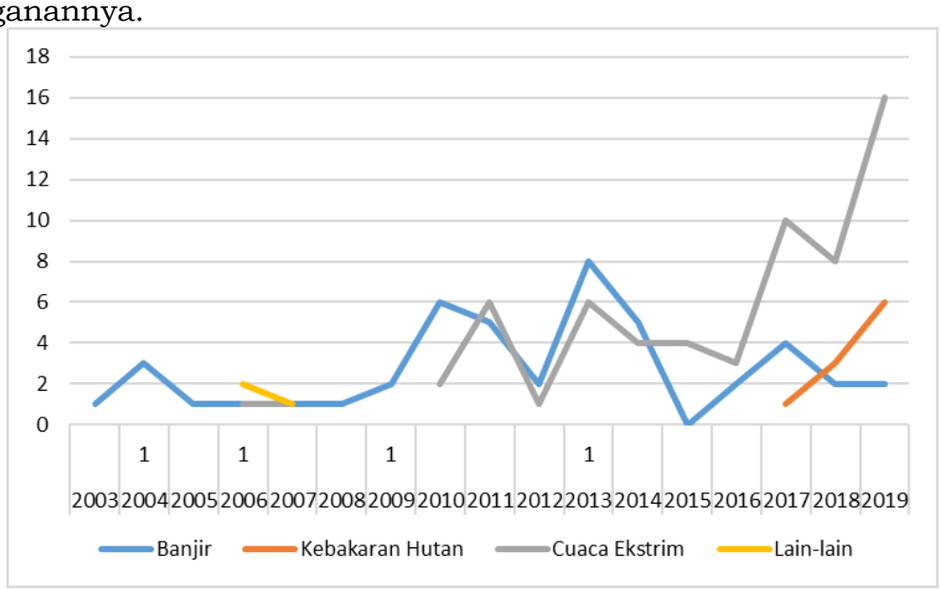
TINGKAT RISIKO BENCANA		KECENDERUNGAN RESIKO		
		TURUN	TETAP	NAIK
TINGKAT RESIKO	RENDAH		Gempabumi	
	SEDANG		Gelombang Ekstrim dan Abrasi	
	TINGGI		Kebakaran Hutan dan lahan, Kekeringan	Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim,

Gambar 0.13 Matriks Penentuan Bencana Prioritas Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Gambar 2.10, dapat dijabarkan bahwa ancaman bencana prioritas dengan tingkat risiko tinggi dan naik adalah banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrim. Kemudian semua berada pada kecenderungan risiko tetap, bencana tingkat resiko tinggi yaitu, kebakaran hutan, dan kekeringan, untuk resiko sedang gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan untuk resiko rendah adalah gempabumi.

D. ANALISA AKAR MASALAH

Berdasarkan pada sejarah kejadian bencana dari rentang tahun 2003-2019 dapat dilakukan analisa sederhana bahwa bencana banjir sangat merupakan potensi bencana yang setiap tahun selalu ada. Meskipun tidak ada korban meninggal, paling tidak bencana banjir perlu diperhitungkan dan dikurangi dampaknya. Bencana kebakaran hutan dalam 3 tahun terakhir setidaknya terjadi sehingga perlu juga dicarikan alternatif. Kemudian yang lebih penting adalah pada tahun 2019 terakhir terjadi kondisi pandemi dimana ditetapkan sebagai bencana nasional. Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam wilayah persebaran dan perlu tindak lanjut dalam penanganannya.



Gambar 2.14 Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo 2003-2019

E. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu Strategis memaparkan 7 (tujuh) kegiatan yang telah disesuaikan dengan JakstranasPB. Tujuh kegiatan tersebut adalah:

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan

1. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Dalam pembentukan BPBD, Kabupaten Sidoarjo juga sudah mengacu pada aturan yang dikeluarkan BNPB terkait dengan struktur dan organisasi BPBD. Ini juga diperkuat melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 tahun 2011 mengenai pembentukan BPBD.
3. BPBD Kabupaten Sidoarjo belum memiliki Forum PRB yang sedang diinisisasi oleh BPBD Provinsi. Komunitas-komunitas tersebut nantinya bekerja sesuai dengan aturan Kepala BPBD Provinsi dan Kepala BNPB.
4. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki aplikasi Sigap yang berperan dalam penyebaran informasi bencana dan diperkuat oleh Dinas Kominfo melalui command center. BPBD Kabupaten Sidoarjo juga melaporkan data-data kebencanaan ke BPBD Provinsi yang selanjutnya diteruskan ke BNPB secara nasional.
5. Kabupaten Sidoarjo belum memiliki Rencana Kontinjensi dari BNPB untuk setiap kategori kebencanaan yang ada. Akan tetapi, terdapat persiapan pelaksanaan rencana kontinjensi Kabupaten Sidoarjo yang sudah diperkuat dengan adanya dokumen ini dan regulasi daerah.
6. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo sudah disusun secara partisipatif dari multi pihak dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013.
7. Perda RTRW di Kabupaten Sidoarjo sudah mempertimbangkan ancaman bencana dan prinsip-prinsip PRB serta dijalankan dengan koordinasi bersama Bappeda. Sudah ada sanksi penggusuran bagi yang melanggar peraturan ini.
8. DPRD Kabupaten Sidoarjo ini sudah banyak berkontribusi dalam penanggulangan bencana, yang ditunjukkan melalui pengesahan anggaran, penerimaan usulan, dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah khususnya BPBD dalam penanggulangan bencana. DPRD juga mendukung melalui program Jasmas.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

1. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas yang menjadi dasar kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana yang sudah dimiliki juga menjadi dasar bagi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang sudah dibuat.
2. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang telah disusun, sudah disahkan menjadi peraturan daerah yang menjadi landasan bagi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo dalam bekerja menanggulangi kejadian bencana serta mengurangi risiko bencana yang ada.

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

1. Secara umum Kabupaten Sidoarjo sudah mempunyai jaringan penyebaran informasi bencana yang dirasa cukup efektif dalam menyebarluaskan informasi kejadian bencana kepada masyarakat, yaitu menggunakan aplikasi Sigap. Aplikasi ini data-datanya selalu diperbaharui oleh Pusdatin dan Pusdalops.
2. Kabupaten Sidoarjo sudah sering melakukan sosialiasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kecamatan-kecamatan. Sosialisasi ini sudah rutin dilaksanakan.

3. Sudah terjalin komunikasi yang aktif antar SKPD di Kabupaten Sidoarjo dalam berbagi peran untuk kegiatan terkait penanggulangan bencana.
4. Saat ini Pusdalops BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah bekerja berlandaskan Surat Keputusan mengenai Pusdalops, yang dirasa sudah efektif dalam merespon kejadian-kejadian darurat bencana.
   a. Sistem pendataan bencana Kabupaten Sidoarjo masih belum terintegrasi dengan pendataan Nasional, namun BPBD Kabupaten Sidoarjo melalui Pusdatin secara rutin melaporkan data-data yang ada ke Pusdatin Provinsi.
   b. Kabupaten Sidoarjo melalui Diklat Damkar saat ini sudah melaksanakan pelatihan gabungan penggunaan peralatan PB secara berkala. Ini juga sudah dilakukan bertahap dan menghasilkan personil yang terlatih dan dapat merespon saat terjadinya bencana.
   c. Sudah dilakukan juga latihan kesiapsiagaan melalui geladi yang dilakukan secara bertahap.
   d. Untuk kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan, serta pemeliharaan belum ada kajian kebutuhan dan lembaga khusus yang menangani.
   e. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki gudang penyimpanan peralatan dan logistik bencana.
   f. Kabupaten Sidoarjo juga belum memiliki strategi pemenuhan energi listrik dalam keadaan darurat.
   g. Untuk pemenuhan pangan, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab. Namun, belum ada rencana dan strategi khusus untuk ini.

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

1. Penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo sedang disusun dan sudah mengacu pada RPB yang dibuat. Untuk informasi penataan ruang Kabupaten Sidoarjo ditangani oleh Bappeda dan sudah dimanfaatkan oleh publik secara luas.
2. Kabupaten Sidoarjo telah memberikan sosialisasi untuk Sekolah dan Madrasah Aman Bencana yang merupakan kegiatan BPBD.
3. Semua rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo sudah disosialisasikan mengenai program Rumah Sakit Aman Bencana.
4. Telah dilakukan peningkatan kapasitas untuk Destana ysng dilakukan oleh BPBD.

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

1. Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun kebijakan untuk mekanisme bangunan tahan gempa bumi sebagai pedoman langkah pencegahan bencana gempa bumi. Sebagai upaya mitigasi, Pemkab Sidoarjo dapat menerapkan aturan untuk bangunan tahan gempabumi sebagai syarat pada pemberian IMB.
2. Kabupaten Sidoarjo dapat membentuk tim pemantauan hulu sungai yang diperkuat dengan kebijakan daerah guna mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang.
3. Pemeliharaan dan peningkatan ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir perlu terus diperhatikan sebagai langkah pencegahan.
4. Peraturan dan kebijakan yang sudah ada perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan diimplementasikan. Ini juga perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala bagaimana kebijakan ini diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

1. Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempabumi dan kekeringan melalui perencanaan kontijensi perlu dilakukan agar Kabupaten Sidoarjo mempunyai perencanaan yang menyeluruh untuk seluruh kejadian bencana.
2. Untuk rencana kontinjensi kebakaran hutan dan lahan serta banjir dan banjir bandang yang sudah dimiliki Kabupaten Sidoarjo, ini perlu terus diperbaharui secara berkala sehingga data dan penanggulangan bencananya akan terus berjalan dengan efektif.
3. Alat peringatan dini untuk banjir bandang yang sudah ada perlu terus dimonitor dan dipelihara sehingga dapat berfungsi dengan baik saat terjadi bencana.
4. Untuk sistem peringatan dini bencana banjir, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan, perlu didiskusikan dan disepakati sehingga peringatan dini yang ada bisa membantu masyarakat untuk lebih cepat melakukan evakuasi ketika terjadi bencana.
5. Penguatan mekanisme penetapan dan penghentian status darurat bencana sudah baik dengan adanya dasar surat keputusan bupati. Ini bisa ditingkatkan dan diperkuat dengan kebijakan aturan daerah yang memuat mekanismenya.
6. Operasi Tanggap Darurat Bencana perlu diperkuat dengan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan yang terperinci yang memuat sistem komando dan penerapannya.
7. Penguatan kapasitas dan mekanisme operasi tim reaksi cepat untuk kaji cepat bencana dan operasi tim penyelamatan dan pertolongan korban yang sudah dilakukan di tim gabungan yang dibentuk Kabupaten Sidoarjo dapat ditingkatkan dengan melakukannya secara rutin dan terus mengembangkan keahlian-keahlian lainnya yang terkait dengan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan kejadian bencana saat darurat.

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

1. Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana, perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, dan perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana perlu disusun bersama-sama di tingkat SKPD serta didukung Forum PRB yang sudah dibentuk.
2. Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana sudah mengacu pada peraturan daerah ini juga perlu mengkaji kebutuhan masyarakat serta prinsip pengurangan risiko bencana.
   Untuk rencana kontinjensi kebakaran.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS

Kabupaten Sidoarjo yang berada pada kawasan rawan bencana, memerlukanimplementasi kebijakan pembangunan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan iniberpedoman pada RPJMN IV, lakstranas PB, RPJMD Provinsi lawa Timur dan RPJMDKabupaten Sidoarjo. Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsipdasar Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang juga selaras dengan prinsip-prinsipdasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional bertujuan untuk melihat ketercapaianprogram nasional dan mempermudah kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan akses bantuandalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Penyelarasan program perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalampenanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu(1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;(3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (a) Penanganan Tematik KawasanRawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) PenguatanKesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem PemulihanBencana.

A. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari gugusan kepulauan. Secara geografis, posisi Indonesia berada di kawasan aktivitas vulkanik dan tektonik pergerakan Lempeng Benua Asia dan Lempeng Benua Australia. Kondisi geografis ini mengakibatkan Indonesia rentan terhadap bencana geologi seperti gempabumi, tsunami dan letusan gunungapi.

Di lain pihak, secara klimatologis Indonesia merupakan centre of action dari berbagai proses cuaca dan iklim, baik pada skala regional maupun global. Hal ini karena posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator menjadi tempat pertemuan antara sirkulasi udara Hadley dan sirkulasi udara Walker, yang berdampak pada dinamika cuaca dan iklim.

Kondisi tersebut mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana, meskipun disisi lain juga kaya akan sumberdaya alam. Potensi risiko bencana alam tersebut meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunungapi), dan bencana akibathidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung). Sedangkan potensi bencana non-alam antara lain adalah bencana akibat faktor biologi (epidemi dan wabah penyakit) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia dan lain-lain).

Berdasarkan data Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) diketahuibahwa selama tahun 2020 bencana alammengakibatkan 376 orang meninggal, 6.796.707 orang mengungsi/menderita dan 33.847 rumahrusak dengan rincian 13.240 rusak berat, 9.694rusak sedang dan 42.809 rusak ringan.

Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana.

Berbagai program telah dilaksanakanoleh pemerintah untuk mengurangi risikobencana baik preventif, tanggap darurat danmitigasi bencana hingga rehabilitasi danrekonstruksi pasca-bencana. Program-programtersebut ditetapkan sebagai upaya untukmencapai tujuan

penanggulangan bencanasebagaimana amanat Undang-Undang Nomor24 tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana, yaitu untuk:

a. Memberikan perlindungan kepadamasyarakat dari ancaman bencana.
b. Menyelaraskan peraturan perundangundangan yang sudah ada.
c. Menjamin terselenggaranyapenanggulangan bencana secara terencana,terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
d. Menghargai budaya lokal.
e. Membangun partisipasi dan kemitraanpublik serta swasta.
f. Mendorong semangat gotong royong,kesetiakawanan, dan kedermawananmenciptakan perdamaian dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

B. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruhinstansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satukunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Berdasarkan IsuStrategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraanpenanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukupuntuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan daruratbencana.

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, KedudukanRPB serta Isu Strategis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkankepada "Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program PenanggulanganBencana".

C. KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Sebagai upaya implementasi RPB di Kabupaten Sidoarjo, maka diperlukan sebuah Teknik pengarusutamaan untuk dapat menjelaskan hubungan antara kebijakan, strategi dan aksi penanggulangan bencana didalam RPB, serta teknik penerapannya disetiap komponen pelaku RPB. Penjelasan teknik ini lebih difokuskan pada alur pikir pengarusutamaan dan komunikasi kelompok pemangku kepentingan yang pada umumnya terlibat dalam pelaksanaan RPB. Teknik pengarusutamaan dapat lebih diperdalam dengan menjelaskan secara terpisah dan teperinci kerangka setiap kelompok pemangku kepertingan.

Sebagai pendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah melaui OPD terkait pada instansi masing-masing menyusun program ataupun aksi yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing OPD beserta sesuai dengan tahapan kebencanaan (Pra Bencana, Saat bencana, dan Pasca bencana). Untuk program & aksi secara keseluruhan bisa dilihat pada Lampiran Rencana dan Program Aksi tiap OPD

1.Kerangka Pengarusutamaan

Dasar dari kerangka pengarusutamaan RPB yaitu perspektif penanggungjawab pengarusutamaan RPB. BPBD Kabupaten Sidoarjo memiliki mandat untuk melakukan pengarusutamaan tersebut dengan dibantu oleh unsur Tim Substansi Penyusun RPB dengan membentuk tim khusus lintas institusi.

Oleh karena itu, penyusunan kerangka pengarusutamaan RPB dilakukan atas dasar peran dan keterlibatan kelompok pemangku kepertingan yang terlibat dalam pelaksanaan RPB. Kelompok pemangku kepentingan secara umum terdiri dari pemerintah dan legislatif, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyakarat dan media.

b. Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB

1. Pengarusutamaan RPB dilakukan secara sistematis oleh semua

pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir pengarusutamaan RPB dibutuhkan sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasikan oleh BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pengarusutamaan RPB.

2. Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Komposisi keanggotaan gugus tugas ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.

c. Kerangka Pengarusutamaan Kelompok Pemangku Kepentingan

4. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo
   i. Pengarusutamaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditujukan untuk internalisasi RPB dalam RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan Forum RKPD. Selain itu pengarusutamaan juga ditujukan pada fungsi Pemenntah Kabupaten Sidoarjo sebagai regulator, koordinator dan promotor daerah terkait implementasi RPB.
   ii. Peran keterlibatan kelompok pemerintah dan DPRB Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
      1) Menetapkan indikator yang akan dicapai oleh daerah terkait penanggulangan bencana;
      2) Menyediakan data dan infomasi yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
      3) Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
      4) Melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan aksi-aksi penanggulangan bencana;
      5) Menyediakan dukungan regulasi anggaran; dan
      6) Menghimpun kontribusi anggaran dari pemerintah vertikal dan non pemerintah.
      7) Mengarusutamakan RPB Kabupaten Sidoarjo ke tingkat provinsi dan nasional pada saat diperlukan.
5. Akademisi dan Praktisi
   i. Pengarusutamaan akademisi dan pakar yang ditujukan pada fungsi sebagai pendukung sumberdaya implementasi RPB.
   ii. Peran dan keterlibatan kelompok akademisi dan pakar dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
      1. Mendukung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
      2. Memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB; dan
      3. Memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Filantropi dan Bisnis
   i. Pengarusutamaan filantropi dan bisnis yang ditujukan pada fungsi sebagai pendukung sumberdaya implementasi RPB.
   ii. Peran dan keterlibatan kelompok filantropi dan bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
      1. Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki

kelompok
2. Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; dan
3. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.

7. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Media
   i. Pengarusutamaan Ormas dan Media yang ditujukan pada fungsi sebagai pendukung sumberdaya implementasi RPB.
   ii. Peran dan keterlibatan kelompok Ormas dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
      1. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi, dan advokasi;
      2. Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
      3. Memberikan pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentinga; dan
      4. Memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Gambaran kerangka pengarusutamaan antar kelompok pemangku kepentingan terkait implementasi RPB dapat dilihat pada



Gambar 3.1 Kerangka Pengarusutamaan Antar Kelompok Pemangku Kepentingan

1.Kerangka Komunikasi

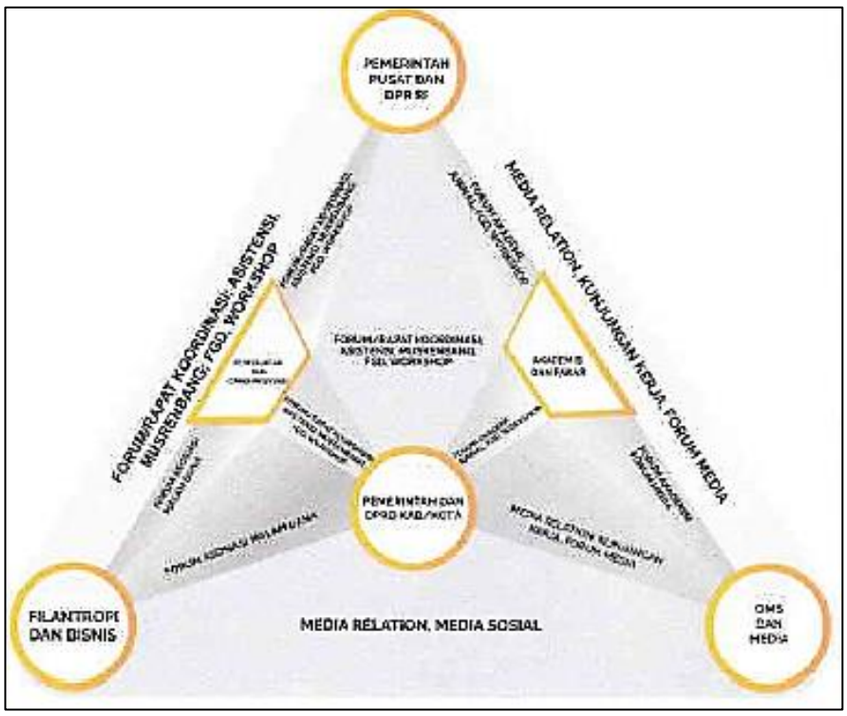
Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB kepada tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (awareness), membangun ketertarikan (interest), mendorong inisiatif partisipasi (searching), mewujudkan aksi (action), dan berbagi hasil dan pembelajaran (sharing).

a. Kerangka Umum

Kerangka umum komunikasi untuk pengarusutamaan RPB pada setiap kelompok pemangku kepentrngan sesuai dengan tahapannya dapat dilihat pada tabel berikut:

b. Skema dan Komunikasi

Skema dan media komunikasi dapat disusun dengan menggunakan Kerangka Umum Komunikasi Pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana Daerah. Skema ini dapat dipakai oleh Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB seperti yang terdapat pada gambar berikut.



Gambar 3.2 Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB

Jalur komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB tiap-tiap kelompok meliputi Pemerintah Pusat dan DPR RI dapat langsung melakukan komunikasi langsung dengan kelompok filantropi melalui forum/rapat koordinasi berupa asrstensi, musrembang, FGD dan workshop Pemerintah Pusat dan DPR RI juga dapat langsung berkomunikasi langsung dengan kelompok OMS dan Media melalui media relation, kunjungan kerja dan Forum Media. Selengkapnya jalur komunikasi gugus tugas Pengarusutamaan RPB dapat dilihat pada gambar di atas.

D.PENDANAAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanqgulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

1. Sumber Pendanaan

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimakud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

2. Angggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat nasional maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
3. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dad masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerirtah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
4. Dalam mendorong patisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanagulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untukberpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penangulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannnya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

2. Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penangulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS

Kabupaten Sidoarjo yang berada pada kawasan rawan bencana, memerlukanimplementasi kebijakan pembangunan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan iniberpedoman pada RPJMN IV, lakstranas PB, RPJMD Provinsi lawa Timur dan RPJMDKabupaten Sidoarjo. Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsipdasar Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang juga selaras dengan prinsip-prinsipdasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional bertujuan untuk melihat ketercapaianprogram nasional dan mempermudah kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan akses bantuandalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Penyelarasan program perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalampenanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu(1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;(3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (a) Penanganan Tematik KawasanRawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) PenguatanKesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem PemulihanBencana.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan RPB Kabupaten Sidoarjo adalah:

- Mengidentifikasi area di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki risiko terkena bencana serta menyusun pilihan tindakan yang sesuai untuk menurunkan risiko bencana tersebut
- Mengutamakan isu dan upaya penanggulangan bencana di dalam program kerja Kabupaten Sidoarjo
- Menjadi pedoman yang terpadu bagi pemaku kepentingan Kabupaten Sidoarjo untuk menurunkan risiko bencana di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana daerah
- Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi langkah-langkah terkait penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Sasaran Penanggulangan Bencana :
“Menurunnya Indeks Risiko Bencana Daerah”

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana maka strategi penanggulangan bencana dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.1 Strategi Penanggulangan Bencana

POLA	STRATEGI
1 IMPLEMENTASI PUSAT	Pernerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melakanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan termasuk Pakar.

2 KONEKTIVITAS PUSAT DAN DAERAH	Pernerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebiakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang, serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.
3 IMPLEMENTASI DAERAH	Sernua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi Indikator di Kabupaten/Kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.

2. Arah Kebijakan

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruhinstansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satukunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Berdasarkan IsuStrategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraanpenanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukupuntuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan daruratbencana.

Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, KedudukanRPB serta Isu Strategis Daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkankepada "Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program PenanggulanganBencana".

Kebijakan Penanggulangan Bencana adalah :
“Mengurangi Risiko Bencana dan Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana”

C. PROGRAM KEBENCANAAN

Program Penanggulangan Bencana adalah :
“Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana”

1.Kegiatan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Penguatan Kebuakan dan Kelembagaan;
2. Penilaian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
6. Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Hubungan antara Sasaran Penanggulangan Bencana,Strategi Penanggulangan Bencana dan Kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Metode Pengkajian Resiko Bencana

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

BAB IV RENCANA AKSI

Sasaran Penanggulangan Bencana adalah indeks risiko bencana yang dapat ditekan hingga 20 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut maka diturunkan menjadi Program Penanggulangan Bencana yaitu Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah.

Dalam bab ini akan dibahas secara lebih mendalam tentang Rencana Aksi Daerah (MD) yang mencakup pola umum aksi penanggulangan bencana, keterlibatan institusi, penganggaraan, pola kontribusi penganggaran penanggulangan, kerangka aksi. Pada Bab ini juga akan dibahas tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang kemudian akan dijabarkan kedalam bentuk kegiatan, aksi indikator aksi dan ketedibatan institusi.

A. POLA UMUM AKSI PENANGGULANGAN BENCANA

4. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan ditingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:
   a. melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnyauntuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing-masing;
   b. bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaanbagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.
5. Khusus untuk Pemerintah Daerah, maka perannya dalam pelaksanaan StrategiPenanggulangan Bencana adalah:
   a. memberikan laporan capaian penurunan indeks risiko bencana dan implementasi Indikator Kapasitas Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
   b. bersama dengan Pemerintah Pusat mengelola aktivitas fasilitator yang telah dipersiapkan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat.
6. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana
   a. Kegiatan penanggulangan bencana bersifat generik dan spesifik.
      - Kegiatan generik berati kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.
      - Kegiatan spesifik berarti kegiatan juga berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.
      - Seluruh kegiatan penanggulangan bencana bersifat generik.
      - Kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat generik sekaligus spesifik adalah:
        1) Peningkatan efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
        2) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan
        3) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
   b. Kegiatan Penanggulangan Bencana berdasarkan program dan sifat kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi:
      - Kegiatan Generik Program Pengurangan Bencana
        Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan sebelum terjadinya bencana dan berlaku untuk seluruh bencana.
      - Kegiatan Spesifik Program Penguranan Bencana

Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tiap-tiap jenis bencana sebelum terjadinya bencana tersebut.

- Kegiatan Generik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahapan setelah terjadinya bencana hingga selesainya masa pemulihan yang berlaku untuk seluruh bencana.
- Kegiatan Spesifik Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat bencana sekaligus pemulihannya setelah kejadian bencana.
- Khusus untuk untuk Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana berlaku untuk Program Pengurangan Rislko Bencana sekaligus Program Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

c. Kegiatan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.

d. Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA	
KEGIATAN GENERIK	KEGIATAN SPESIFIK
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
6. PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA		PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA	
GENERIK	SPESIFIK	GENERIK	SPESIFIK
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	1. PENANGANAN DARURAT BENCANA	1. PENANGANAN DARURAT BENCANA
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN	2. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN	2. PENGEMBANGAN SISTEM	2. PENGEMBANGAN SISTEM

TERPADU	PEMULIHAN BENCANA	PEMULIHAN BENCANA
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT, DAN LOGISTIK		
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA		
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA		
6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN		
DIDEIAILKATI DATAM RENCATIA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD-PRB)	DIDETAILKAN DALAM BENTUK NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN	DIDETAILKAN DALAM BENTUK PROSEDUR DAN MEKANISME OPERASI LAPANGAN

B. KETERLIBATAN INSTITUSI

1. Pola Pelaksanaan Aksi PB daerah dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.
2. Komponen Pemerintah Daerah yang tedibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:
   - BPBD; sebagai pelaksana mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BPBD memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BPBD juga melakukan pengkordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
   - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); merupakan unsur perencanaan pembangunan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan memiliki fungsi menyesuaikan perencanaan penanggulangan bencana ke dalam RPJMD; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan terkait kebencanaan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

- Dinas Sosial; merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik untuk korban bencana; melakukan dan atau membantu kegiatan penyaluran bantuan sosial yang berasal dari masyarakat dan pemerintah. Meliputi bidang swadaya dan perlindungan sosial serta bidang rehabilitasi sosial.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana.
- Dinas Kesehatan; merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan (obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis) serta mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
- Dinas Pekerjaan Umum; mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan.
- Dinas Pertanian; perkebunan dan kehutanan meliputi bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Perkebunan, dan Bidang Kehutanan yang memiliki tugas merencanakan dan mengendalikan upaya pencegahan kekeringan lahan dan menjaga serta memperbaiki irigasi pertanian jika terjadi bencana.
- Dinas Kelautan; merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.
- Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi; merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi/ komunikasi dan informasi.
- Dinas Ketahanan Pangan; mengendalikan kebutuhan pangan di saat tanggap darurat bencana.
- Badan Lingkungan Hidup (BLH); melakukan pengawasan dan pengembalian serta penataan hukum lingkungan dalam pencegahan bencana terkait konservasi alam dan lingkungan hidup.
- Satuan Polisi Pamong Praja; melaksanakan mitigasi non struktural berupa pengendalian dan penegakan peraturan daerah.
- Kodim; melaksanakan upaya pencegahan bencana, upaya pencarian, penyelamatan (SAR) pada saat tanggap darurat dan rekonstruksi pasca bencana.
- Kepolisian; melaksanakan upaya antisipasi, pencarian dan penyelamatan (SAR) saat tanggap darurat bencana.
- Basarnas; mendukung BPBD dalam mengkordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR).
- BPS; membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik terkait kebencanaan.

3. Komponen non pemerintah daerah, yaitu :
   - Forum PRB Daerah
   - Organisasi Kemasyarakatan Sipil
   - Lembaga Filantropi dan Lembaga Bisnis Daerah

- Perguruan Tinggi dan pakar
- Media
- Masyarakat

D. KERANGKA AKSI

1. Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN IV.
3. Penurunan Indeks Risiko Bencana diukur dengan menggunakan 71 Indikator Ketahanan Daerah.
4. lndikator Ketahanan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

KEGIATAN	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB;
	2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD;
	3. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB;
	4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan;
	5. Peraturan Daerah tentang RPB;
	6. Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB;
	7. BPBD;
	8. Forum PRB;
	9. Komitmen DPRD terhadap PRB;
2. PENILAIAN RESIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
	11. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
	12. Peta Kapasitas dan kajiannya;
	13. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat;
	15. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
	16. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha;
	17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis;
	18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional;
	19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB;
	20. Penyelenggaraan Latihan (geladi)

	Kesiapsiagaan;
	21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
	22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
	23. Penyimpanan/pergudang Logistik PB;
	24. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik;
	25. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat;
	26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat;
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27. Penataan ruang berbasis PRB;
	28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik;
	29. Sekolah & Madrasah Aman Bencana;
	30. Rumah Sakit & Puskemas Aman Bencana;
	31. Desa Tangguh Bencana;
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori;
	33. Perlindungan daerah tangkapan air;
	34. Restorasi sungai;
	35. Penguatan lereng;
	36. Penegakan hukum kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan;
	37. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan;
	38. Pemantauan berkala hulu sungai;
	39. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi;
	40. tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami;
	41. Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota;
	42. Restorasi lahan gambut;
	43. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor;
6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	44. Rencana Kontijensi Gempabumi;
	45. Rencana Kontijensi Tsunami;
	46. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami;
	47. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami;
	48. Rencana kontijensi banjir;
	49. Sistem peringatan dini bencana banjir;
	50. Rencana kontijensi tanah longsor;
	51. Sistem peringatan dini bencana tanah longsor;
	52. Rencana Kontijensi karlahut;
	53. Sistem peringatan dini bencana karlahut;
	54. Rencana kontijensi erupsi gunungapi.
	55. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi;
	56. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi;
	57. Rencana kontijensi kekeringan;
	58. Sistem peringatan dini bencana

	kekeringan;
	59. Rencana kontijensi banjir bandang;
	60. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang;
	61. Penentuan Status Tanggap Darurat;
	62. Penerapan sistem komando operasi darurat;
	63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana;
	64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban;
	65. Perbaikan Darurat;
	66. Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak;
	67. Penghentian status Tanggap Darurat;
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah;
	69. Pemulihan infrastruktur penting;
	70. Perbaikan rumah penduduk; dan
	71. Pemulihan Penghidupan masyarakat.

5. Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap Indikator Penilaian Kapasitas Daerah.
6. Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap Kegiatan Penanggulangan Bencana.
7. Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan:
   a. Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah
   b. Sinergitas RPJMN IV, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo
   c. Keterlibatan Institusi
   d. Penganggaaran

E. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD PRB)

1. Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PRB merupakan pendekatan dan Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan sebelum terjadi bencana.
2. Risalah RAD PRB dapat dilihat pada tabel berikut, untuk RAD PRB yang lebih rinci dapat dilihat pada LAMPIRAN.

Tabel 5.3 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI
ROGRAM PENGURANGAN RESIKO			
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA	1. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1. Tersusunnya aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan perda PB	Utama:BPBD Pendukung: Biro Hukum
		2. Terlaksananya Perda PB tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Biro Hukum
	2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD	3. Tersedianya peraturan BPBD	Utama: BPBD Pendukung: Biro

		untuk meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di Kabupaten Sidoarjo	Hukum
	3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	4. Tersedianya aturan dan mekanisme yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: Dunia Usaha, LSM, Akademisi
	4. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	5. Terciptanya optimalisasi mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan tingkat nasional secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: BIRO Hukum
	5. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	6. Tersusunnya Perda yang mengatur tentang regulasi Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lainterkait PB
	6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana	7. Tersusunnya Perda RTRW yang berbasis PRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda
	7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8. Terbangunnya kapasitas sumberdaya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) sesuai standar yang dibutuhkan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	8. Penguatan Forum PRB	9. Tersusunnya mekanisme organisasi (AD/ART, SOP) Forum PRB	Utama: BPBD Pendukungr Dunia Usaha, LSM, Akademisi
	9. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	10. Terbangunnya fungsi pengawasan DPRD dalam PRB	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB

PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	11. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Bahaya di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	11. Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	12. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kerentanan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	12. Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai denganaturan	13. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kapasitas di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	13. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	14. Tersusunnya dokumen RPB dalam upaya PB di Kabupaten Sidoarjo dengan pelibatan lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha maupun organisasi non pemerintah	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMATIKA, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	15. Tersedianya data sebagai informasi kebencanaan yang diperbarui secara priodik dari sumber informasi	Utama: BPBD Pendukung: BPS
	15. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	16. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri	Utama: BPBD Pendukung:Diskominfo
	16. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	17. Tersusunnya aturan dan sumberdaya yang mendukung mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya

		dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha	
		18. Terselenggaranya pemanfatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya
	17. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	19. Tersedianya sistem pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha yang dimanfaatkan masing-masing stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya
		20. Tersediannya peraturan, anggaran dan mekanisme pembuatan Pusdalops PB atau sistem komando tanggap darurat bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA
	18. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	21. Terselenggaranya sinkronisasi sistem pendataan nasional dengan sistem di daerah untuk membangun rencana skenario pencegahan dam kesiapsiagaan di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
	19. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan	22. Terselenggaranya simulasi geladi	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain

	PB	posko secara berkala yang dilakukan lintas SKPD	terkait PB
	20. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	23. Terselenggaranya sosialisasi secara bertahap dan berlanjut tentang geladi kesiapsiagaan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	21. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	24. Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistikberdasarkan Renkon dan Dokumen kajian kebencanaan untuk bencana prioritas	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
		25. Terselenggaranya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Sidoarjo dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	22. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	26. Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan hasil kajian di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
		27. Terselenggaranya Sinkronisasi pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dengan kebutuhan hasil kajian	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	23. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	28. Tersedianya sistem logistik yang akuntabilitas dan transparan	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB
	24. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	29. Terbangunnya efektivitas pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB

		disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi	
	25. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	30. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhankebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon	Utamar BPBD Pendukung: PU, Damkar, Kecamatan
	26. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	31. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan pangan daerah pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas tenaga kerja
		32. Tersusunnya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta)	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas tenaga kerja
PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	33. Tersusunnya Revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) memasukan muatan KRB	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA
	28. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	34. Terselenggaranya kegiatan sosialiasi informasi penataan ruang berbasis PRB kepada publik	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA
	29. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	35. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan

		(SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/manfaat /tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)	
		36. Terselenggaranya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan
		37. Terselenggaranya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan
	30. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	38. Tersusunnya perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) diseluruh RS daerah rawan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kesehatan
		39. Terlaksananya	Utama: BPBD

		perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) di seluruh RS daearah rawan bencana	Pendukung: Dinas Kesehatan
	31. Pembangunan Desa Tangguh Bencana	40. Terselenggaranya kegiatan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: Desa, 5AR, Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda
PENINGKATAN EVEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	41. Terlaksananya penerapan sumur resapan dan/atau biopori di Kabupaten Sidoarjo yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: DLH Pendukung: BPBD
	33. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	42. Terlaksananya perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Cipta Karya, Perhutani Pendukung: BPBD
	34. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	43. Terselenggaranya upaya restorasi sungai yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD
	35. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	44. Terselenggaranya upaya penguatan lereng yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Cipta Karya, PU Pengairan, Dinas Pertanian Pendukung: BPBD
	36. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan	45. Terlaksananya implementasi Perda	Utama: DLH Pendukung: BPBD

	Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan	oleh Pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar	
	37. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untukPengurangan Risiko Bencana Kekeringan	46. Terselenggaranya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD
	38. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	47. Tersusunnya kebijakan bangunan tahan gempabumi di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		48. Terlaksananya kebijakan bangunan tahan gempabumi dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		49. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan IMB	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	39. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	50. Tersusunnya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural (revitalisasi tanggul,embung, waduk dan taman kota)	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD
		51. Terciptanya mitigasi struktural (revitalisasi tanggul,embung, waduk dan taman kota)	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD
PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	40. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	52. Tersusunnya Renkon Gempabumi yang sinkron dengan RPKB	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		53. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencanakontinjensi dengan Prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana	Utama: BPBD Pendukung: BNPB

		penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi	
		54. Terlaksananya rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	41. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	55. Tersusunnya renkon banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		56. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		57. Terlaksananya rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	42. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	58. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		59. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini banjir secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		60. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	43. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah	61. Tersusunnya renkon tanah	Utama: BPBD Pendukung: BNPB

Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	longsor	
	62. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	63. Terselenggaranya pelaksanaan rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
44. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	64. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	65. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	66. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
45. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	67. Tersusunnya Renkon Kebakaran lahan dan hutan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	68. Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur	Utama: BPBD Pendukung: BNPB

		tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kebakaran lahan dan hutan	
		69. Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran dan hutan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	46. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	70. Mendorong adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		71. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dinikebakaran lahan dan hutan secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		72. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran lahan dan hutan secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	47. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	73. Tersusunnya renkon kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		74. Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: BNPB

		atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kekeringan	
		75. Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
	48. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	76. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		77. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB
		78. Terselenggarany a kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB

Keterangan Perangkat Daerah Terkait Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup.

F. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RAD PKB)

Sesuai dengan Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana, RAD PKB merupakan pendetailan dari Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah pada aksi-aksi yang dilaksanakan saat dan setelah terjadi bencana. Risalah RAD PKB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Karakteristik Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA			
	49. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana	79. Adanya mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa

		darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	
		80. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa
		81. Masyarakat dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penangananan darurat bencana selanjutnya atas dasar mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa
	50. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	82. Tersusunnya mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain terkait PB, TNI, Polri
		83. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat bencana	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain terkait PB, TNI, Polri

		di Kabupaten Sidoarjo	
		84. Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di Kabupaten Sidoarjo	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain terkait PB, TNI, Polri
	51. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	85. Ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		86. Ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		87. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
	52. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis	88. Tim penyelamatan dan pertolongan korban telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
	53. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	89. Tersusunnya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		90. Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB

		Daerah) dalam perkuatan prosedur perbaikkan darurat bencana	
		91. Adanya prosedur perbaikkan darurat bencana telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
	54. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	92. Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB
		93. Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB
		94. Relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB
	55. Penghentian Status Darurat Bencana	95. Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dari masa tanggap darurat	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB
7. PENGEMBANGA	56. Perencana	96. Adanya	Utama:8PBD

N SISTEM PEMULIHAN BENCANA	an Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	rancangan untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah	Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		97. Adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		98. Terakomodirn ya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
	57. Perencana an Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	99. Tersusunnya ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		100. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB

		kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	
		101. Disusunnya rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
	58. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	102. Adanya sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana? Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		103. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		104. Tersusunnya rancangan proses-proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB

		guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan	
	59. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	105. Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		106. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB
		107. Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB

BAB VI
PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BAB I MONITORING EVALUASI DAN PEMBARUAN RPB

Pemaduan, pengendalian, dan evaluasi bertujuan untuk menyelaraskan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan danprogram agar sesuai dengan rencana yang disusun. Pemaduan pelaksanaan program dilakukanuntuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pembaruan RPB dilakukan setiap kurun waktu 5 (lima) tahun, namun RPB dapat ditinjau ulang secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau bila terjadi bencana dengan skala besar yang membutuhkan pembaruan pada sasaran dan aksi daerah.

Pembaruan RPB dapat dilakukan sesuai dengan laporan capaian dan manfaat daripelaksanaan RPB. Laporan tersebut didapat melalui teknik Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi (PPE). Tujuan PPE itu sendiri adalah untuk dapat mengendalikan prosesimplementasi progran dan kegiatan pembangunan supaya sinkron dengan rencana-rencanayang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untukmenjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

A. PEMADUAN PARA PIHAK

Pemaduan serta pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurattentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. BerdasarkanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,yang dimaksud dengan "pemanduan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaandengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusunperencanaan berikutnya. Selain itu, terminologi pengawasan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam SPPN yang saling terkait dan konsisten antara perencanaan, penganggaran/pelaksanaan, dan pengawasan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepadaKepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengendalian pelakanaan rencana pembangunan;dan Kepala BAPPEDA untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaanrencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan masukan (input) dan keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya. Evaluasi pelaksanaan rencana sendiri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana pengendalian (monitoring), (3) pelakasnaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan manfaat dari program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana tahunan dilakukan terhadap implementasi RPB 2020-2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan (berkala, berjenjang, publik) Sementara menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyusunan laporan penyelenggaraan PB dllakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

B. PEMADUAN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo, pemaduan dengan rencana/kebijakan lainnya juga dilakukan untuk mendukung keefektifannya. Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada RPJMN IV, lakstranas PB, RPJMD Provinsi lawa Timur dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan mempermudah kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Penyelarasan program perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (a) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

C. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RPB 2020-2022 didasarkan pada regulasi utama undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasionat (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara lebih teknis, pelaksanaan PPE RPB 2020-2022 mengacu pada peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24./PMK.O2/2O11 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), serta beberapa aturan teknis lainnya. Oleh karena itu, penyusunan kerangka pengarusutamaan RPB dilakukan atas dasar peran dan keterlibatan kelompok pemangku kepertingan yang terlibat dalam pelaksanaan RPB. Kelompok pemangku kepentingan secara umum terdiri dari pemerintah dan legislatif, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyakarat dan media.

RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.

1. Pelaksanaan PPE

1. Pelaksanaan PPE dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Seluruh hasil PPE RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak di bawah koordinasi BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan PPE RPB.
2. Gugus Tugas Pelaksanaan RPB dapat sekaligus berfungsi sebagai Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dan menjadi Sekretariat RPB, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

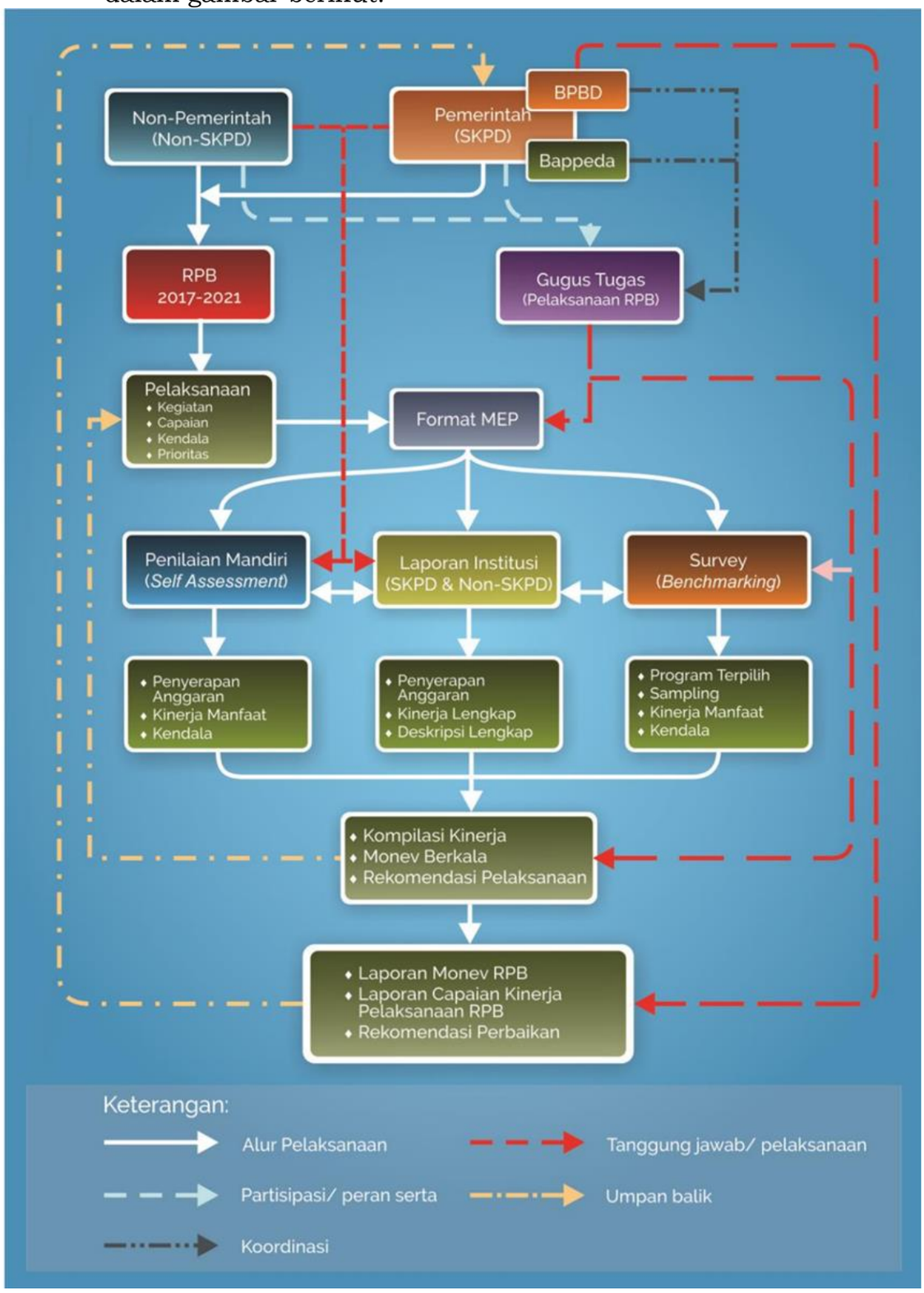
2. Mekanisme PPE

8. Pendekatan dalam Pelaksanaan PPE RPB dilakukan melalui:
   i. Penilaian mandiri (self assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
   ii. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assessment); dilakukan sebagai masukan PPE secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
   iii. Penilaian implementasi lapangan (field assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

   Seluruh pendekatan pelaksanaan PPE RPB tersebut dilkoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas diatas.
9. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala. minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap dua tahun berdasarkann hasil kompilasi PPE yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil PPE yang dilakukan oleh gugus tugas.
10. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB. Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya (input) yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (output) dan hasil (outome) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya.
11. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala mrnrmal setiap tahun. Laporan tni akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksaanaan PPE disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara

menyeluruh disusun setjap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil PPE berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan Bappeda dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

12. Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan PPE PB disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 0.1 Mekanisme Pemanduan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

BAB VII
PENUTUP

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun untuk rentang perencanaan 2020-2022 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk itu.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Sidoarjo membutuhkan komitmen kuat baik secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Sidoarjo dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN 1: TEKNIS PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SUB URUSAN BENCANA

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA				
Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	Sasaran: Tersedianya data atau informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah dann legal Indikator: Presentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah atau legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB.	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah atau legal	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta sound system b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta sound system b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
		informasi publik	b. Survei lokasi c. Penyediaan lokasi penempatan rambu evakuasi dan papan informasi publik d. Pengadaan rambu evakuasi dan informasi publik e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan h. Akomodasi pemasangan	yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA				
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta sound system b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar,	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
	Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.		computer set) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli Laporan	bencana
Penyusunan Rencana Kontijensi	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan ATK, penggandaan, data dan laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta sound system b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penggandaan materi/ATK/	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
	tahun.		dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	
Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator: Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.s	Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta sound system b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Transport peserta g. Jumlah peserta h. Honor	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
			narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	
		Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta sound system b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Transport peserta g. Jumlah peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
Gladi kesiapsiagaan terhadap	Sasaran: Terlatihnya Warga Negara dalam rangka	Simulasi dalam ruang (table top exercise)	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta sound system	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.		b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set, alat komunikasi, manual TIX dan evaluasi) c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor pengarah / kelompok pengendali h. Jumlah pengarah / kelompok pengendali i. Laporan	yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Gladi lapang	a. Penyediaan tempat dan meja kursi serta sound system b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, computer set, alat komunikasi, manual gladi dan evaluasi)	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
			c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi d. Penyediaan transportasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber / fasilitator / komandan gladi i. Jumlah narasumber / fasilitator / komandan gladi j. Honor observer k. Jumlah observer l. Laporan	
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Indikator:	Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Percetakan / penggandaan / ATK / dokumentasi b. Akomodasi dan Konsumsi c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Jumlah narasumber f. Honor narasumber	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.		g. Laporan	
		Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana	a. Penyiapan gedung b. Penyiapan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) c. Peralatan pendukung d. Operasional pusdalops e. Honor narasumber	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast	a. Penyiapan alat komunikasi / handphone b. Operasional	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Penyediaan obat-obatan dan vaksin	a. Penyediaan obat dan vaksin b. Pemeliharaan c. Sosialisasi dan pendistribusian	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Tatalaksana/ pengobatan dan vaksinasi	a. Operasional b. Perjalanan c. Belanja bahan dan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung:

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
			alat pendukung d. Pelatihan SDM aparat / petugas pelaksana	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Penyediaan peralatan kesehatan	a. Penyediaan peralatan keadaan darurat b. Penyediaan alat pelindung diri petugas c. Pelatihan penggunaan alat	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Penyediaaan peralatan laboratorium	a. Pengambilan, pengepakan, pengiriman spesimen b. Pemeriksaan spesimen	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Penyediaan layanan biosekuriti	a. Penyediaan alat dan bahan pengendalian faktor risiko (sprayer, kaporit, disinfektan) b. Pelatihan aparat / petugas pelaksana	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
				hewan
		Penyediaan sarana dan prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan sistem peringatan dini b. Penyediaan sirene, radio HT, dan repeater c. Survei lokasi d. Penyediaan sistem peringatan dini untuk jenis ancaman bencana meliputi: banjir dan tanah longsor e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan/ pembangunan h. Akomodasi pemasangan	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap	Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana Indikator: Persentase (%) jumlah	Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana	a. Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana b. Jumlah Warga	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
bencana	Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun.		Negara yang berada di kawasan rawan bencana	bencana
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA				
Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%) Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/ wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium	a. Kuesioner b. Alat perekam c. Alat dokumentasi (foto/video) d. Alat dan bahan pengambilan spesimen e. Pengujian laboratorium f. Personel g. Operasional h. Transportasi dan BBM i. Laporan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
		Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas)	a. Data / informasi dan dokumen investigasi b. Koordinasi dan komunikasi c. Dokementasi	Utama: Kepala daerah kabupaten / kota

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
		Tindakan cepat penanganan epidemi/ wabah penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/ isolasi/pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko)	a. Rapid test b. Bahan pendukung (alat pelindung diri minimum: masker dan sarung tangan) c. Obat/vaksin sesuai penyakit d. Alat transportasi dan BBM e. Jumlah personil f. Operasional g. Laporan	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan
Respon cepat darurat bencana	Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%) Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	a. ATK/penggandaan b. Papan informasi c. Komunikasi d. Transportasi e. Jumlah personil f. Honor personil g. Laporan h. Data dan informasi dokumen kaji cepat i. Komunikasi dan koordinasi j. dokumentasi	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana Indikator: Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	a. Posko utama (TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Sat Linmas, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, PMI, NGO, media massa, dan lain-lain) b. Posko lapangan (petugas yang terlibat dalam melaksanakan penanganan darurat bencana dan keterlibatan masyarakat c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Perlengkapan posko	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Sasaran: Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan	Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Jumlah operasional tim rescue (TNI, POLRI, BPBD, Dinas PU, BASARNAS, Dinas Kesehatan, Sat Linmas, Satpol PP, PMI) b. Honor petugas	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Penyediaan sarana dan	a. Penyediaan	Utama: BPBD

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
	dievakuasi teradap kejadian bencana Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	peralatan rescue b. Penyediaan transportasi c. Penyediaan alat komunikasi d. Penyediaan peralatan pendukung (tenda, tangki air, BBM, genset) e. Penyediaan alat berat (excavator, bulldozer) f. Penyediaan ambulance g. Penyediaan sepeda motor trail	Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana
		Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Pendirian tenda pengungsi b. Penggunaan alat komunikasi c. Penggunaan alat transportasi d. Penggunaan peralatan medis (antara lain: obat-obatan, oksigen, kantong mayat) e. Penggunaan peralatan rescue	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

SUB KEGIATAN	SASARAN ATAU INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	PENANGGUNG JAWAB
			f. Penggunaan peralatan pendukung g. Jumlah petugas h. Honor petugas	
		Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana	a. Pengumpulan data dan dokumentasi b. Penyusunan laporan c. ATK dan penggandaan d. Publikasi	Utama: BPBD Pendukung: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana

LAMPIRAN 2: PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
PRA-BENCANA		
MITIGASI PASIF		
Penyusunan peraturan perundang-undangan.	Penguatan PERDA Kabupaten Sidoarjo	Terdapat PERDA Kabupaten Sidoarjo tentang Penanganan Bencana yang lebih update
	Penyusun PERDA Kabupaten tentang pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD dengan diterbitkannya PERDA Kabupaten tentang dana mitigasi, dana kontinjensi, penyaluran bantuan, bantuan bencana.	
Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.	Pembuatan peta rawan bencana	Seluruh wilayah Sidoarjo dipetakan berdasarkan tingkat keterancaman setiap bencana
Pembuatan pedoman/ standart/ prosedur	Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi serta prosedur evakuasi jika terjadi bencana	Pembuatan modul pengetahuan siaga bencana
Penambahan wawasan masyarakat tentang siaga bencana	Pengadaan sarana pra-sarana peringatan dini (sirine, kentongan, dll)	Pembuatan modul pengetahuan siaga bencana
	Pembuatan brosur/leaflet/poster mengenai cepat tanggap bencana	
Penelitian / pengkajian karakteristik bencana.	Penelitian / pengkajian karakteristik bencana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.	Publikasi laporan yang dapat diakses untuk seluruh penduduk Kabupaten Sidoarjo
Pengkajian / analisis risiko bencana.	Penelitian / pengkajian karakteristik bencana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.	

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan.	Pengadaan mata pelajaran penanggulangan bencana	Seluruh sekolah dasar sampai menengah atau sederajat.
Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana.	Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana	Setiap desa atau kelurahan atau lingkup lebih kecil di Kabupaten Sidoarjo
Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum.	Konsolidasi & komunikasi antara LPPM, SRIKANDI TANGGUH, SENKOM POL, TAGANA, PMI, PRAMUKA, BANSER, RAPI, SATPOL PP. LINMAS, SATLAKAR dan BALAKAR	Setiap kecamatan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan.	Perencanaan pembangunan sarana pra-sarana vital yang dapat meminimalisir ancaman bencana	Wilayah rawan bencana berdasar pada hasil kajian
MITIGASI AKTIF		
BANJIR	Pemasangan alarm tingkat ketinggian air.	Pintu buka-tutup air di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
	Penambahan ketnggian tanggul.	Tanggul- tanggul daerah rawan banjir.
	Pembersihan serta perluasan penampang saluran (sungai) pembuangan air hujan ke laut.	Sungai- sungai di daerah sidoarjo, terutama daerah yang sudah rawan banjir.
	Pemeliharaan daerah resapan.	Daerah resapan di daerah sidoarjo, terutama daerah yang sudah rawan banjir.
	Perbaikan jembatan- jembatan dengan menggunakan ‘box culvert’.	jembatan- jembatan di daerah rawan banjir.
	Penyuluhan serta pelatihan siap- siaga banjir, serta pengurangan resiko bencana	Masyarakat sekitar daerah rawan bencana banjir.

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
	banjir.	
BANJIR BANDANG	Pemasangan alarm tingkat ketinggian air.	Pintu buka-tutup air di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
	Penambahan ketinggian tanggul.	Tanggul- tanggul daerah rawan banjir.
	Pembersihan serta perluasan penampang saluran (sungai) pembuangan air hujan ke laut.	Sungai- sungai di daerah sidoarjo, terutama daerah yang sudah rawan banjir.
	Pemeliharaan daerah resapan.	Daerah resapan di daerah sidoarjo, terutama daerah yang sudah rawan banjir.
	Perbaikan jembatan- jembatan dengan menggunakan 'box culvert'.	jembatan- jembatan di daerah rawan banjir.
	Penyuluhan serta pelatihan siap- siaga banjir, serta pengurangan resiko bencana banjir.	Masyarakat sekitar daerah rawan bencana banjir.
CUACA EKSTRIM	Penambahan kekuatan bangunan.	Seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besa	Daerah pantai Kabupaten Sidoarjo yang diletakkan di poros tanpa adanya kawasan lindung.
	Penyuluhan serta pelatihan siap- siaga gelombang ekstrim dan abrasi, serta pengurangan resiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi.	Masyarakat sekitar daerah rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
GEMPA BUMI	Penambahan kekuatan bangunan.	Seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang berpotensi mengalami

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
		kerusakan parah.
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Membuat infrastruktur sistem pemadaman (sistem isolasi, sistem pendinginan, dan sistem urai).	Seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang yang berpotensi mengalami kebakaran berdasarkan analisis hotspot.
KEKERINGAN	Penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan pada daerah-daerah rawan kekeringan	Seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang yang berpotensi mengalami kekeringan
	Memberikan reward dan hukuman bagi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan hutan.	Seluruh warga Kabupaten Sidoarjo
PASCA-BENCANA		
REHABILITASI PASCA BENCANA		
BANJIR	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana banjir
	Pelayanan kesehatan dan penyakit yang ditimbulkan .	Wilayah terdampak bencana banjir
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana banjir
BANJIR BANDANG	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pemberian bantuan perbaikan rumah	Wilayah terdampak bencana banjir

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
	masyarakat.	bandang
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana banjir bandang
	Pelayanan kesehatan dan penyakit yang ditimbulkan .	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
CUACA EKSTRIM	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana banjir bandang
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana banjir bandang
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
GEMPA BUMI	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
	Perbaikan prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana gempa bumi
	Pemulihan kondisi psikologis warga.	Warga terdampak bencana gempa bumi
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Perbaikan lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
	Perbaikan kualitas hutan dan lahan	Wilayah terdampak bencana kebakaran
	Pemulihan keamanan dan ketertiban.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
KEKERINGAN	Pembangunan jalur perpipaan air dan sumur resapan yang dapat disalurkan.	Wilayah terdampak bencana kekeringan
	Pemulihan kondisi psikologis warga	Warga terdampak bencana kekeringan
	Pemulihan kemanan dan ketertiban	Wilayah terdampak bencana kekeringan
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA		
BANJIR	Pembangunan kembali prasarana dan sarana.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
	Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Wilayah terdampak bencana banjir
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.	Warga terdampak bencana banjir
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Peningkatan fungsi pelayanan publik.	Wilayah terdampak bencana banjir
	Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir
BANJIR BANDANG	Pembangunan kembali prasarana dan sarana.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.	Warga terdampak bencana banjir bandang
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Peningkatan fungsi pelayanan publik.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
CUACA EKSTRIM	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana banjir bandang
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat..	Warga terdampak bencana banjir bandang
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Warga terdampak bencana banjir bandang
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
	Pembangunan kembali rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana gelombang ekstrim
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat..	Warga terdampak bencana gelombang ekstrim
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Wilayah terdampak bencana gelombang ekstrim
GEMPA BUMI	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana gempa bumi
	Pembangunan kembali rumah masyarakat.	Warga terdampak bencana gempa bumi
	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat..	Warga terdampak bencana gempa bumi
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan	Wilayah terdampak bencana gempa

PROGRAM ATAU KATEGORI BENCANA	TINDAKAN	SASARAN
	budaya.	bumi
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
	Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
	Pembangunan kembali rumah masyarakat.	Wilayah terdampak bencana kebakaran
KEKERINGAN	Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat..	Wilayah terdampak bencana kekeringan
	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.	Warga terdampak bencana kekeringan
	Pembangunan kembali lingkungan daerah bencana.	Wilayah terdampak bencana kekeringan

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN PELAKSANAAN					PENDANAAN		
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	K
PROGRAM PENGURANGAN RESIKO											
8. PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA	60. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	108. Tersusunnya aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan perda PB	Utama:BPBD Pendukung: Biro Hukum		*	*					☆ ☆
		109. Terlaksananya Perda PB tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Utama: BPBD Pendukung; Biro Hukum		*	*					☆ ☆
	61. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD	110. Tersedianya peraturan BPBD untuk meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung; Biro Hukum		*	*					☆ ☆
	62. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	111. Tersedianya aturan dan mekanisme yang berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: Dunia Usaha, LSM, Akademisi		*	*					☆ ☆
	63. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	112. Terciptanya optimalisasi mekanisme dan	Utama: BPBD Pendukung: BIRO Hukum		*	*					☆ ☆

		prosedur penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan tingkat nasional secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat						
64. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	113. Tersusunnya Perda yang mengatur tentang regulasi Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*			☆ ☆
65. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana	114. Tersusunnya Perda RTRW yang berbasis PRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda	*	*				☆ ☆
66. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115. Terbangunnya kapasitas sumberdaya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) sesuai standar yang dibutuhkan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB		*	*			☆ ☆

	67. Penguatan Forum PRB	116. Tersusunnya mekanisme organisasi (AD/ART, SOP) Forum PRB	Utama: BPBD Pendukungr Dunia Usaha, LSM, Akademisi	*	*			☆ ☆
	68. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	117. Terbangunnya fungsi pengawasan DPRD dalam PRB	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*			☆ ☆
9. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	69. Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	118. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Bahaya di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB			*		☆ ☆
	70. Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan	119. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kerentanan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB			*		☆ ☆
	71. Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai denganaturan	120. Terselenggaranya pemutakhiran Kajian Kapasitas di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan update data terbaru	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB			*		☆ ☆
	72. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	121. Tersusunnya dokumen RPB dalam upaya PB di	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*		☆ ☆

		Kabupaten Sidoarjo dengan pelibatan lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha maupun organisasi non pemerintah				
10. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMATIKA, DIKLAT DAN LOGISTIK	73. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	122. Tersedianya data sebagai informasi kebencanaan yang diperbarui secara priodik dari sumber informasi	Utama: BPBD Pendukung: BPS	*	*	☆ ☆
	74. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	123. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri	Utama: BPBD Pendukung:Diskominfo		*	☆ ☆
	75. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	124. Tersusunnya aturan dan sumberdaya yang mendukung mekanisme komunikasi bencana	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya	*	*	☆ ☆

		lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha			
		125. Terselenggaranya pemanfatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya	* *	☆ ☆
	76. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	126. Tersedianya sistem pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA Diskominfo, dinas-dinas lainnya	* *	☆ ☆

		pemerintah masyarakat maupun dunia usaha yang dimanfaatkan masing-masing stakeholder				
		127. Tersediannya peraturan, anggaran dan mekanisme pembuatan Pusdalops PB atau sistem komando tanggap darurat bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA	*	*	☆ ☆
	77. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	128. Terselenggaranya sinkronisasi sistem pendataan nasional dengan sistem di daerah untuk membangun rencana skenario pencegahan dam kesiapsiagaan di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan	*	*	☆ ☆
	78. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	129. Terselenggaranya simulasi geladi posko secara berkala	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	☆ ☆

		yang dilakukan lintas SKPD								
	79. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	130. Terselenggaranya sosialisasi secara bertahap dan berlanjut tentang geladi kesiapsiagaan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB				*			☆ ☆
	80. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	131. Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistikberdasarkan Renkon dan Dokumen kajian kebencanaan untuk bencana prioritas	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*		☆☆☆ ☆		☆
		132. Terselenggaranya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Sidoarjo dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*		☆☆☆ ☆		☆
	81. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	133. Tersedianya kebutuhan peralatan dan logistik	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*		☆☆☆ ☆		☆

		berdasarkan hasil kajian di Kabupaten Sidoarjo								
		134. Terselenggaranya Sinkronisasi pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dengan kebutuhan hasil kajian	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*	☆☆☆ ☆	☆		
	82. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	135. Tersedianya sistem logistik yang akuntabilitas dan transparan	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB		*	*	☆☆☆ ☆	☆	☆	
	83. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	136. Terbangunnya efektivitas pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi	Utama: BPBD Pendukung: SKPD lain terkait PB	*	*	*			☆ ☆	

	84. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	137. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhankebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon	Utamar BPBD Pendukung: PU, Damkar, Kecamatan		*	*		☆ ☆
	85. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	138. Tersusunnya strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan pangan daerah pada masa tanggap darurat berdasarkan skenario bencana terparah berdasarkan dokumen Renkon	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas tenaga kerja		*	*	*	☆ ☆
		139. Tersusunnya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas tenaga kerja		*	*	*	☆ ☆

		(pemerintah-masyarakat-sektor swasta)					
11. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	86. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	140. Tersusunnya Revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) memasukan muatan KRB	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA	*	☆☆	☆☆	☆
	87. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	141. Terselenggaranya kegiatan sosialiasi informasi penataan ruang berbasis PRB kepada publik	Utama: BPBD Pendukung: BAPPEDA				☆ ☆
	88. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	142. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/manfaat /tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan	*			☆ ☆
		143. Terselenggarany	Utama: BPBD	*			☆

		a kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana	Pendukung: Dinas Pendidikan			☆
		144. Terselenggarany a kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan	*		☆ ☆
	89. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan	145. Tersusunnya perencanaan	Utama: BPBD Pendukung: Dinas	*	*	☆ ☆

	Puskesmas Aman Bencana		kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) diseluruh RS daerah rawan bencana	Kesehatan			
			146. Terlaksananya perencanaan kegiatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB) di seluruh RS daearah rawan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Kesehatan	*	*	☆ ☆
	90. Pembangunan	Desa	147. Terselenggarany	Utama: BPBD		*	☆

	Tangguh Bencana	a kegiatan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat	Pendukung: Desa, 5AR, Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda				☆
12. PENINGKATAN EVEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	91. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	148. Terlaksananya penerapan sumur resapan dan/atau biopori di Kabupaten Sidoarjo yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: DLH Pendukung: BPBD	*	☆☆	☆☆	☆
	92. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	149. Terlaksananya perlindungan daerah tangkapan air yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Cipta Karya, Perhutani Pendukung: BPBD	*	☆☆☆	☆☆	
	93. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	150. Terselenggaranya upaya restorasi sungai yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD	*	☆☆☆	☆	☆

	94. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	151. Terselenggaranya upaya penguatan lereng yang menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: PU Cipta Karya, PU Pengairan, Dinas Pertanian Pendukung: BPBD	*	*	☆☆	☆☆
	95. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan	152. Terlaksananya implementasi Perda oleh Pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar	Utama: DLH Pendukung: BPBD	*			☆ ☆
	96. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untukPengurangan Risiko Bencana Kekeringan	153. Terselenggaranya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD	*	*	☆☆☆	☆
	97. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	154. Tersusunnya kebijakan bangunan tahan gempabumi di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	☆☆	☆☆
		155. Terlaksananya kebijakan bangunan tahan gempabumi dalam perijinan mendirikan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	☆☆	☆☆

		bangunan (IMB) di Kabupaten Sidoarjo						
		156. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan IMB	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	☆☆	☆☆	☆
	98. Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	157. Tersusunnya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural (revitalisasi tanggul,embung, waduk dan taman kota)	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD	*	*	☆☆☆	☆	☆
		158. Terciptanya mitigasi struktural (revitalisasi tanggul,embung, waduk dan taman kota)	Utama: PU Pengairan Pendukung: BPBD			☆☆☆	☆	☆
13. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	99. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	159. Tersusunnya Renkon Gempabumi yang sinkron dengan RPKB	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*		☆ ☆
		160. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencanakontinjensi dengan Prosedur tetap penanganan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*		☆ ☆

		darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi							
		161. Terlaksananya rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆☆☆ ☆	☆	
	100. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	162. Tersusunnya renkon banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆☆☆ ☆	☆	
		163. Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆☆☆ ☆	☆	
		164. Terlaksananya rencana kontinjensi pada masa krisis	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆☆☆ ☆	☆	

		dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir					
	101. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	165. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	* * *	☆☆☆ ☆	☆	
		166. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini banjir secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	* * *	☆☆☆ ☆	☆	
		167. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	* * *	☆☆☆ ☆	☆	
	102. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	168. Tersusunnya renkon tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	* * *			☆ ☆
		169. Terselenggaranya	Utama: BPBD	* * *			☆

	a sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor	Pendukung: BNPB				☆
	170. Terselenggaranya pelaksanaan rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆ ☆
103. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	171. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆ ☆
	172. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini tsunami secara	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆ ☆

		berkala oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo					
		173. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆ ☆
	104. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	174. Tersusunnya Renkon Kebakaran lahan dan hutan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆ ☆
		175. Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kebakaran lahan dan hutan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆ ☆

		176. Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran dan hutan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*
	105. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	177. Mendorong adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*
		178. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dinikebakaran lahan dan hutan secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*
		179. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*

		kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran lahan dan hutan secara rutin dan berlanjut					
106. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	180. Tersusunnya renkon kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆ ☆	
	181. Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆ ☆	
	182. Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*	☆ ☆	

	107. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	183. Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*		☆ ☆
		184. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*		☆ ☆
		185. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan secara rutin dan berlanjut	Utama: BPBD Pendukung: BNPB	*	*	*		☆ ☆
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA								
	108. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana	186. Adanya mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa				*	☆ ☆

	penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo			
	187. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di Kabupaten Sidoarjo	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa	*	☆ ☆
	188. Masyarakat dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penangananan darurat bencana selanjutnya atas dasar mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut	Utama: BPBD Pendukung: kecamatan, desa	*	☆ ☆
109. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	189. Tersusunnya mekanisme prosedur yang mengatur	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain terkait PB, TNI, Polri	*	☆ ☆

	tentang struktur komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo			
	190. Adanya aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang sistem komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain terkait PB, TNI, Polri	*	☆ ☆
	191. Sistem komando tanggap darurat diterapkan oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat di Kabupaten Sidoarjo	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain terkait PB, TNI, Polri	*	☆ ☆
110. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	192. Ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	☆ ☆
	193. Ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	☆ ☆

		cepat pada masa krisis					
		194. Adanya relawan dan personil terlatih telah melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB		*		☆ ☆
	111. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis	195. Tim penyelamatan dan pertolongan korban telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	☆☆☆ ☆	☆
	112. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	196. Tersusunnya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	☆☆☆ ☆	☆
		197. Adanya aturan daerah (Surat Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah) dalam perkuatan prosedur perbaikkan	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	☆☆☆ ☆	☆

		darurat bencana					
		198. Adanya prosedur perbaikkan darurat bencana telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat bencana	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	* *			☆ ☆
	113. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana	199. Adanya relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjauh pada masa krisis dan tanggap darurat bencana	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB	* *	☆☆	☆☆	☆
		200. Adanya mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB	* *	☆☆☆	☆☆	
		201. Relawan dan	Utama: BPBD, Dinas	* *	☆☆☆	☆☆	

		personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur	Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB				
114. Penghentian Status Darurat Bencana		202. Masyarakat memahami penentuan status tanggap darurat sebagai akhir dari masa tanggap darurat	Utama: BPBD, Dinas Sosial Pendukung: SKPD/ instansi lain terkait PB		*	*	☆ ☆
115. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana		203. Adanya rancangan untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*	☆ ☆
		204. adanya kesepakatan secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*	☆ ☆

		daerah terhadap mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang telah disusun					
	205. Terakomodirnya seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dalam rancangan pemulihan	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*	☆ ☆
116. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	206. Tersusunnya ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB		*	*	☆ ☆
	207. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB		*	*	☆ ☆

		infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban					
	208. Disusunnya rancangan proses - proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana dengan dasar mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*			☆ ☆
117. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	209. Adanya system atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Baik atas dukungan	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*		☆ ☆

		pemerintah maupun swadaya atau pihak lain					
	210. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*	☆ ☆	
	211. Tersusunnya rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan	Utama:PU, 8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*	☆ ☆	

	118. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	212. Adanya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*	☆ ☆
		213. Adanya mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*	☆ ☆
		214. Adanya rancangan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan	Utama:8PBD Pendukung: SKPD lain Instansi lain terkait PB	*	*	*	☆ ☆

		prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat

LAMPIRAN 3: RENCANA AKSI DAERAH

(*)Keterangan:
Untuk kolom kontribusi anggaran, hasil besaran pembagian berdasarkan hasil sinkronisasi RPJMN IV, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

No	RPJMN IV	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMD Kabupaten Sidoarjo	Pendanaan		
				Nasional	Provinsi	Kabupaten
1.	✓	✓	✓	☆☆☆	☆☆	☆
2.	✓		✓	☆☆☆	☆	☆☆
3.		✓	✓		☆☆☆	☆☆☆
4.	✓			☆☆☆☆	☆	☆
5.		✓			☆☆☆☆	☆☆
6.			✓			☆☆☆ ☆☆☆

Tabel diatas menjelaskan pengelompokkan aksi dan indikator dengan penjabaran tanda ☆ (maksimal 6) pada kolom pendanaan dengan ketentuan seperti:

- Poin 1 bila ada RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten ada maka pendanaan dominan dilakukan dari anggaran RPJMN.
- Poin 2 bila ada RPJMN, dan RPJMD Kabupaten namun tidak ada di provinsi maka anggaran lebih kepada RPJMN

- Poin 3 bila tidak ada RPJMN namun RPJMD Provinsi adan RPJMD Kabupaten ada maka anggaran berimbang antara Provinsi dan Kabupaten.
- Poin 4 bila hanya ada di RPJMN tidak ada di RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten maka dominan anggaran di nasional.
- Poin 5 bila hanya ada di RPJMD Provinsi tidak ada RPJMN dan RPJMD Kabupaten maka dominan anggaran di provinsi.
- Poin 6 bila hanya ada kegiatan tersebut di RPJMD Kabupaten tidak ada di RPJMN dan RPJMD Provinsi maka 100% menggunakan anggaran APBD.

LAMPIRAN 4. HASIL SINKRONISASI INDIKATOR KETAHANAN DAERAH

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Perahrran daerah tentang penanggulangan bercanir	2	Belum digunakannya Perda PB sebagai acuan daiam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	4	Belum tersedianya aturan dan mekanisme yang meningkatkan fu ngsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah
			Eelum tersedianya aturan dan mekanisma dalam upaya meningkatkan kapabilitas (dana, sarana, prasarana, dan personel) dalam penyelenggaraan PB di daerah
	3. Peraturan tentang pembentr.rkan Forum PRB	4	Belum tersedianya afuran dan mekanisme yano berfungsi untuk memp€rcepat upaya PRB di Kabupaten Sidoarjo
	4. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	4	belum ada optimalisasi mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan yanq terinteqrasi dengan sistem inforrnasi kebencanaan tingkat nasional secara berkala dan dapat diakes oleh masyarakat
	5. Perahrran Daerah tentang RPB	1	belum tersusunnya Dokumen RPB
			Belum tersedianya Perda yang mengatur tentang regulasi Dokumen RPB
			Belum brsedianya dokrrmen RPB yang mampu meningkatkan alokasi anggaran Penyelenggaraan PB di Kabupaten Sidoarjo

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
	6. Peraturan Daerah lentang Tataruang Berbasis PRB	2	Proses penggunaan RTRW belum mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB
	7, BPBD	3	Dukungan terhadap sumberdaya BpBD (dana, sarana, prasarana, personil) belum terpenuhi sesuai standar yanq dibutuhkan
	8. Fo.um PRB	4	Forum PRB belum memiliki mekanisme organisasi (AD/ART, SOP) sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan nenjalankan fungis FPRB
	9. Komitmen DPRD terhadap PRB	3	DPRD belum menjalankan fungsi pengawasan dalam PRB
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	3	Peta bahaya yang dimiliki belum digunakan unfuk menyusun KRB
	11. Peta kerentanan dan kajiannya untuk s€luruh bahaya yang ada di daerah	3	Dokumen Kajian dan Peta kerentanan dari setiap ancaman bercana belum menghasilkan rekornendasi kebijakan PB di Kabupaten Sidoarjo.
	12. Peta kapasitas dan kajiannya	3	Dokumen dan peta kapasitas belum dianalisis dan belum menghasilkan rekomendasi kebijakan PB
	13. Rencana Penanggulangan Eencana Daerah (RPBD)	1	Proses penyusunan Dokumen RPB belum mehbatkan dan mengakomodir lintas SKPD. aspirasi masyarakat/ akademisi, dunia 6aha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya PB di Kabupaten Sidoarjo.
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,	14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau	3	lrformasi kebencanaan yang telah diolah belum dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
DIKLAT DAN LOGISTIK			dan belum disampaikan kepada multi stakeholder
	15. Soialisasi pencegahan kesiapsiagaan bencana pada tiap tiap kecamatan	1	Belum ada kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
			Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana belum dilakukan secara rutin dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan Yang ada dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman di Kabupaten Sidoarjo.
			Masyarakat belum berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri
	16. Komunikasi bencana lintas lembaqa minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha	3	Belum ada pemanfaatan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah masyarakat maupun dunia usaha yang dimanfaatkan masing-masing stakeholder
	17. Pusdalops PB dengan faslitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan	4	Belum efektifnya fungsi Pusdalops dalam penanganan masa krisis di Kabupaten Sidoarjo.
	18. Sistem pendataan bencana yang terhubung	3	Belum terintergrasinya sistem pendataan nasional

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
	dengan sistem pendataan		dengan system di daerah untuk membangun rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Sidoarjo
	19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	1	Belum dilakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala di Kabupaten Sidoarjo
			Belum adanya uji coba hasil pelatihan dan seftifikasi penggunaan peralatan PB (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)
			Personil belum dapat merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKTD
	20. Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan	1	Belum ada penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan di Kabupaten Sidoarjo
			Perryelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut belum dilakukan secara bertahap dan berlanlut (mulai dari pelatihan, simulasi, hingga uji sistem)
			Masyarakat dan pemangku kepentingan belum sadar pentingnya dan belum merasa aman dengan adanya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut
	21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1	Belum dilakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencaman di Kabupaten Sidoarjo
			Kajian kebutuhan peralatan dan togistik belum dilakukan berdasarkan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			Renkon atau Dokumen kajian lainnya (risiko tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruki) untuk bencana prioritas
			Hasil kajlan kebutuhan peralatan dan logistik tersebut belum diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah di Kabupaten Sidoarjo
	22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1	Belum ada lembaqa di pemerintahan yang menangani (mengusulkan dan atau melaksanakan) peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana
			Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan belum dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan, sebagaimana dijelaskan pada indikator 21
			Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah belum sesuai dengan kebutuhan hasil kajian
	23. Penyimpanan/pergudang loglstik PB	1	Belum ada tempat penyimpanan/ pergudangan logistik
			Tempat perryimpanan/pergudangan logistik tersebut belum berada dibawah lembaga teknis tertentu dl pemerintahan untuk penanganan darurat bencana

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			Penyimpanan/pergudangan logistik PB yang ada belum mampu dijamin secara akuntabilitas dan tranparansi pengelolaanya
	24. Pemeliharaan peralatan dan supply chain listrik yang diselenqqarakan secara periodik	1	Belum ada lembaga dipemerintahan yanq menangani pemeliharaan peralatan dan supp)y chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
			Lembaga tersebut belum memiliki kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menarEani pemeliharaan peratatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
			Belum efektifnya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chaih pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi
	25. Tersedianya energi listrik unfuk kebutuhan darurat	1	Belum ada lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana
			Lembaga tersebut belum memilikj mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
			Strategi/mekanisme

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat belum mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Renkon
	26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	1	Belum ada lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana
			Strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan pangan daerah belum mempertimbangkan skenario bencana teryarah yang disusun berdasarkan Renkon dan skenario bencana janqka panjang di Kabupaten Sidoarjo
			Strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat belum menjadi stategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintih - masyarakat _ sektor swasta)
4. PENATAAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27. Penataan Ruang Berbasis PR8	3	Belum ada RTRW Kabupaten revisi yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana / mana.jemen risiko bencana
	28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	4	Publik belum memanfaakan informasi penataan ruang unfuk pengurangan risiko bencana
	29. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)	3	Pelaksanaan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) belum dirokuskan pada salah satu dari 3 pilar

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			(pendidikan untuk pengurangan risiko bencana/ manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana
	30. Rumah Saht Aman Bencana (RSAB)	1	Belum ada sosialisasi RSAB dilakukan diseluruh RS yanq ada di daerah Rawan bencana
			Seluruh RS daerah rawan bencana perencanaan kegiatan/program RSAB belum berdasarkan pada 4 modul safety hopital (kajian keterpaparan, ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB, kemampuan penyelenggaraan PB
			Seluruh RS daerah rawan bencana belum melaksanakan perencanaan keg iatan/program RSAB berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana dan prasarana RSAB kemampuan penyelenggaraan PB)
	31. Desa Tangguh Bencana	3	Desa tangguh bencana belum melakukan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana / pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32. Penerapan Sumur Resapan dan/atau Eiopori	3	Belum ada penerapan sumur resapan dnn/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana baniir
			Penerapan sumur resapan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			dan/atau biopori di Kabupaten Sidoarjo belum menurunkan frekuensi dan luasan banjir daiam setahun terakhir
	33. Perlindungan Daerah Tangkapan Air	3	Belum ada perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya penguangan risiko bencana banjir
			Perlindungan daerah tangkapan air belum menurunkan ftekuensi dan luasan baniir dalam setahun terakhir
	34, Restorasi Sungai	3	Belum ada upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banlr
			Upaya restorasi sungai belum menuunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir.
	35. Penguatan Lereng	3	Belum ada upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir
			Upaya penguatan lereng belum menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir
	36. Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan	3	Belum ada penegakan hukum bagi masyarakat, swasta dan instansi yang melanggar Perda
			Perda belum diimplementasikan Pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar
	37. Optimalisasi Pernanfaatan Air Permukaan	3	Belum ada Perda yanq mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan) unfuk

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			pencegahan dan mitigasi kekeringan)
			Belum ada program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan
	38. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	3	Belum diterapkannya kebijakan tersebut dalam perizinan mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Sidoarjo
			Belum dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB
	39. Revitalisasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota	3	Belum ada kebijakan yang mendukung mitigasi struktural (revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota) di Kabupaten Sidoarjo
			Belum dilakukan mitigasi struktural (revitalisasi tanggul,embung, waduk dan taman kota) di Kabupaten Sidoarjo
	40. Rencana Kontinjensi Gempabumi	2	Belum ada sinkronisasi antara rencana kortijensii denqan Prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi
			Rencana kontinjensi belum dualankan pada masa kisis dan belum diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi
	41. Rencana Kontinjensi Baniir	2	Belum ada sinkronisasi artara rcncana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatann dini dan penanganan darurat bencana atau rencana

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			penanggulangan kedaruratan bencana banjir
			Rencana kontijensi belum dijalankan pada masa krisis dan belum difurunkan meniadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir
	42. Sisteni Peringatan Drni Banjir	4	Sistem peringatan dini yang dibangun belum meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir
	43. Rencana Kontinjensi Tanah Longsor	2	Belum ada sinkonisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor
			Rencana kontinjensi belum dijalankan pada masa kisis dan belum diturunkan menjadi rencana operasi pada nasa tanggap darurat bencana tanah longsor
	44. Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor	4	Sistem peringatan dini yang dibangun belum meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor
	45. Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan	2	Belum ada sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan
			Rencana kontinjensi belum dijalankan pada masa krisis dan belum diturunkan menjadi rencana operasi

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan
	46. Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan	4	Sistem peringatan dini yang dibangun belum meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan
	47. Rencana Kontinjensi Kekeringan	2	Belum ada sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana kekeringan
			Rencana kontinjensi belum dijalankan pada masa krisis dan belum diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan
	48. Sistem Peringatan Dini Kekeringan	4	Sistem peringatan dini yang dibangun belum meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan
	49. Penentuan Status Tanggap Darurat	1	Belum ada mekanisme prosedur yanq mengatur tentang penentuan status darurat berrcana dan penggunaan anggaan khusus untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
			Belum ada perkuatan mekanisme dan prosedur dengan disusunnya sebuah aturan tertulis (baik dalam bertuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan atau peraturan setingkat lainnya) tentang penentuan status tanggap darurat di Kabupaten

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			Sidoarjo
			Mekanisme penentuan status tanggap darurat belum dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat berrana selanjutnya
	50. Penerapan sistem Komando Operasi Darurat	1	Belum ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo
			Belum ada perkuatan mekanisme dan prosedur dengan disusunnya sebuah aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan atau peratulan setingkat lainnya) bntang sistem komando tanggap darurat di Kabupaten Sidoarjo
			Sstem komando tanggap darurat belum dipahami oleh seluruh SKPD sebagai acuan dalam operasi darurat dl kemudian hari
	51. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana	1	Belum ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis
			Belum ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaii cepat pada masa krisis
			Relawan dan personil terlatih belum melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku
	52. Pengerahan Tim Penyelamatan dan	1	Belum ada relawan dan personil terlatih yang

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
	Pertolongan Korban		melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
			Belum ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana
			Relawan dan personil terlatih belum melakukan penyelamatan dan pertoiongan korban terlatih sesuai dengan prosedur yang berlaku
	53. Perbaikan Darurat	1	Belum ada prosedur perbaikan darurat rencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis ada masa tanggap darurat
			Belum ada aturan daerah (surat keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah, atau perahrran daerah) yang memperkuat prosedur perbaikan darurat bencana
			Prosedur perbaikan darurat bencana belum mengakomodir peran pemenntah, komunitas dan dunia usaha dalalm perbaikan darurat bencana
	54. Pengerahan Bantuan Pada Masyarakat Terjauh	1	Belum ada relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat terjatuh pada masa kisis dan tanggap darurat bencana
			Belum ada mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan /atau pengerahan bantuan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			darurat bencana
			Belum ada relawan dan personil yanq melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai Prcsedur
	55. Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana	1	Belum ada aturan tertuis (baik dalam bentuk pengaturan daerah. Keputusan kepala daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana
			Prosedur tersebut belum mengatur mekanisme proses transisi/ pengalihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonskuksi
			Penentuan status tanggap darurat belum diyakini masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	56. Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah	1	Belum ada inisiatif unfuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman di Kabupaten Sidoarjo.
			Belum ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang secara foamal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo
			Rancangan rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah belum mengakonodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemenntah, komunitas, dan

PRIORITAS	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH	LEVEL	ISU STRATEGIS
			sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi
	57. Pemulihan Inftastruktur Penting	1	Belum ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pas.a bencana
			Belum ada mekanisrne dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepenfingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban
			Rancangan proses-proses pemulihan infrastuktur penting pasca bencana belum disusun dengan rnempertimbangkan prinsip-prisnip risiko bencana jangka panjang (slow onset, guna menghindari risiko baru dari pembangunan
	58. Perbaikan Rumah Pernduduk	1	Belum ada sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain

LAMPIRAN 5PROGRAM OPD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Koordinasi Penyusunan program / kegiatan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	1	Koordinasi penyusunan program / kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana	Mengkoordinasikan penyusunan program / Kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program / kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program / Kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
				2	Koordinasi penetapan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	Mengkoordinasikan penetapan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	Program Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
2	Saat Bencana	1	Koordinasi pergeseran anggaran penanganan bencana	1	Koordinasi pergeseran anggaran penanganan bencana yang belum diatur dalam BTT	Mengaolokasikan anggaran penanganan bencana yang belum diatur BTT	Menetapkan anggaran penanganan bencana yang belum diatur dalam BTT	Anggaran penanganan bencana yang belum diatur dalam BTT sesuai kebutuhab dan ketentuan yang berlaku.

3	Pasca Bencana	1	Koordinasi penetapan prioritas program / kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana	1	Koordinasi penetapan prioritas program / kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	Mengkoordinasikan penetapan prioritas program / kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	Menetapkan prioritas program / kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	Program / Kegiatan dan penganggaran penanganan pasca bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

DINAS SOSIAL								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyediaan permakanan	1	Mempersiapkan paket-paket sembako	Sebagai upaya persiapan apabila terjadi bencana sewaktu-waktu	Warga terdampak bencana	Terpenuhinya kebutuhan pangan warga
				2	Mempersiapkan stok pangan	Sebagai upaya persiapan apabila terjadi bencana sewaktu-waktu	Warga terdampak bencana	Terpenuhinya kebutuhan pangan warga

		2	Upaya pengurangan risiko bencana	1	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Melatih kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Warga masyarakat	Terbentuknya masyarakat yang sadar bencana
				2	kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana	Mengurangi resiko terjadinya bencana	Daerah rawan bencana	Pengurangan resiko bencana
				3	Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana	Tersedianya desa/kelurahan yang telah siaga dalam menghadapi bencana	Desa/kelurahan rawan bencana	Terbentunknya kesiapsiagaan masyarakat
				4	Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman	Tersedianya perlindungan sosial bagi masyarakat atas ancaman bahaya	Masyarakat di daerah rawan bencana	Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat

					bahaya			
2	Saat Bencana	1	Identifikasi bencana	1	Mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi bencana	Teridentifikasinya bencana yang terjadi	Daerah yang terjadi bencana	Bencana yang terjadi cepat teridentifikasi
				2	Identifikasi/ mendata korban bencana	Korban bencana alam segera dapat diidentifikasi	Warga terdampak bencana	Tersedianya info yang akurat tentang data korban terdampak
				3	Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman	Korban bencana mendapatkan tempat yang aman	Warga terdampak bencana	Tersedianya tempat yang aman bagi korban bencana

		2	Dukungan psikososial	1	Memberikan dukungan psikososial bagi masyarakat korban bencana	Korban bencana mendapatkan perlindungan psikologis	Warga terdampak bencana yang terguncang psikologisnya	Korban bencana mendapatkan bantuan psikologis
		3	Upaya pengurangan risiko bencana	1	Memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko	Mengurangi resiko terjadinya dampak bencana yang lebih luas	Masyarakat di daerah rawan bencana	Dampak bencana yang lebih luas bisa dikurangi dan diminimalisir
3	Pasca Bencana	1	Identifikasi dampak bencana	1	Mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana	Mengetahui jumlah kerugian material yang dialami oleh korban bencana	Warga korban bencana	Teridentifikasinya kerugian material yang dialami oleh warga
				2	Mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah/tempat tinggal korban bencana	Mengetahui jumlah tempat tinggal/rumah rusak akibat bencana	Warga korban bencana	Teridentifikasinya jumlah tempat tinggal/rumah yang dialami oleh warga
				3	dst			

		2	Dukungan psikososial	1	Melaksanakan dukungan psikososial dan rujukan	Korban bencana mendapatkan dukungan psikososial dan rujukan apabila Kabupaten tidak bisa menangani	Warga korban bencana	Warga terdampak mendapatkan penanganan dukungan psikologis
				2	Penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait;	Korban bencana mendapatkan penguatan dan pemulihan sosial	Warga korban bencana	Warga terdampak mendapatkan penguatan dan pemulihan sosial
		3	dst		dst			

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	1	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Memperkuat tebing/dinding saluran	Saluran pembuang/afvoer yang mengalami kerusakan tebing	Tidak terjadi longsor pada dinding saluran

			Pantai padaWilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Meningkatkan kapasitas saluran	Saluran/afvoer yang sudah mengalami pendangkalan	Daya tampung saluran menjadi lebih besar
				3	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Terpeliharanya sarana dan prasarana pengendalian banjir	Perawatan berkala sarana dan prasarana yang sudah ada	Pemanfaatan sarpras dalam jangka waktu yang lebih lama
2	Saat Bencana	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai padaWilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Identifikasi titik lokasi banjir/genangan	Mengetahui penyebab terjadinya banjir/genangan di lokasi tersebut	Lokasi titik kejadian banjir	Pemberian tindakan untuk meminimalisir banjir/genangan
				2	Pemasangan pompa portable di titik banjir/genangan	Mengurangi debit air di lokasi banjir/genangan	Lokasi titik kejadian banjir	Debit banjir berkurang
				3	Pemasangan gedeg/bongkotan untuk penanganan darurat tanggul jebol	Penanganan darurat terhadap tanggul yang jebol	Air di lokasi titik jebolan tidak meluap	Tidak terjadi luapan air pada titik jebolan tersebut
3	Pasca Bencana	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan	1	Pembangunan Pintu Air/Bendung	Pengaturan debit air di saluran/afvour	Pertemuan dua saluran pembuang	Tidak terjadi backwater

			Pengaman Pantai padaWilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pengendali Banjir			
				2	Peningkatan Tanggul Sungai	Memperkuat tebing/dinding saluran	Saluran pembuang/afvoer yang mengalami kerusakan tebing	Tidak terjadi longsor pada dinding saluran
				3	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatkan kapasitas pompa banjir	Stasiun pompa banjir yang sudah memerlukan peningkatan kapasitas	Daya sedot air terhadap debit banjir lebih besar
				4	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Terpeliharanya sarana dan prasarana stasiun pompa banjir	Perawatan berkala sarana dan prasarana stasiun pompa banjir	Pemanfaatan sarpras dalam jangka waktu yang lebih lama

DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Ko	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Memberikan kepastian hukum atas peruntukan lahan sesuai dengan RT RW di masing-masing wilayah yang berada di	Daerah permukiman komersial, ruang terbuka hijau, daerah industri dan penataan saluran yang lebih baik	Tertatanya lahan sesuai dengan peruntukannya

		ta		Kabupaten/ Kota	kabupaten Sidoarjo		
			2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Memberikan arah yang jelas atas penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya	Permukiman penduduk yang sudah ada sebelumnya dan daerah permukiman baru (perumahan komersial)	Terciptanya tata ruang sesuai dengan Perda kabupaten Sidoarjo
	2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Sebagai upaya untuk melakukan penataan wilayah yang lebih baik ke depannya dan tetap berpedoman pada RT/RW kabupaten	Penataan permukiman secara menyeluruh dan terpadu	Terdatanya semua wilayah permukiman secara menyeluruh untuk dilakukan penataan secara berkelanjutan

					Sioarjo		
			2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Memberikan ruang yag jelas dari setiap kegiatan penataan ruang di masing-masing wilayah sesuai dengan peruntukannya	Permukiman di area perumahan baru	Terciptanya tata ruang sesuai dengan Perda kabupaten Sidoarjo
			3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya fasilitas umum yang sudah ada	Fasum-fasum dan bangunan lainnya yang berfungsi untuk masyarakat	Terpenuhinya sarana umum yang di butuhkan masyarakat secara luas
			4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Evaluasi secara berkelanjutan sebagai upaya tindak lanjut untuk dilakukannya pemeliharaan secara berkala	Bangunan yang mempunyai fungsi untuk kebutuhan hidup orang banyak	Terpeliharanya semua jenis bangunan dan lingkungan

2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Memberikan arah yang jelas atas rekomendasi dari tim monitoring teknis atas kejadian atau bencana yang sedang terjadi	Rumah, fasilitas umum atau lingkungan yang tertimpa bencana	Tertatanya semua fasilitas umum secara baik dan terukur untuk segera di tindak lanjuti dalam penanganannya
				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Memberikan masukan kepad Tim Tanggap Bencana untuk memberikan masukan kepada tim teknis dalam setiap keputusan yang akan segera di tindak lanjuti	Permukiman yang ada baik di perkotaan maupun pedesaan yang tertimpa bencana	Terpenuhinya hasil rekomendasi dari tim teknis sebagi tindak lanjut penanganan bencana yang akan di lakukan
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian	Sebagai upaya inventarisir untuk tindak lanjut penanganan dari setiap	Semua permukiman dan fasilitas umum yang rusak akibat bencara yang telah terjadi	Tertanganinya semua permasalahan baik yang bersifat fisik dan non fisik secara baik dan

					Sebelumnya yang Belum Tertangani	bencana yang telah terjadi		menyeluruh
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tercukupinya semua data secara keseluruhan baik permukiman dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana	Masyarakat yang ada di permukiman yang terkena bencana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana yang telah terjadi	Terdatanya semua permukiman dan fasilitas umum yang terkena bencana
				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sebagai tindak lanjut atas pendataan bagi masyarakat yang terkena musibah bencana yang telah terjadi	Semua masyarakat yang teridentifikasi dan benar-benar terkena musibah bencana alam	Tercukupinya semua hasil pendataan untuk segera di lakukan relokasi bagi masyarakat dan fasilitas umum yang terkena bencana alam

				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tercukupinya data yang telah terkumpul sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang telah telah terjadi	Masyarakat yang berdomisili di tempat fasilitas umum yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat lainnya yang juga tertimpa musibah di luar fasilitas umum yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah	Terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal sementara atau pengungsian smmentara untuk segera di tindak lanjuti penanganan selanjutnya
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Memberikan pemahanan atas bencana yang telah terjadi dan tindak lanjut pemerintah daerah untuk penanganan selanjutnya	Masyarakat umum dan fasilitas umum lainnya yang terkena musibah bencana alam	Terciptanya pemahaman yang sama atas musibah yang terjadi sebagai langkah awal upaya perbaikan dan relokasi permukiman baru kepada masyarkat yang tertimpa bencana alam

				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Memberikan pemahaman atas musibah yang terjadi dan tindak lanjut pnangannya	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam dan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam	Terjadinya pemahaman yang yang sama sebagai upaya perbaikan ke depannya
3	Pasca Bencana	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tercukupiya kebutuhan permukiman bagi masyarakat yang tertimpa musibah	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Tercukupinya perumahan dan fasilitas umum lainnya sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang telah terjadi
				2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Memberikan arah yang jelas dalam perencanaan ke depan setelah terjadinya bencana alam	Masyarakat umum, pengusaha perumahan (developer) dan masyarakat umum yang berkecimpung di usaha perumahan (kaplingan)	Terciptanya penataan perumahan yang terpadu dengan penciptaan lingkungan yang baik serta penataan fasilitas umum sebagai penunjang atau sebagai balancing dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan

				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mengarahkan dan memberikan lahan pengganti untuk masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang tertimpamusibah bencana alam	Terpenuhinya lahan untuk tempat tinggal bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mengarahkan dan memberikan pengganti permukiman bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyakarak umum yang ada di permukiman perkotaan dan masyarakat desa yang tertimpa musibah bencana alam	Tercukupinya kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal yang aman dan nyaman
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/	Sebagai tindak lanjut awal untuk pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang ada dipenampungan sementara dengan penyediaan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan yang ada di	Tercukupinya fasilitas umum yang di butuhkan di penampungan sementara yang di sediakan oleh pemerintah daerah

					Kota		pengungsian sementara	
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sebagai upaya penataan awal dan berkelanjutan dalam bidang permukiman	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Tertanya permukiman yang baik dengan segala fasilitas umum yang harus di sediakan oleh pemerintah daerah
				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Memberikan kepastian secara hukum atas hak kepemilikan lahan dan perumahan sebagai pengganti atas bencana alam yang telah terjadi	Masyarakat umum yang telah menerima lahan dan permukiman pengganti sebagai akibat dari bencana alam	Tertatanya hak atas kepemilikan lahan dan bangunan yang telah di ganti oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terpetanya wilayah yang terindikasi rawan pangan	Wilayah Kab. Sidoarjo	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan
2	Pasca Bencana	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Terkoordinasinya penanganan rawan panan	OPD/Stake holder terkait	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
				2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	Tersalurnya cadangan pangan bagi KK yang terindikasi rentan rawan pangan di wilayah rentan rawan pangan	KK yang terindikasi rentan rawan pangan di wilayah rentan rawan pangan	Terbantunya ketersediaan pangan bagi KK yang terindikasi rentan rawan pangan di wilayah rentan rawan pangan

					Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			

DINAS PERIKANAN								
NO	TAHAP	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kab/ Kota	1	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	SLCN Dalam masa sekarang perlu dilakukan pendekatan lebih mendalam mengenai cuaca dan iklim guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, serta mewujudkan NAWACITA "kedaulatan pangan dan	Nelayan	Mendapatkan pengetahuan, tetap aktif dan menjaga jarak dengan tujuan akhir pembangunan ekonomi nelayan di tengah pandemi

						pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.		

				2		Tujuan : Melalui sekolah lapang cuaca nelayan (SLCN) Jawa Timur tahun 2020 yg diselenggarakan secara langsung dengan terjun ke lapangan di tengah pandemi dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan pencegahan covid 19, nelayan diharapkan mendapatkan pengetahuan, tetap aktif dan mnjaga jarak dengan tujuan akhir pembangunan ekonomi	Nelayan	Mendapatkan pengetahuan, tetap aktif dan mnjaga jarak dengan tujuan akhir pembangunan ekonomi nelayan di tengah pandemi

						nelayan di tengah pandemi		
	Saat Bencana	1	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kab/ Kota	1	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Pemberian hibah dari DKP PROV berupa instalasi cuci tangan dikampung nelayan yang ada di kab	Nelayan , KUB , masyarakat pesisir , perangkat desa, penyuluh perikanan	Semakin meningkatnya pemahaman nelayan dalam menghadapi covid-19

						sidoarjo ditemptkan 10 titik		
				2		Pemberian bantuan masker dari DKP PROV jatim kepada anggota nelayan KUB di kab sidoarjo sebanyak 1.500 masker kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 desa yakni ds. Banjar kemuning, tambak cemandi kec Sedati, kemiri kec Sidoarjo , kali pecabean kec candi	Nelayan , KUB , masyarakat pesisir , perangkat desa, penyuluh perikanan	Semakin meningkatnya pemahaman nelayan dalam menghadapi covid-19

				3		Bantuan berupa vitamin, alat semprot masker, sabun cuci tangan, wastafel portabel yang merupakan bantuan dari DKP PROV	Peserta. Tahap 1. Nelayan Desa Gisik Cemandi Kec Sedati 15 org. Tahap ke 2 Nelayan Desa Segoro Tambak Kec Sedati 10 org Tahap ke 3 Nelayan Desa Tambak Cemandi 10 org	

			Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	4	Pemberian fasilitas pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Penyerahan bantuan Hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur kepada POKLAHSAR yang sudah mengajukan proposal ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pada Than 2019, dan yang memenuhi persyaratan untk menerima bantuan adalah POKLAHSAR Multi Kreasi Mandiri di Kec Sidoarjo dan POKLAHSAR Gading di Kec. Wonoayu	POKLAHSAR	Meningkatkan produksi olahan

		2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya	Pembangunan Normalisasi saluran kali Bangoan Kurang 2 KM dan Cemporo kurang 1 km pasca banjir di Daerah Kec. Tanggulangin	Pembudidaya	Memperlancar aktivitas budidaya
	Pasca Bencana	1	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya	Mengadakan pembinaan serta pendampingan kepada para pembudidaya dibantu para penyuluh lapang untuk mensupport para pembudidaya tetap berbudidaya walaupun dengan kondisi pandemi covid-19 dan tetap melaksanakan aktivitas	Pembudidaya	

						budidaya		
		2	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	1	Pemberian fasilitas pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Pembinaan terhadap para pengolah dan pemasar melalui zoom meeting yaitu pemasaran online branding product , para pengolah antusias mengikuti	POKLAHSAR	Ada Pesanan

						pemberian fasilitasi ijin sertifikasi produk halal tetapi hasilnya menunggu kkp masih proses	POKLAHSAR, para pelaku usaha	Sertifikat halal
						Pembinaan berupa arahan bagaimana untuk mendapatkan sertifikat halal	POKLAHSAR	Meningkatnya pemahaman pengolah terhadap sertifikasi halal
			Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kab/ Kota		Pengembangan kapasitas nelayan kecil	pembinaan sanitasi hygiene kampung nelayan untuk penanggulangan wabah covid-19 dihadiri dari DKP propinsi, dinas perikanan kab sidoarjo ketua KUB NELAYAN, TANGKAP kec waru, dan sedati ,	Nelayan , KUB , masyarakat pesisir , perangkat desa, penyuluh perikanan	Semakin meningkatnya pemahaman nelayan dalam menghadapi covid-19

						nelayan diberikan pemahaman protokol kesehatan dalam menghadapi wabah covid-19		

DINAS PERHUBUNGAN								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	1	Belanja Kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	Tanggap terhadap bencana	PNS, THL, Sopir angkutan, Pengemudi angkutan sungai	Peserta mengetahui apayang harus di lakukan ketika terjadi bencana

				2	Asuransi gedung dan kendaraan dinas	semua kerugian pasca bencana bisa diganti	Gedung kantor, Kendaraan Dinas	Penyelesaian kerusakan Pasca bencana
		2	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	Kajian potensi bencana di Kantor Dinas perhubungan dan terminal	Mengetahui bencana apa yg mungkin terjadi	Kantor Dinas Perhubungan , Terminal, Parkir	Rekomendasi pencegahan bencana
				2	kajian penyediaan resapan air di lingkungan kantor Dinas perhubungan	Mengetahui ketersediaan resapan air di lingkungan Dinas Perhubungan	Kantor Dinas Perhubungan	Rekomendasi kelayakan saluran air
				3	kajian penyediaan resapan air di lingkungan terminal porong dan krian	Mengetahui ketersediaan resapan air di Terminal porong dan krian	Terminal porong dan krian	Rekomendasi kelayakan saluran air

				4	Kajian studi kelayakan bangunan kantor Dinas Perhubungan terhadap bencana	Mengetahui kelayakan bangunan kantor Dinas Perhubungan terhadap bencana	Kantor Dinas Perhubungan	Rekomendasi bangunan yang layak
				5	Kajian studi kelayakan bangunan terminal porong dan krian	Mengetahui kelayakan bangunan kantor Dinas Perhubungan terhadap bencana	Terminal porong dan krian	Rekomendasi bangunan yang layak
				6	Pemasangan Rambu rambu bencana	Tersedianya rambu rambu tanggap bencana	Wilayah kabupaten Sidoarjo	Terpasangnya rambu rambu bencana
2	Saat Bencana	1	PAM Jalur	1	PAM JALUR	Pengamanan lalu lintas dan jalur evakuasi	Karyawan dan karyawati Dinas Perhubungan	Ketertiban lalu litas
3	Pasca Bencana	1	Barang milik daerah	1	Identifikasi aset yang rusak	Teridentifikasi aset yang rusak dan hilang karena bencana	Aset dinas perhubungan	Klaim asuransi
		2	Rehap gedung kantor	2	Pembangunan gedung kantor dan terminal	Terbangunannya gedung dan terminal	Gedung dan terminal	Terbangunannya gedung dan terminal

					yang rusak akibat bencana			

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Seluruh masyarakat	Meminimalisir pencemaran Lingkungan

				2	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Seluruh masyarakat	Sampah terpilah sesuai jenisnya

DINAS KESEHATAN						
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN

1	Pra Bencana	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Meningkatakan kemampuan SDM dalam upaya penurunan resiko, penanggulangan dan pasca bencana	Tenaga Kesehatan dan relawan	Tenaga Kesehatan dan Relawan mampu untuk menurunkan resiko bencana dan melakukan kegiatan penanggulangan bencana
2	Saat Bencana	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengaktifkan sistem Klaster kesehatan dalam penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo	Tenaga Kesehatan dan relawan	Penduduk terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart

3	Pasca Bencana	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Meningkatakan kemampuan SDM dalam upaya penurunan resiko, penanggulangan dan pasca bencana	Tenaga Kesehatan dan relawan	Tenaga Kesehatan dan Relawan mampu untuk menurunkan resiko bencana dan melakukan kegiatan penanggulangan bencana

KECAMATAN TARIK								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penataan aliran sungai	1	Tidak membangun bangunan di bantaran sungai	Aliran sungai bersih dari sampah	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Aliran sungai bersih dari sampah
						Pengerukan sungai	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Pengerukan sungai
		2	Pelatihan pembekalan dan pemahaman	1	Melakukan bimbingan teknis	Meningkatkan kemampuan dasar penanganan bencana	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Peningkatan Kemampuan dasar untuk penanganan bencana

						Membantu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini
		3	Membuat Peta Wilayah Kecamatan	1	Survey Lapangan	Memahami gejala bencana	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Pemahaman mengenai gejala bencana
				2	Koordinasi dengan Kepala Desa	Mengawasi wilayah yang rawan bencana	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Pengawasan wilayah yang rawan bencana
2	Saat Bencana	1	Penyelamatan dan Evakuasi Banjir	1	Koordinasi dengan Dinas Terkait	Mengevakuasi warga terdampak banjir ke daerah yang aman	Warga terdampak	Evakuasi warga terdampak banjir ke daerah yang aman
						Melarang warga area terdampak agar tidak berjalan di sekitar saluran air	Warga terdampak	Meminimalkan korban jiwa
		2	Penyelamatan dan Evakuasi Cuaca Ekstrim	1	Pendataan dampak bencana	Mengetahui besaran kerugian material	Warga terdampak	Data laporan bencana
						Merujuk korban ke	Warga terdampak	Data laporan bencana

						Rumah Sakit terdekat		
		3	Pengerahan SDM	1	Bantuan relawan	Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana	Warga terdampak	Data laporan bencana
3	Pasca Bencana	1	Rehabilitasi dan menjaga kesehatan	1	Koordinasi Dinas terkait	Waspada terhadap binatang berbisa	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Kewaspadaan terhadap binatang berbisa
						Penyebaran penyakit	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Kewaspadaan warga terhadap penyebaran penyakit
						Menyediakan air bersih	Seluruh warga Kecamatan Tarik	Tersedianya air bersih
		2	Pemulihan Psikologi	1	Kesenian	Memulihkan trauma korban	Warga terdampak	Pemulihan trauma korban
				2	Melakukan kegiatan positif	Memulihkan trauma korban	Warga terdampak	Pemulihan trauma korban

KECAMATAN WARU								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat	Operasi Yustisi (Masker) terkait penanganan	Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan	Berkurangnya pelanggar protokol kesehatan

			Perkada		Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Covid-19		
						Pembinaan Linmas (Kewaspadaan Dini Potensi Bencana)	Linmas Desa	Terbinanya Linmas Desa terkait kesiapsiagaan bencana

KECAMATAN BALONGBENDO								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Identifikasi infrasruktur di Kawasan permukiman yang srategis	Bangunan yang rawan bencana	Terdatanya bangunan yang rawan bencana

				2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Menata Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	Lingkungan Padat Penduduk	Terciptanya lingkungan yang sehat
		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Untuk mengetahuai kondisi Gang dan lingkungan	Bangunan dan lingkungan	Rencana tindaklanjut
				2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pengaturan Tata ruang Kabupaten/Kota	Bangunan yang strategis	Terciptanya lingkungan asri/sehat
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Memfungsikan kembali infrastruktur	Jalan dan sungai	Lancarnya fungsi Infrastruktur
				4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan	Untuk mengetahui permasalahan bangunan dan lingkungan	Bangunan dan lingkungan	Terpeliharanya lingkungan dan gang dengan baik

					Lingkungan			
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pendataan kondisi bangunan	Bangunan yang tidak layak	Antisipasi bencana
				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Mengetahui geografis lahan	Banguan yang tidak layak	Antisipasi bencana
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum	Pendataan rumah korban yang belum tertangani	Lokasi bencana	Terdata yang belum tertangani

					Tertangani			
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Untuk mengetahuai kerugian akibat bencana	Rumah korban bencana	Mengetahui jumlah kerugian
				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Untuk mengetahui rumah yang terdampak bencana	Rumah korban bencana	Mengetahui jumlah kerugian

				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Untuk mengetahui rumah yang terdampak bencana	Rumah korban bencana	Mengetahui jumlah kerugian
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Mendapat lahan rencana relokasi	Tanah kosong	Terpenuhinya lokasi yang di butuhkan
				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Musyawarah Desa	Lokasi rumah	Terdatanya lahan pemukiman relokasi
3	Pasca Bencan	1	Pembangunan dan	1	Rehabilitasi Rumah bagi	Tertampungnya korban	Terbangunnya rumah	Terwujudnya RLH (Rumah Layak

	a		Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Korban Bencana	bencana		Huni)
				2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Tertampungnya korban bencana	Terbangunnya rumah	Terwujudnya RLH (Rumah Layak Huni)
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya lokasi	Terbangunnya rumah	Terwujudnya RLH (Rumah Layak Huni)
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah	Menampung korban bencana	Tertampungnya korban bencana

				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Terbangunnya rumah	Menampung korban bencana	Tertampungnya korban bencana
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Tersedianya lahan korban bencana	Korban bencana	Tertampungnya korban bencana
				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau	Tertibnya Adminitrasi proses serah terima	Korban bencana	Terciptanya legalitas formal

					Relokasi Program Kabupaten/ Kota			

KECAMATAN PRAMBON								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Pelatihan Pembekalan dan Pemahaman	1	Melakukan Bimbingan Teknis	Meningkatkan Kemampuan Dasar untuk Penanganan Bencana	Seluruh Warga Kecamatan Prambon	Peningkatan Kemampuan Dasar untuk Penanganan Bencana
						Membantu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini	Seluruh Warga Kecamatan Prambon	Kesiap siagaan dan Kewaspadaan Bencana
		2	Membuat Peta Wilayah Kecamatan	1	Survei Lapangan	Membantu Memahami Gejala Bencana	Seluruh Warga Kecamatan Prambon	Pemahaman Mengenai Gejala Bencana
				2	Koordinasi dengan Kepala Desa	Mengawasi Wilayah Yang Rentan Bencana	Seluruh Warga Kecamatan Prambon	Pengawasan Wilayah Yang Rentan Bencana

		3	Penyediaan Rambu	1	Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik di Rawan Bencana	Mempermudah Seluruh Warga tentang Informasi Bencana	Seluruh Warga Rawan Bencana	Peningkatan Kemampuan Dasar untuk Informasi Bencana
2	Saat Bencana	1	Penyelamatan dan Evakuasi	1	Pendataan Dampak Bencana	Pendataan kondisi bangunan	Warga Terdampak Bencana	Data Laporan Bencana
						Merujuk Korban ke Rumah Sakit Terdekat	Warga Terdampak Bencana	Data Laporan Bencana
		2	Pengerahan SDM	1	Merujuk Korban ke Rumah Sakit Terdekat	Mempercepat Pemulihan Sarana dan Prasarana	Warga Terdampak Bencana	Data Laporan Bencana
3	Pasca Bencana	1	Pemulihan Psikologi	1	Kesenian	Memulihkan Trauma Korban	Warga Terdampak Bencana	Pemulihan Trauma Korban
				2	Melakukan Kegiatan Positif	Memulihkan Trauma Korban	Warga Terdampak Bencana	Pemulihan Trauma Korban

KECAMATAN PORONG						
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN

1	Pra Bencana	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Untuk rehabilitasi sungai agar mampu menampug debit air/ serapan hujan yang lebih banyak sehingga mampu mencegah terjadinya banjir	Masyarakat dan Infrastruktur	Terciptanya aliran sungai yang bagus sehingga mampu menampung debit air/ resapan hujan dalam jumlah besar
		2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Untuk peningkatan dan pelatihan serta simulasi terhadap linmas agar mendapat pengetahuan dan pelatihan seputar tanggap bencana	Anggota Linmas	Bertambahnya wawasan anggota linmas dalam hal kesiap siagaan terhadap bencana

		3	Pemberdayaan Kelurahan	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Untuk melakukan pemeliharaan gorong gorong di tiap kelurahan sehingga mampu menciptakan saluran air yang baik sehingga mampu mencegah terjadinya banjir	Masyarakat dan Infrastruktur	Terciptannya sistem gorong - gorong yang baik sehingga air mamu mengalir dengan baik dan tidak menyebabkan banjir
		4	Kordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian	Untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada masyrakatagar siap dan tanggap terhadap bencana	Masyarakat	Bertambahnya wawasanmasyrakat dalam hal kesiap siagaan terhadap bencana

					Negara Republik Indonesia			
2	Saat Bencana	1	Pemberdayaan Kelurahan	1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Untuk melakukan perbantuan secara materiil terhdap masyrakat yang terdampak bencana	Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana
3	Pasca Bencana	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain	Untuk rehabilitasi jalan yang terdampak bencana	Masyarakat dan Infrastruktur	Meningkatkatnya waktu pemulihan sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana

KECAMATAN JABON

NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Untuk pembersihan sungai dan pemeliharaan jalan lingkungan agar bersih dan tidak menyebabkan banjir	Masyarakat dan Infrastruktur	Terciptanya sungai yang bersih dan tidak dangkal serta jalanan yang bersih sehingga mampu menampung debit air dan resapan hujan dalam jumlah besar
		2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Untuk meningkatkan kemampuan anggota Linmas dalam melakukan penanggulangan bencana	Anggota Linmas	Bertambahnya kemampuan dan kesiapsiagaan anggota Linmas dalam menghadapi bencana

		3	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan perangkat Desa dalam tanggap bencana	Masyarakat dan Perangkat Desa	Meningkatnya koordinasi dengan perangkat Desa dan bertambahnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dan perangkat Desa
		4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	4	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tanggap bencana bagi masyarakat	Masyarakat	Bertambahnya pengetahuan dan kemampuan tanggap bencana dari masyarakat
2	Saat Bencana	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Untuk melakukan penanganan dan penanggulangan atas bencana yang terjadi	Masyarakat dan Anggota Linmas	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana

					Vertikal di Wilayah Kecamatan			
3	Pasca Bencana	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Untuk pembersihan dan rehabilitasi jalan dan sungai yang terdampak bencana	Masyarakat dan Infrastruktur	Memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana umum yang terdampak terutama jalan dan sungai

KECAMATAN TANGGULANGIN						
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN

1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten/Kota	1	Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten/ Kota	Memelihara infrastruktur kawasan pemukiman kawasan strategis	Masyarakat di kawasan pemukiman strategis	Penggunaan infrastruktur sesuai dengan peruntukannya
				2	Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten/ Kota	Menumbuhkan Kesadaran masyarakat agar tumbuh rasa memiliki infrastruktur kawasan pemukiman	Masyarakat di kawasan pemukiman strategis	Terpeliharanya infrastruktur kawasan pemukiman
		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Ko	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Menciptakan kawasan dengan bangunan dan lingkungan yang tertib	Masyarakat / Pemohon IMB	Terciptanya bangunan dan lingkungan yang tertata

			ta	2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Menciptakan kawasan dengan bangunan dan lingkungan yang tertib	Masyarakat / Pemohon IMB	Terciptanya bangunan dan lingkungan yang tertata
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Penggunaan bangunan dan lingkungan sesuai dengan izin lingkungan	Pemilik bangunan	Terciptanya keindahan lingkungan
				4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Penggunaan bangunan dan lingkungan sesuai dengan izin pengajuan/permohonan	Pemilik bangunan	Terciptanya lingkungan yang tertib
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Mendapatkan data perumahan di lokasi rawan bencana	Perumahan di lokasi rawan bencana	Data perumahan di lokasi rawan bencana

			ta	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Mendapatkan data lahan relokasi korban bencana yang lebih aman dari bencana	Lahan baru dengan kondisi lebih aman dari bencana	Data lahan baru yang potensial sebagai relokaasi
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Penyesuaian data sebelum bencana dengan data setelah penanganan bencana	kawasan yang terkena bencana	Terlaksananya penanganan korban bencana secara menyeluruh
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Mendapatkan data rumah korban bencana sesuai dengan tingkat kerusakan	Rumah di lokasi bencana	Data rumah di lokasi bencana lengkap dengan tingkat kerusakannya
				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau	Mendapatkan data korban bencana alam bagi yang berhak mendapatkan rumah	Pemilik rumah di kawasan bencana alam	Data rumah korban bencana sesuai dengan hasill verifikasi

					Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota			
				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Mendapatkan data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah kusus	Pihak Desa/Pengurus RT / RW / Pemilik rumah sewa / rumah susun / rumah kusus	Data warga korban bencana rumah sewa, rumah susun dan rumah kusus
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	pemahaman kepada masyarakat korban bencana tentang kegiatan penyediaan dan rehabilitasi atau relokasi	Masyarakat korban bencana	terkendalinya situasi dan kondisi para korban bencana

				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Penanganan Korban bencana berupa rumah	Pengurus lingkungan / RT / RW dan warga korban bencana	Warga korban bencana yang berhak mendapatkan ganti rumah
3	Pasca Bencana	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Pengumpulan data warga korban bencana rehabilitasi rumah	Warga korban bencana	Jumlah warga korban bencana yang berhak mendapatkan ganti rumah
				2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Menentukan bentuk rumah dan fasilitas penunjang lainnya	Lahan pengganti rumah korban bencana	Bentuk rumah dan fasilitas penunjang lainnya bagi warga korban bencana

				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Menentukan lokasi lahan pengganti bagi warga korban bencana	Lahan pengganti rumah korban bencana	Tersedianya lahan pengganti bagi warga korban bencana
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pelaksanaan pembangunan rumah bagi warga korban bencana	Lahan pengganti rumah korban bencana	Tersedianya rumah ganti bagi warga korban bencana
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembangunan rumah dan PSU bagi warga korban bencana	Lahan pengganti rumah korban bencana	Tersedianya rumah dan PSU bagi warga korban bencana
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi	Warga korban bencana segera mendapatkan rumah pengganti	Warga korban bencana	Normalisasi kehidupan warga korban bencana

			ta		Program Kabupaten/ Kota			
				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Penyerahan legalitas rumah korban bencana	Warga korban bencana	Warga korban bencana mendapat legalitas rumah pengganti

KECAMATAN SIDOARJO						
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN

1	Pra Bencana	1	Pendataan Lokasi Rawan Bencana	1	Pemantauan situasi dan kondisi wilayah terkait infrastruktur yang mendukung untuk mengatasi terjadinya bencana Banjir di Kawasan Permukiman			
				2	Pembinaan Penyelenggaraan Sosialisasi bila terjadi Bencana di Lingkungan Permukiman			
		2	Pendataan Warga Kemungkinan Menjadi Korban Terjadi	1	Melaksanakan pendataan melalui Kader Linmas			

			Bencana	2	Sosialisasi kepada warga kemungkinan terdampak bencana			
				3	Memperkuat kelembagaan Masyarakat tanggap bencana			
				4	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadi bencana			
2	Saat Bencana	1	Identifikasi Lokasi Bencana dan Korban	1	Identifikasi Lokasi Bencana di lingkungan / Wilayah			
				2	Identifikasi dan Pemetaan Korban Bencana			

				3	Pengumpulan Data Wilayah / Lokasi Bencana			
				4	Pendataan Korban Bencana per Lokasi			
				5	Pendataan dan Verifikasi Data Korban			
				6	Pendataan dan Verifikasi Sarana Prasarana Kerusakan akibat bencana			
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan bantuan serta rencana Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi penyampaian Standar Bantuan kepada Korban			
				2	Rencana Relokasi Korban ke			

					Tempat Penampungan			
3	Pasca Bencana	1	Penyampaian bantuan kepada warga terdampak	1	Membantu Rehabilitasi Rumah Korban Bencana			
				2	Penyampaian bantuan Pangan kepada warga terdampak kena korban			
				3	Menyiapkan lokasi penampungan dan Dapur Umum			
				4	Pembangunan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana			

				5	Memberikan pelayanan Kesehatan bagi Warga terdampak bencana			
		2	Pendistribusian Bantuan	1	Pelaksanaan Pembagian bantuan kepada warga terdampak sesuai dengan kebutuhan yang layak			
				2	Penatausahaan kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan			

KECAMATAN GEDANGAN						
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN

1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Memberikan kepastian hukum atas peruntukan lahan sesuai dengan RT RW di masing-masing wilayah yang berada di kabupaten Sidoarjo	Daerah permukiman komersial, ruang terbuka hijau, daerah industri dan penataan saluran yang lebih baik	Tertatanya lahan sesuai dengan peruntukannya
				2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Memberikan arah yang jelas atas penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya	Permukiman penduduk yang sudah ada sebelumnya dan daerah permukiman baru (perumahan komersial)	Terciptanya tata ruang sesuai dengan Perda kabupaten Sidoarjo
		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Sebagai upaya untuk melakukan penataan wilayah yang lebih baik ke depannya dan tetap	Penataan permukiman secara menyeluruh dan terpadu	Terdatanya semua wilayah permukiman secara menyeluruh untuk dilakukan penataan secara berkelanjutan

						berpedoman pada RT RW kabupaten Sidoarjo		
				2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Memberikan ruang yag jelas dari setiap kegiatan penataan ruang di masing-masing wilayah sesuai dengan peruntukannya	Permukiman di area perumahan baru	Terciptanya tata ruang sesuai dengan Perda kabupaten Sidoarjo
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya fasilitas umum yang sudah ada	Fasum-fasum dan bangunan lainnya yang berfungsi untuk masyarakat	Terpenuhinya sarana umum yang di butuhkan masyarakat secara luas
				4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Evaluasi secara berkelanjutan sebagai upaya tindak lanjut untuk dilakukannya pemeliharaan	Bangunan yang mempunyai fungsi untuk kebutuhan hidup orang banyak	Terpeliharanya semua jenis bangunan dan lingkungan

						secara berkala		
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Memberikan arah yang jelas atas rekomendasi dari tim monitoring teknis atas kejadian atau bencana yang sedang terjadi	Rumah, fasilitas umum atau lingkungan yang tertimpa bencana	Tertatanya semua fasilitas umum secara baik dan terukur untuk segera di tindak lanjuti dalam penanganannya
				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Memberikan masukan kepad Tim Tanggap Bencana untuk memberikan masukan kepada tim teknis dalam setiap keputusan yang akan segera di tindak lanjuti	Permukiman yang ada baik di perkotaan maupun pedesaan yang tertimpa bencana	Terpenuhinya hasil rekomendasi dari tim teknis sebagi tindak lanjut penanganan bencana yang akan di lakukan

				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Sebagai upaya inventarisir untuk tindak lanjut penanganan dari setiap bencana yang telah terjadi	Semua permukiman dan fasilitas umum yang rusak akibat bencara yang telah terjadi	Tertanganinya semua permasalahan baik yang bersifat fisik dan non fisik secara baik dan menyeluruh
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tercukupinya semua data secara keseluruhan baik permukiman dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana	Masyarakat yang ada di permukiman yang terkena bencana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana yang telah terjadi	Terdatanya semua permukiman dan fasilitas umum yang terkena bencana
				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program	Sebagai tindak lanjut atas pendataan bagi masyarakat yang terkena musibah bencana yang telah terjadi	Semus masyarakat yang teridentifikasi dan benar-benar terkena musibah bencana alam	Tercukupinya semua hasil pendataan untuk segera di lakukan relokasi bagi masyarakat dan fasilitas umum yang terkena bencana alam

					Kabupaten/ Kota			
				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tercukupinya data yang telah terkumpul sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang telah telah terjadi	Masyarakat yang berdomisili di tempat fasilitas umum yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat lainnya yang juga tertimpa musibah di luar fasilitas umum yang telah di sediakan oleh pemerintah daeran	Terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal sementara atau pengungsian smmentara untuk segera di tindak lanjuti penanganan selanjutnya

		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Memberikan pemahanan atas bencana yang telah terjadi dan tindak lanjut pemerintah daerah untuk penanganan selanjutnya	Masyarakat umum dan fasilitas umum lainnya yang terkena musibah bencana alam	Terciptanya pemahaman yang sama atas musibah yang terjadi sebagai langkah awal upaya perbaikan dan relokasi permukiman baru kepada masyarkat yang tertimpa bencana alam
				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Memberikan pemahaman atas musibah yang terjadi dan tindak lanjut pnangannya	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam dan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam	Terjadinya pemahaman yang yang sama sebagai upaya perbaikan ke depannya
3	Pasca Bencana	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tercukupiya kebutuhan permukiman bagi masyarakat yang tertimpa musibah	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Tercukupinya perumahan dan fasilitas umum lainnya sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang telah terjadi

			Kabupaten/Kota	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Memberikan arah yang jelas dalam perencanaan ke depan setelah terjadinya bencana alam	Masyarakat umum, pengusaha perumahan (developer) dan masyarakat umum yang berkecimpung di usaha perumahan (kaplingan)	Terciptanya penataan perumahan yang terpadu dengan penciptaan lingkungan yang baik serta penataan fasilitas umum sebagai penunjang atau sebagai balancing dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mengarahkan dan memberikan lahan pengganti untuk masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang tertimpamusibah bencana alam	Terpenuhinya lahan untuk tempat tinggal bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam

				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mengarahkan dan memberikan pengganti permukiman bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyakarak umum yang ada di permukiman perkotaan dan masyarakat desa yang tertimpa musibah bencana alam	Tercukupinya kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal yang aman dan nyaman
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sebagai tindak lanjut awal untuk pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Masyarakat umum yang ada dipenampungan sementara dengan penyediaan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan yang ada di pengungsian sementara	Tercukupinya fasilitas umum yang di butuhkan di penampungan sementara yang di sediakan oleh pemerintah daerah
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Ko	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi	Sebagai upaya penataan awal dan berkelanjutan dalam bidang permukiman	Masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam	Tertanya permukiman yang baik dengan segala fasilitas umum yang harus di sediakan oleh pemerintah daerah

			ta		Program Kabupaten/ Kota			
				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Memberikan kepastian secara hukum atas hak kepemilikan lahan dan perumahan sebagai pengganti atas bencana alam yang telah terjadi	Masyarakat umum yang telah menerima lahan dan permukiman pengganti sebagai akibat dari bencana alam	Tertatanya hak atas kepemilikan lahan dan bangunan yang telah di ganti oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam

KECAMATAN SEDATI								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penguatan sarana dan prasarana	1	Penyediaan peralatan penunjang penanganan kebencanaan seperti Mobil	Penguatan wilayah kecamatan sedati dalam respon cepat bila terjadi	Warga Kecamatan Sedati	Penanganan bencana yang cepat

					operasional dan chainsaw kayu	bencana		
		2	Penyuluhan dan Himbauan	1	Acara forum kecamatan	Kesiapsiagaan pada potensi bencana banjir menjelang musim penghujan	Warga Kecamatan Sedati	Pemahaman warga terkait potensi bencana di wilayahnya
				2	Pemetaan	Pemetaan wilayah desa yang rawan bencana (Semampir,Gisik Cemandi, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, Segoro Tambak, Pepe dan Kwangsan)	Warga Kecamatan Sedati	Terpetakannya desa rawan bencana di Kecamata Sedati
				3	Monitoring	Deteksi dini bencana	Warga Kecamatan Sedati	Laporan terkait potensi bencana
2	Saat Bencana	1	Pendampingan	1	Terjun ke lokasi bencana	Meringankan beban warga terdampak	Warga Kecamatan Sedati	Warga mendapatkan pelayanan yang

						bencana		memadai
				2	Membantu pembersihan dengan instansi terkait	Memulihkan keadaan pasca bencana	Warga Kecamatan Sedati	Sarana dan prasarana warga dapat terpenuhi kembali
				3	Pendataan kebutuhan untuk penanganan awal bencana			
3	Pasca Bencana	1	Administrasi	1	Pendataan	Pendataan warga terdampak bencana	Warga Kecamatan Sedati	Tersedianya data jumlah penduduk yang memerlukan penanganan rehabilitasi
				2	Formulasi kebutuhan pemulihan warga / wilayah terdampak	Mendata kebutuhan untuk pemulihan kondisi warga	Warga Kecamatan Sedati	Data warga terdampak bencana
				3	Pelaporan	Pelaporan kegiatan pasca bencana	Warga Kecamatan Sedati	Laporan

KECAMATAN TAMAN								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Mengurangi Jalan Berlubang	Perbaikan Jalan Yang Berlubang dengan Aspal	Perbaikan Jalan yang berlubang telah diaspal
				2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Mengetahui dan dapat mengimplementasikan	Agar Setiap Program dapat diketahui oleh Masyarakat
		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganny a di Daerah	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan	Tertata Dengan Tertib dan Berizin	Bangunan yang semrawut dan tidak berizin	Dapat diketahui secara umum

			Kabupaten/Kota		Lingkungan			
				2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Fasum/Fasos tertata dengan tertib	Fasum dan Fasos dapat diketahui kejelasan keberadaannya	tertata dengan tertib dan berizin
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Sosialisasi	Aset Desa/Kel maupun aset pemda	Dapat dianggarkan perawatan dan pemeliharaannya
				4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Monev	Aset, Fasum, dan Fasos	Dalam dianggarkan perawatan dan pemeliharaan
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Survey	Relokasi Program	Dapat Bantuan Anggaran

				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Survey	Relokasi Program	Dapat Bantuan Anggaran
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terdatanya rumah korban bencana dan tertangani	Rumah Penduduk	Termonitoring data rumah korban dan tertangani
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Mengetahui data kerusakan rumah akibat bencana	Rumah Akibat Bencana	Tertangani rumah korban akibat bencana
				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau	Terdata dan terverifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam	Rumah Akibat Bencana	Terdata dan terverifikasi

					Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota			
				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terdaftar di tiap-tiap RS MM dan RS/RK	Pendataan	Terdata dengan baik
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Sosialisasi	Masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)

				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Rembug Warga	Penerima bagi korban bencana	Satgas
3	Pasca Bencana	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi	Rumah Bagi Korban Bencana	Mendapatkan Bantuan Anggaran rehabilitasi
				2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sosialisasi dan Rakor	Rumah Korban Bencana	Relokasi dan Realisasi rumah korban bencana
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah	Sosialisasi dan Rembug Warga	Rumah Korban Bencana	Mengetahui informasi dan berita

					bagi Korban Bencana			
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Realisasi Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rumah Bagi Korban Bencana	Relokasi dan Realisasi rumah korban bencana
				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Relokasi Lahan	Korban Bencana	Realisasi rumah
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rumah Layak Huni	Korban Bencana	Realisasi rumah Korban Bencana

				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rumah Layak Huni	Korban Bencana	Relokasi dan Realisasi rumah layak huni bagi korban bencana

KECAMATAN SUKODONO								
NO	TAHAP	NAMA KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TUJUAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	Pra Bencana	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Wilayah Kecamatan Sukodono	1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Wilayah Kecamatan Sukodono	Melatih/mendidik warga Masyarakat sigap dalam menghadapi bencana	19 Desa	Menjadi desa tangguh dalam menghadapi bencana alam

				2	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Wilayah Kecamatan Sukodono	Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat bila terjadi bencana		
		2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Wilayah Kecamatan Sukodono	1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kewaspadaan Dini /kesiapan warga masyarakat terhadap bencana		
				2	Penataan Bangunan dan Lingkungan			
				3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
				4	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan			

					Lingkungan			
		3	dst		dst			
2	Saat Bencana	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota			
				2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			
				3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum			

					Tertangani			
				4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			
				5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			
				6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah			

					Susun dan Rumah Khusus			
		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana			
				2	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana			
		3	dst		dst			
3	Pasca Bencana	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			

			Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			
				3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
				4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			

				5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			
		2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			

				2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Relokasi Program Wilayah Kecamatan Sukodono			
		3	dst		dst			

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keadaan wilayah yang sangat kompleks. Dilihat dari kondisi geografis, geologi, hidrologi, dan demografi yang beranekaragam. Kondisi tersebut membuat Indonesia mempunyai potensi untuk terjadinya berbagai bencana yang beranekaragam, baik yang disebabkan oleh faktor alam, maupun faktor manusia. Seluruh potensi bencana dapat menimbulkan dampak korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, mapun kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana merupakan suatu kejadian alam yang tidak dapat diprediksi waktu terjadinya, namun dampaknya dapat dikurangi melalui upaya pengurangan risiko bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah mengamanatkan setiap daerah memiliki perencanaan penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut didukung dengan adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Perka BNPB tersebut memberikan suatu pola dalam upaya pengurangan risiko bencana yaitu dengan melakukan pengkajian risiko terhadap potensi bencana yang mengancam suatu wilayah sedangkan secara metodologi pengkajian risiko bencana telah ditentukan dalam Risiko Bencana Indonesia yang telah dibuat oleh BNPB.

1.1. LATAR BELAKANG

Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa daerah ini rawan bencana. Dalam rentang tahun 2000 sampai tahun 2017, Kabupaten Sidoarjo telah mengalami 17 kali kejadian bencana (sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia, BNPB dan data BPBD Kabupaten Sidoarjo). Kejadian bencana tersebut meliputi banjir, banjirbandang, gempabumi, tanahlongsor, Tsunami, dan CuacaEkstrim. Kejadian bencana Banjir merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi. Kejadian bencana-bencana yang pernah terjadi menimbulkan dampak negatif, baik itu korban jiwa, harta benda maupun lingkungan/lahan yang rusak serta dampak psikologis bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Melihat besarnya jumlah kejadian dan dampak yang ditimbulkan dari bencana, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan memiliki penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, sehingga potensi bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan melakukan pengkajian risiko terhadap potensi bencana yang ada.

Wujud nyata dari penyusunan pengkajian risiko bencana Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021. Dokumen tersebut dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah ataupun lapisan masyarakat untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan bersumber

dan dasar acuan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait lainnya di tingkat nasional, perhitungan metodologi pengkajian didasarkan pada kondisi nyata terkini daerah dan aturan-aturan terkait daerah terhadap bencana. Perhitungan tersebut meliputi komponen-komponen yang mempengaruhi munculnya risiko bencana, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana. Fokus pengkajian setiap komponen adalah untuk mendapatkan tingkat serta potensi besaran dampak yang ditimbulkan dari setiap kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo. Keseluruhan pengkajian risiko bencana yang dimuat dalam Dokumen KRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana lima tahunan di Kabupaten Sidoarjo.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen kajian Risiko bencana Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 – 2022 adalah;

a) Mengidentifikasikan risiko bencana di Kabupaten Sidioarjo dan menuangkannya dalam peta risiko benca dengan skala 1 : 50.000;
b) Menjadi landasan dasar bagi Kabupaten sidoarjo dalam menyusun rencana dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dengan perencanaan pembangunan di daerah Sidoarjo;
c) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, pegiat kebencanaan dan sector swasta di Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun program/aksi-aksi praktis untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana, seperti ; penyusunan rencana kontijensi, membuat rencana dan jalur evakuai, penentuan lokasi dan akses untuk tempat tinggal yang aman dari bencana, mementukan lokasi yang aman sebagai tempat pengungsian masyarakat saat terjadi bencana di Kabupaten Sidoarjo;
d) Menjadi landasan dasar bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mengarusutamakan penanggulangan bencana lintas sektor

1.3. RUANG LINGKUP

Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 – 2022 disusun dalam batasan dan lingkup sebagaimana berikut ;

1. Pengkajian tingkat bahaya;
2. Pengkajian tingkat kerentanan;
3. Pengkajian tingkat kapasitas;
4. Pengkajian tingkat risiko;
5. Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana.

1.4. LANDASAN HUKUM

Dasar dalam penyusunan dokumen KRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 – 2022 menggunakan landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 Tahun 2010, tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)

5. Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
8. Permendagri No. 27 tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur.
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).
14. Peraturan Kepala BNBP No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
16. Peraturan Kepala BNBP No. 01 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
17. Peraturan Kepala BNBP No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
18. Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
19. Peraturan Kepala BNBP No. 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman Bantuan Logistik
20. Peraturan Kepala BNBP No. 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
21. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1.5. PENGERTIAN

Untuk memahami dokumen KRB Kabupaten Sidoarjo , maka perlu disajikan beberapa pengertian sebagai berikut;

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

4. Indikator Ketahanan Daerah adalah indikator penilaian tingkat kapasitas dan ketahanan suatu daerah dalam penanggulangan bencana.
5. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
6. Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
7. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
8. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pengurangan Risiko Bencana adalah upaya untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
13. Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
14. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
18. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.
19. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
23. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataumasyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen kajian risiko bencana ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang secara umum dimuat dalam panduan pengkajian risiko bencana. Dalam penyusunan dokumen ini dijabarkan melalui outline// kerangka penulisan mengikuti struktur penulisan sebagai berikut;

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif memaparkan seluruh hasil pengkajian dalam bentuk rangkuman dari tingkat risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, ringkasan ini juga memberikan gambaran umum berbagai rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh Kabupaten Sidoarjo untuk menekan risiko bencana di daerah tersebut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menekankan arti strategis dan pentingnya pengkajian risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo. Penekanan perlu pengkajian risiko bencana merupakan dasar untuk penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, terarah, dan terpadu dalam pelaksanaannya.

Bab II : Kondisi Kebencanaan

Memaparkan kondisi wilayah yang pernah terjadi dan berpotensi terjadi yang menunjukkan dampak bencana yang sangat merugikan (baik dalam hal korban jiwa maupun kerugian ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan). Selain itu, secara singkat juga memaparkan data sejarah kebencanaan dan potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo yang didasari oleh data dan informasi bencana Indonesia 2016, Inarisk 2017 dan rekapitulasi daerah.

Bab III : Pengkajian Risiko Bencana

Bab pengkajian risiko bencana berisi hasil pengkajian risiko bencana untuk setiap bencana yang ada di Kabupaten Sidoarjo, memaparkan indeks dan

tingkat bahaya, penduduk terpapar, kerugian fisik, ekonomi, kerusakan lingkungan, dan kapasitas untuk setiap bencana di lingkup kajian.
Bab IV : Rekomendasi
Bagian ini menguraikan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah sesuai kajian tingkat kapasitas daerah berdasarkan PERKA BNPB Nomor 3 Tahun 2012 (melalui pedekatan 71 Indikator ketahanan daerah) dan kesiapsiagaan tingkat kelurahan/desa. Rekomendasi yang dijabarkan berupa rekomendasi kebijakan administratif dan rekomendasi kebijakan teknis.
Bab V : Penutup
Memaparkan hasil akhir kajian dan kesimpulan dari penyusunan dokumen KRB Kabupaten Sidoarjo serta kemungkinan tindak lanjut dari dokumen yang disusun.

BAB II
KONDISI KEBENCANAAN

Secara garis besar, gambaran umum kebencanaan di Kabupaten Sidoarjo dijabarkan menjadi beberapa aspek yaitu gambaran umum wilayah, sejarah kejadian bencana dan potensi bencana. Gambaran umum wilayah memaparkan kondisi daerah berdasarkan aspek geografis, topografi, iklim, dan demografi. Sejarah kejadian bencana merupakan bencana-bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan potensii bencana merupakan prediksi bencana-bencana yang berkemungkinan terjadi. Dari ketiga aspek tersebut akan dibahas lebih mendalam pada pembahasan berikut.

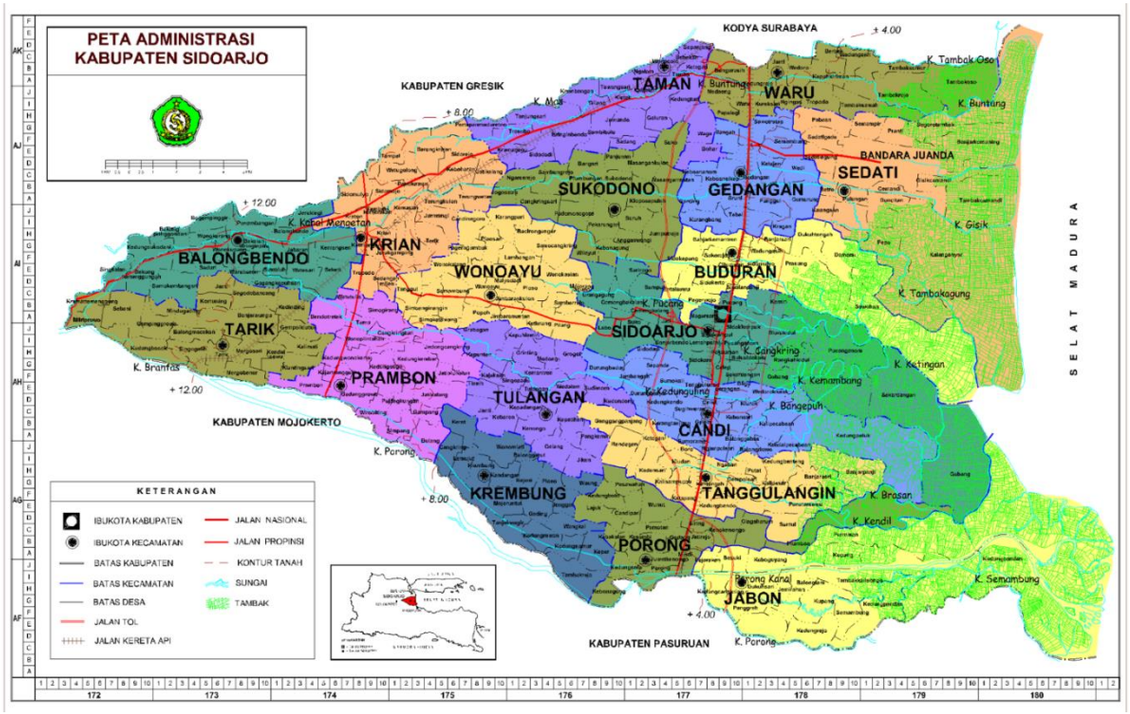
2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran umum wilayah Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah dalam pengkajian risiko bencana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi. Dari kondisi wilayah, diperoleh potensi luas daaerah dan jumlah penduduk terdampak bencana serta potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Sidoarjo.

1. 2.1.1. Geografis

Kabupaten Sidoarjo berada diantara dua sungai, sehingga terkenal dengan seuta kota “Delta”. Kabupaten Sidoarjo terletak Antara 11,25 – 112,9 ° BT dan 7,3 – 7,5 ° LS, dengan luas wilayah 714.243 Km2, 40,81 persennya terletak di ketinggian 3-10 m yang berada dibagian tengah dan berair tawar, 29,99 persen ketinggian 0-3 m berada di sebalah timur merupakan daerah pantai dan pertambakan, 29,20 persn terletak di ketinggian 10-25 m di again barat. Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan;
Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
Timur: Selat Madura
Selatan : Kabupaten Pasuruan
Barat : Kabupaten Mojokerto
Letak yang berada di sekitar garis khatulistiwa membuat Kabupaten Sidoajo mengalami dua musim, musim kemarau dan musim hujan, dimana musim kemarau berkisar antara bulan Juli hingga Oktoer dan musim penghujan pada bulan November sampai dengan Juni.

Untuk mengetahui secara jelas batas adminitrasi Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar peta administrasi berikut ini ;



Gambar.1. Peta AdministrasiKabupatenSidoarjo

SecarageografikabupatenSidoarjoterbagidalam 18 kecamatandenganluas wilayah yang berbeda-beda. Berikut table yang menjelaskanjumlahkecamatan dan luaswilayahnya masing-masing.

Tabel 1. JumlahKecamatan dan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilyah (km2)
1	Sidoarjo	62.560
2	Buduran	41.025
3	Candi	40.668
4	Porong	29.823
5	Krembung	29.550
6	Tulangan	31.205
7	Tanggulangin	32.290
8	Jabon	80.998
9	Krian	32.500
10	Balongbendo	31.400
11	Wonoayu	33.920
12	Tarik	36.060
13	Pramon	34.225
14	Taman	31.535
15	Waru	30.320
16	Gedangan	24.058
17	Sedati	79.430
18	Sukodono	32.678

SumberSidoarjodalamangka 2017

2. 2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk KabupatenSidoarjo mengalami perubahan setiap tahunnya. Sensuspendudukterakhirdilaksanakantahun 2010, denganjumlahpenduduktercatatsebanyak 1.945.252 jiwa. Terjadikenaikansebesar 382.237 jiwaatau 24, 45 % darihasilsensuspenduduktahun 2000.

Hasil registrasi penduduk Dinas Catatan Sipil tahun 2016, mencatat bahwa jumlah penduduk sebanyak 2.223.002 jiwa, mengalami kenaikan 49,93% dibandingkan tahun 2015, dengan rincian sebanyak 1.121.442 jiwa penduduk laki-laki dan 1.101.560 jiwa penduduk penduduk perempuan. Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo untuk masing-masing kecamatan.

Tabel .2. Kecamatan dan JumlahPenduduk di tiapKecamtan

No	Kecamatan	Jumlah Total (jiwa)
1	Sidoarjo	225.046
2	Buduran	104.039
3	Candi	161.952
4	Porong	88.191
5	Krembung	73.800
6	Tulangan	102.328
7	Tanggulangin	107.127
8	Jabon	61.015
9	Krian	134.923
10	Balongbendo	78.803
11	Wonoayu	87.032
12	Tarik	70.939
13	Prambon	83.324
14	Taman	233.458
15	Waru	242.004
16	Gedangan	133.379
17	Sedati	108.214
18	Sukodono	127.428
Total		2.223.002

SumberSidoarjodalamangka 2017

Tabel 2 memperlihatkan bahwa sebaran penduduk di Kabupaten Sidoarjo tidak merata. Sebaran jumlah penduduk di setiap wilayah administrasi berpengaruh pada dampak dari kejadian bencana. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dasar dalam perhitungan pengkajian risiko bencana yang terkait potensi jiwa terpapar

3. 2.1.3.Topografi

Secara Topografi kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa lapisan batuan. Batuan Alluvium seluas 686,89 km2 tersebar di semua kecamatan, akan tetapi untuk lapisan batuan pliston fasies sediman hanya terdapat di 6 kecamatan, yaitu kecamatan Sidoarjo, Buduran, Taman, Waru, Gedangan dan Sedati.

Sedangkan lapisan tanah untuk tanah alluvial kelabu merata di 18 kecamatan seluas 470,18 km2. Lapisan tanah jenis As Allluvial kelabu dan coklat kekuningan hanya ada di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Krembung, Balongbendo, Tarik dan Prambon masing-masing 4;54, 27;95, 9,87 dan 7,33 km2

4. 2.1.4.Iklim

Secara Klimatologi, KabupatenSidoarjo seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur.Lokasi penakaranhujanada di 30 titik yang berbeda, tersebar pada 18 kecamtan di Sidoarjo yang mencatat rata-rata

curahhujantertinggiterjadi pada bulanFebruari dan terendah di bulanagustus.
Kelembabab, tekanan dan suhu udara di bandara Juanda dan sekiarnya cenderung stabil sepanjang bulan, tetapi arah dan kecepatan angina cukup fluktuatif pada tiap bulannya.

2.2. SEJARAH KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO

Untuk melihat kejadian bencana di kabupatenSidoarjo, maka perlu dilakukan pencarian data kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan data BPBD KabupatenSidoarjobahwadalamrentangtahun 2000 – 2017 kabupatenSidoarjotelahmengalami 7 (tujuh) jenisbencanayaitu ; Banjir, Banjir Bandang, CuacaEkstrim, GelombangEkstrim Dan Abrasi, GempaBumi, KebakaranHutan dan Lahan, sertaKekeringan. Bencana terjadi tersebutmemberikan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Bencana tersebut dapat dilihat padaTabelberikut;

Tabel.3. Sejarah KejadaianBencanaKabupatenSidoarjo

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	HILANG	LUKA-LUKA	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN (HA)
1	Banjir	41	0	0	0	6,112	0	985	0
2	Cuaca Ekstrim	36	1	1	46	162	104	1,130	0
3	Kekeringan	4	0	0	0	0	0	0	0
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL KEJADIAN		82	1	1	46	6274	104	2115	0

Sumber: Data Dan Informasi Data Indonesia (DIBI) dan Data BPBD Kabupaten SulaTahun 2000-2017

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa pada rentang waktu 2000-2017, secara keseluruhan Kabupaten Sidoarjotelah mengalami 82 kali kejadian dengan 4 (empat) jenis bencana. Dari 4 (empat) jenis bencana tersebut bencana cuacaekstrim yang paling seringterjadiyaitusebanyak 36 (tigapuluhenam) kali, sementarabencanayang mempunyai jumlah kejadian sedikit yaitu kebakaranhutan dan lahan yaitusebanyak 1 (satu) kali.

2.3. POTENSI BENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO

Potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui berdasarkan sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi dan di analisa menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis. Berdasarkan sejarah kejaidan bencana diketahui potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo yaitu Banjir, BanjirBandang, CuacaEkstrim, GelombangEkstrim dan Abrasi, KebakaranHutan dan Lahan, Kekeringan dan GempaBumi.. Namun tidak menutup kemungkinan potensi bencana lain dapat terjadi di Kabupaten Sidoarjo mengingat faktor–faktor kondisi daerah sehingga analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografi untuk memetakan potensi bencana berdasarkan faktor–faktor kondisi daerah. Jumlah potensi bencana di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan sejarah kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG diikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan di daerah. Bencana yang berpotensi di KabupatenSidoarjo Banjir, BanjirBandang, CuacaEkstrim, GelombangEkstrim dan Abrasi, KebakaranHutan dan Lahan, Kekeringan dan GempaBumi.

Keseluruhanpotensibencana di KabupatenSidoarjoberjumlah 7 (Tujuh) bencana. Tujuhpotensibencana di KabupatenSidoarjotersebutdilaksanakandalampengkajianrisikobencanaKabu

patenSidoarjountuktahun 2018 sampaitahun 2022. Penjabaranlengkapterkaithasilpengkajianseluruhpotensibencana di KabupatenSidoarjo pada bab-babberikutnya.

BAB III
PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada (Risiko Bencana Indonesia, 2016). Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam pelaksanaannya, pengkajian risiko menggunakan rumus umum sebagai berikut :

$$R \approx H * \frac{V}{C}$$

Keterangan:
R :Disaster Risk : Risiko Bencana.
H:Hazard Threat : Frekuensi (kemungkinan) bencana tertentu cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi tertentu.
V :Vulnerability: Kerugian yang diharapkan (dampak) di daerah tertentu dalam sebuah kasus bencana tertentu terjadi dengan intensitas tertentu. Perhitungan variabel ini biasanya didefinisikan sebagai pajanan (penduduk, aset, dll) dikalikan sensitivitas untuk intensitas spesifik bencana.
C :Adaptive Capacity: Kapasitas yang tersedia di daerah itu untuk pulih dari bencana tertentu.
Proses pengkajian risijo bencana harus memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya:

1. Menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada, dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang;
2. Melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
3. Proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar;
4. Hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana.
5. (Risiko Bencana Indonesia, 2016)

Sedangkan beberapa kriteria yang digunakan dalam pemanfaatan data untuk kajian ini adalah:

a) Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis di tingkat kabupaten, yaitu skala peta minimal adalah 1:50.000.
b) Data yang ada harus dapat digunakan untuk menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa), menghitung nilai kerugian harta benda (dalam rupiah), dan menghitung luas kerusakan lingkungan (dalam hektar) dengan menggunakan analisa Grid GIS 1 ha dalam pemetaan risiko bencana.
c) Dapat digunakan dalam perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah

3.1 METODOLOGI

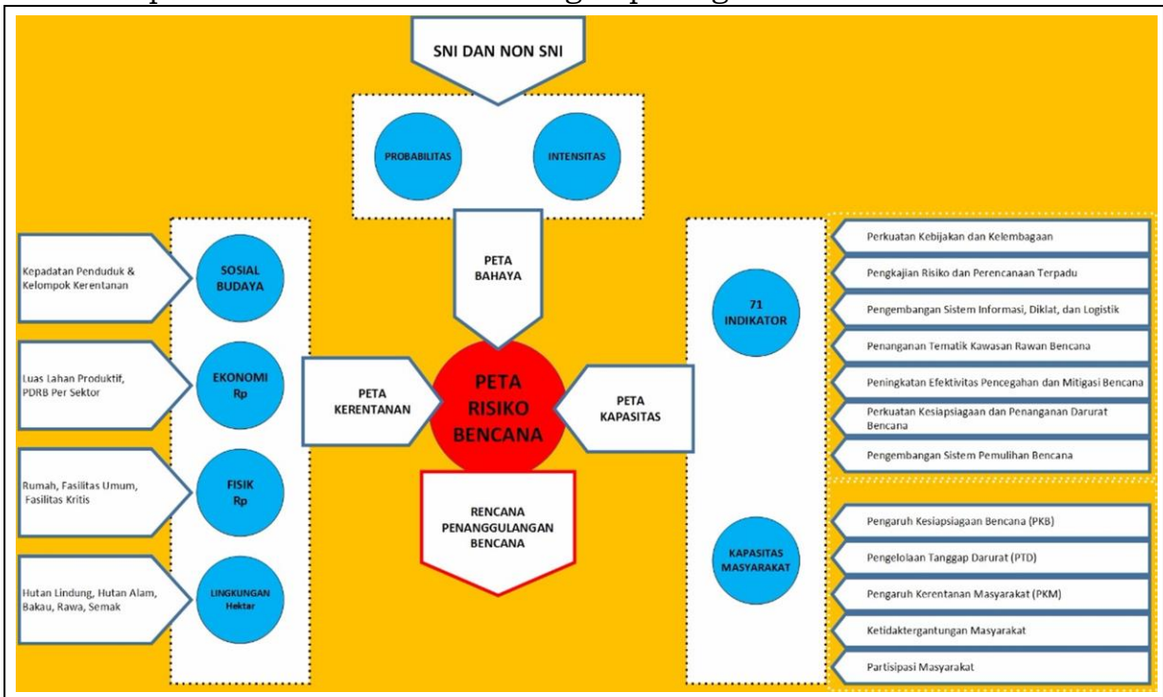
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai institusi aktif dalam kebencanaan tingkat nasional terus melakukan pengembangan terhadap pengkajian risiko bencana. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di tingkat kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Diharapkan kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar acuan bagi daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Pengembangan kebijakan ini harus diselaraskan dengan metodologi pengkajian risiko bencana yang sudah disusun oleh BNPB. Aturan yang telah disebutkan pada praragraf sebelumnya memuat dasar untuk pelaksanaan pengkajian risiko bencana terkait dengan metode pengkajian risiko bencana dan dasar parameter yang digunakan untuk perhitungan bahaya, kerentanan, dan kapasitas masing-masing bencana yang berpotensi di Kabupaten Sidoarjo.

Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan komponen bahaya, kerugian dan kapasitas yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan peta risiko bencana. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerugian disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter sebagai berikut

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik.
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Hal ini dapat dilihat dalam bentuk bagan pada gambar berikut.



Sumber : Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012

Gambar 2. Metode Pengkajian Risiko Bencana

Upaya pengkajian risiko bencana menentukan 3 (tiga) komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun nominal agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah.

Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana di daerah. Upaya pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan di Kabupaten Sidoarjo berupa:

1. Memperkecil ancaman kawasan;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pengkajian risiko bencana dilakukan dengan melakukan identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah yaitu:

A. PengkajianBahaya

Pengkajian bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

B. PengkajianKerentanan

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

C. PengkajianKapasitas

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

D. Pengkajian dan PemeringkatanRisiko

Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana.

Secara umum metodologi pengkajian risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo ini telah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, dimulai dari pengambilan data- data terkait. Data terkait yang dimaksud, beberapa diantaranya adalah Indikator Ketahanan Daerah, Survey Kesiapsiagaan, data demografis, data geografis, dan topografis. Data ini diambil langsung dari daerah dalam beberapa tahapan dan dilengkapi dengan data-data yang tersedia secara nasional. Data ini diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian risiko bencana. Dari hasil indeks ini maka disusunlah peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana.

Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimpulkan menjadi sebuah tingkat yang menjadi rekapitulasi dari hasil kajian risiko bencana di suatu daerah.

3.2. INDEKS PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan indeks-indeks yang telah ditentukan. Indeks tersebut terdiri dari indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Indeks-indeks tersebut amat bergantung pada jenis ancaman bencana, kecuali untuk indeks kapasitas. Indeks kapasitas difokuskan kepada kapasitas institusi pemerintah dan masyarakat di wilayah yang sedang dikaji. Ini membuat indeks kapasitas tidak terlalu bergantung pada jenis ancaman bencana

3.2.1 Bahaya

Indeks bahaya merupakan komponen penyusun peta bahaya suatu daerah. Indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi di suatu daerah. Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi. Dari potensi bencana yang ada maka dapat diperkirakan potensi besaran luas bahaya terdampak bencana. Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah (0 - 0,333), sedang (>0,333 - 0,666) dan tinggi (>0,666 - 1).

Pengkajian bahaya di Kabupaten Sidoarjo dilakukan untuk mengetahui potensi luas bahaya dan kelas bahaya serta peta bahaya setiap potensi bencana. Peta bahaya dan detail kajian bahaya per kelurahan dapat dilihat pada Album Peta Risiko Bencana Kabupatrn Sidoarjo. Sedangkan rekapitulasi kajian bahaya untuk Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Sidoarjo

JENIS BAHAYA	BAHAYA	
	TOTAL LUAS	KELAS
BANJIR	71.252	TINGGI
BANJIR BANDANG	973	TINGGI
CUACA EKSTRIM	71.246	TINGGI
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	215	SEDANG
GEMPABUMI	71.256	RENDAH
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	1.694	TINGGI
KEKERINGAN	71.256	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Hasil rekapitulasi kelas indeks bahaya di atas menunjukkan bencana di Kabupaten Sidoarjo berada pada kelas tinggi hingga rendah. Bencana dengan kelas bahaya tinggi yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, dan letusan Gunung Api Sinabung. Untuk tanah longsor kelas bahayanya sedang. Terakhir, bencana dengan kelas bahaya cuaca ekstri, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan.

Pengkajian bahaya tersebut dilakukan hingga tingkat desa di Kabupaten Sidoarjo. Rekapitulasi hasil kajian bahaya tingkat desa menghasilkan kajian bahaya tingkat kecamatan. Adapun hasil kajian bahaya tingkat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo untuk setiap jenis bencananya dijabarkan sebagai berikut.

3.2.1.1 Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius.

Potensi bencana banjir dikaji berdasarkan parameter-parameter dalam pengkajian risiko bencana, parameter tersebut adalah:

1. Daerah rawan banjir dan kemiringan lereng, data yang digunakan DEM AVG30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
2. Jarak dari sungai, data yang digunakan jaringan sungai dengan sumber data BIG Tahun 2013
3. Curah hujan, data yang digunakan curah hujan wilayah dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016

Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Sidoarjo, seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS	KELAS
1	BALONGBENDO	3.140	TINGGI
2	BUDURAN	4.103	TINGGI
3	CANDI	4.068	TINGGI
4	GEDANGAN	2.406	SEDANG
5	JABON	8.098	TINGGI
6	KREMBUNG	2.954	SEDANG
7	KRIAN	3.250	TINGGI
8	PORONG	2.982	TINGGI
9	PRAMBON	3.422	TINGGI
10	SEDATI	7.943	TINGGI
11	SIDOARJO	6.256	TINGGI
12	SUKODONO	3.097	SEDANG
13	TAMAN	3.155	TINGGI
14	TANGGULANGIN	3.228	TINGGI
15	TARIK	3.605	SEDANG
16	TULANGAN	3.121	TINGGI
17	WARU	3.032	SEDANG
18	WONOAYU	3.392	TINGGI
TOTAL KABUPATEN SIDOARJO		71.252	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 4 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya banjir di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 18 kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 71.252 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3.2.1.2 BanjirBandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris

bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

Pengkajian bahaya banjir bandang di Kabupaten Sidoarjo dilakukan berdasarkan parameter bahaya banjir bandang, yaitu:

a) Sungai utama, data yang digunakan adalah jaringan sungai dengan sumber data BIG Tahun 2013
b) Topografi, data yang digunakan adalah DEM AVG 30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
c) Potensi longsor di hulu sungai, data yang digunakan adalah peta bahaya tanah longsor dengan sumber data USGS Tahun 2000 dan PVMBG Tahun 2010

Dari parameter bahaya banjir bandang tersebut, maka dapat ditentukan luas terpapar bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Luas bahaya banjir bandang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS	KELAS
1	JABON	587	TINGGI
2	KREMBUNG	63	TINGGI
3	PORONG	272	TINGGI
4	TARIK	52	TINGGI
TOTAL KABUPATEN SIDOARJO		973	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 5 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir bandang. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 4 kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir bandang di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 973 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3.2.1.3 CuacaEkstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer.

Perhitungan potensi bahaya cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter berikut:

1. Keterbukaan lahan, data yang digunakan peta penutupan/penggunaan lahan dengan sumber data KEMENLHK Tahun 2016
2. Kemiringan lereng, data yang digunakan DEM AVG 30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
3. Curah hujan tahunan, data yang digunakan peta curah hujan tahunan dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016

Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Sidoarjo, seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS	KELAS
1	BALONGBENDO	3.139	TINGGI
2	BUDURAN	4.103	TINGGI
3	CANDI	4.067	TINGGI
4	GEDANGAN	2.406	TINGGI
5	JABON	8.098	TINGGI
6	KREMBUNG	2.955	TINGGI
7	KRIAN	3.249	TINGGI
8	PORONG	2.983	TINGGI
9	PRAMBON	3.424	TINGGI
10	SEDATI	7.939	TINGGI
11	SIDOARJO	6.255	TINGGI
12	SUKODONO	3.097	TINGGI
13	TAMAN	3.154	TINGGI
14	TANGGULANGIN	3.227	TINGGI
15	TARIK	3.606	TINGGI
16	TULANGAN	3.121	TINGGI
17	WARU	3.030	TINGGI
18	WONOAYU	3.392	TINGGI
TOTAL KABUPATEN SIDOARJO		71.246	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 6 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 18 kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 71.246 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3.2.1.4 GelombangEkstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id).

Pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan parameter sebagai alat ukutnya. Parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi serta sumber data yang digunakan

a) Tinggi gelombang, menggunakan data tinggi gelombang maksimum tahun 2010-2015 dengan sumber data dari BIG,
b) Arus, menggunakan data arus tahun 1992-2015 berdasarkan sumber dari NOAA,
c) Tipologi pantai, menggunakan data peta tipologi pantai tahun 2013 dengan sumber informasi dari BIG,
d) Tutupan vegetasi, menggunakan data peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2016 dengan sumber data dari KEMENLHK, dan
e) Bentuk garis pantai, menggunakan data garis pantai tahun 2014 berdasarkan data dari BPS.

Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagai berikut.

Tabel 7. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS	KELAS
1	BUDURAN	5	SEDANG
2	JABON	85	SEDANG
3	SEDATI	113	SEDANG
4	SIDOARJO	11	SEDANG
5	WARU	1	SEDANG
TOTAL KABUPATEN SIDOARJO		215	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 7 di atas menampilkan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 5 kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 215 Ha yang berada pada kelas sedang. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3.2.1.5 GempaBumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Pengkajian bahaya gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo dilakukan berdasarkan parameter bahaya gempa bumi, yaitu:

a. Kelas topografi, data yang digunakan DEM AVG30, sumber data ALOS Tahun 2000
b. Intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan, data yang digunakan peta zona gempa bumi (s1 1.0” di SB untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (redaman 5%) dengan sumber data JICA Tahun 2015

Dari hasil analisa kondisi daerah terhadap setiap parameter tersebut, dapat ditentukan potensi bahaya gempa bumi Kabupaten Sidoarjo. Luas bahaya gempa bumi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS	KELAS
1	BALONGBENDO	3.140	RENDAH
2	BUDURAN	4.103	RENDAH
3	CANDI	4.067	RENDAH
4	GEDANGAN	2.406	RENDAH
5	JABON	8.101	RENDAH
6	KREMBUNG	2.955	RENDAH
7	KRIAN	3.249	RENDAH
8	PORONG	2.983	RENDAH
9	PRAMBON	3.424	RENDAH
10	SEDATI	7.943	RENDAH
11	SIDOARJO	6.256	RENDAH
12	SUKODONO	3.097	RENDAH
13	TAMAN	3.154	RENDAH
14	TANGGULANGIN	3.228	RENDAH
15	TARIK	3.606	RENDAH
16	TULANGAN	3.121	RENDAH
17	WARU	3.031	RENDAH
18	WONOAYU	3.392	RENDAH
TOTAL KABUPATEN SIDOARJO		71.256	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 8 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 18 kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo total luas bahaya adalah 71.256 Ha yang berada pada kelas rendah. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

5. 3.2.1.6 KebakaranHutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (ground fire), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan parameter berikut:

a. Jenis hutan dan lahan, data yang digunakan peta penutupan/penggunaan lahan dengan sumber data KEMENLHK Tahun 2016
b. Iklim, data yang digunakan peta curah hujan tahunan dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016
c. Jenis tanah, data yang digunakan peta jenis tanah dengan sumber data BBSDLP Tahun 2015

Berdasarkan parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo, seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	BAHAYA

		TOTAL LUAS	KELAS
1	BALONGBENDO	73	SEDANG
2	BUDURAN	60	SEDANG
3	CANDI	120	SEDANG
4	GEDANGAN	47	SEDANG
5	JABON	398	SEDANG
6	KREMBUNG	98	SEDANG
7	KRIAN	49	SEDANG
8	PORONG	68	SEDANG
9	PRAMBON	40	SEDANG
10	SEDATI	36	SEDANG
11	SIDOARJO	135	SEDANG
12	SUKODONO	145	SEDANG
13	TAMAN	52	SEDANG
14	TANGGULANGIN	97	SEDANG
15	TARIK	93	SEDANG
16	TULANGAN	72	SEDANG
17	WARU	10	TINGGI
18	WONOAYU	100	SEDANG
TOTAL KABUPATEN SIDOARJO		1.694	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 9 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 18 kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo, total luas bahaya adalah 1.694 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3.2.17 Kekeringan

Kekeringan merupakan suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap ekosistem dan pertanian dari daerah yang terkena bencana kekeringan. Rawan kekeringan adalah kurun waktu kekeringan yang relatif lebih lama dari biasanya, atau kurang dari 50% curah hujan lebih sedikit dari rata-rata dalam kurun waktu tiga bulan. Kekeringan menyangkut neraca air antara presipitasi dan evapotranspirasi. Kekeringan tidak hanya dilihat sebagai fenomena fisik cuaca saja, tapi juga sebagai fenomena yang terkait dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air.

Parameter yang digunakan adalah kekeringan meteorologi data yang digunakan curah hujan bulanan (CHIRPS periode 1986–2016) dari sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016.

Berdasarkan perhitungan parameter bahaya kekeringan, dapat ditentukan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan parameter bahaya kekeringan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Sidoarjo, seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	BAHAYA

		TOTAL LUAS	KELAS
1	BALONGBENDO	3.140	SEDANG
2	BUDURAN	4.103	SEDANG
3	CANDI	4.067	SEDANG
4	GEDANGAN	2.406	SEDANG
5	JABON	8.101	SEDANG
6	KREMBUNG	2.955	SEDANG
7	KRIAN	3.249	SEDANG
8	PORONG	2.983	SEDANG
9	PRAMBON	3.424	SEDANG
10	SEDATI	7.943	SEDANG
11	SIDOARJO	6.256	SEDANG
12	SUKODONO	3.097	SEDANG
13	TAMAN	3.154	SEDANG
14	TANGGULANGIN	3.228	SEDANG
15	TARIK	3.606	SEDANG
16	TULANGAN	3.121	SEDANG
17	WARU	3.031	SEDANG
18	WONOAYU	3.392	SEDANG
TOTAL KABUPATEN SIDOARJO		71.256	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 10 menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana kekeringan. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Sidoarjo terdapat di 18 kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas kekeringan di Kabupaten Sidoarjo, total luas bahaya adalah 71.256 Ha yang berada pada kelas sedang. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

3.2.2 Kerentanan

Kerentanan disusun berdasarkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Kajian kerentanan dilakukan untuk menghitung potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian berdasarkan komponen kerentanan. Komponen kerentanan terdiri dari sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Parameter ukur yang digunakan untuk mengkaji komponen kerentanan berpedoman pada buku Risiko Bencana Indonesia (2016). Parameter setiap komponen kerentanan dipaparkan sebagai berikut;

1. Parameter kerentanansosialdapatdilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Parameter Kerentanan Sosial

PARAMETER KERENTANAN SOSIAL	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KEPADATAN PENDUDUK	60	< 5 Jiwa/Ha	5 – 10 Jiwa/Ha	> 10 Jiwa/Ha
KELOMPOK RENTAN				
RASIO JENIS KELAMIN (10%)	40	> 40	20-40	< 20

PARAMETER KERENTANAN SOSIAL	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
RASIO KELOMPOK UMUR RENTAN (10%)		< 20	20-40	> 40
RASIO PENDUDUK MISKIN (10%)				
RASIO PENDUDUK CACAT (10%)				
$$Kerentanan\,Sosial = \left(0.6 * \frac{log\left(\frac{kepadatanpenduduk}{0.01}\right)}{log\left(\frac{100}{0.01}\right)}\right) + (0.1 * rasio\,jenis\,kelamin) + (0.1 * rasio\,kemiskinan) + (0.1 * rasio\,orang\,cacat) + (0.1 * rasio\,kelompok\,umur)$$				

Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2016

Kajian kerentanan sosial dihitung berdasarkan kepadatan penduduk dan penduduk kelompok rentan (umur rentan, miskin dan cacat). Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, karena kejadian bencana ini berada diluar wilayah pemukiman penduduk. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Jumlah penduduk, menggunakan data dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016.
b. Kelompok umur, menggunakan data dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016.
c. Penduduk cacat, menggunakan data dari Podes Tahun 2016.
d. Penduduk miskin, menggunakan data dari TNP2K Tahun 2011.

2. Parameter kerentananfisikdapatdilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Parameter Kerentanan Fisik

PARAMETER KERENTANAN FISIK	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
RUMAH	40	<400 Juta	400 – 800 Juta	>800 Juta
FASILITAS UMUM	30	<500 Juta	500 Juta – 1 M	>1 M
FASILITAS KRITIS	30	<500 Juta	500 Juta – 1 M	>1 M
KERENTANAN FISIK = (0,4 * SKOR RUMAH) + (0,3 * SKOR FASUM) + (0,3 * SKOR FASKRIS)				
PERHITUNGAN NILAI SETIAP PARAMETER DILAKUKAN BERDASARKAN: PADA KELAS BAHAYA RENDAH MEMILIKI PENGARUH 0% PADA KELAS BAHAYA SEDANG MEMILIKI PENGARUH 50% PADA KELAS BAHAYA TINGGI MEMILIKI PENGARUH 100%				

Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2016

Tabel di atas terlihat bahwa kajian kerentanan fisik dihitung berdasarkan jumlah rumah, fasilitas umum (fasilitas pendidikan dan kesehatan) dan

fasilitas kritis (bandara, pelabuhan dan pembangkit listrik). Untuk parameter kerentanan fisik hampir sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan, karena kejadian bencana ini tidak merusak bangunan maupun infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

a) Jumlah rumah, menggunakan data dari Podes Tahun 2015.
b) Fasilitas Umum (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan), menggunakan data dari Podes Tahun 2014.
c) Fasilitas kritis, menggunakan data dari Kementerian Perhubungan Tahun 2015 untuk data jumlah bandara dan pelabuhan, sedangkan untuk pembangkit listrik menggunakan data dari ESDM/PLN Tahun 2015.

3. Parameter kerentananekonomidapatdilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Parameter Kerentanan Ekonomi

PARAMETER KERENTANAN EKONOMI	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
LAHAN PRODUKTIF	60	<50 JUTA	50 – 200 JUTA	>200 JUTA
PDRB	40	<100 JUTA	100 - 300 JUTA	>300 JUTA
KERENTANAN EKONOMI = (0,6 * SKOR LAHAN PRODUKTIF) + (0,4 * SKOR PDRB)				
PERHITUNGAN NILAI SETIAP PARAMETER DILAKUKAN BERDASARKAN: PADA KELAS BAHAYA RENDAH MEMILIKI PENGARUH 0% PADA KELAS BAHAYA SEDANG MEMILIKI PENGARUH 50% PADA KELAS BAHAYA TINGGI MEMILIKI PENGARUH 100%				

Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2016

Kajian kerentanan ekonomi dihitung berdasarkan lahan produktif dan PDRB. Parameter ekonomi berlaku sama untuk seluruh potensi bencana. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

a) Lahan produktif, menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014.
b) PDRB, menggunakan data dari Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2015.

4. Parameter kerentananlingkungan, dapatdilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Parameter Kerentanan Lingkungan

PARAMETER KERENTANAN LINGKUNGAN	KELAS			SKOR
	RENDAH	SEDANG	TINGGI	
HUTAN LINDUNG a,b,c,d,e,f,g,h	<20 HA	20 – 50 HA	>50 HA	KELAS / NILAI

PARAMETER KERENTANAN LINGKUNGAN	KELAS			SKOR
	RENDAH	SEDANG	TINGGI	
HUTAN ALAM a,b,c,d,e,f,g,h	<25 HA	25 – 75 HA	>75 HA	MAKS. KELAS
HUTAN BAKAU/MANGROVE a,b,c,d,e,f,g,h	<10 HA	10 – 30 HA	>30 HA	
SEMAK BELUKAR a,b,c,d,e,f,g	<10 HA	10 – 30 HA	>30 HA	
RAWA E,F,G	<5 HA	5 – 20 HA	>20 HA	
. TANAH LONGSOR . LETUSAN GUNUNGAPI . KEKERINGAN . KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BANJIR . BANJIR BANDANG . GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI TSUNAMI PERHITUNGAN NILAI SETIAP PARAMETER DILAKUKAN BERDASARKAN: PADA KELAS BAHAYA RENDAH MEMILIKI PENGARUH 0% PADA KELAS BAHAYA SEDANG MEMILIKI PENGARUH 50% PADA KELAS BAHAYA TINGGI MEMILIKI PENGARUH 100%				

Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2016

Kajian kerentanan lingkungan dihitung berdasarkan status kawasan hutan dan penggunaan lahan. Parameter kerentanan lingkungan berbeda untuk setiap potensi bencana. Khusus untuk bencana gempabumi dan cuaca ekstrim tidak memiliki parameter ini, dikarenakan 2 (dua) bencana tersebut tidak merusak fungsi lahan maupun lingkungan. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Status kawasan hutan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove) menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014.
b. Penutupan lahan (semak belukar dan rawa) menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014.

Komponen kerentanan dikelompokkan kedalam 2 (dua) indeks pendukung dalam pengkajian kerentanan, yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar dihitung berdasarkan komponen sosial. Indeks kerugian dikelompokkan lagi kedalam 2 (dua) indeks yaitu indeks kerugian rupiah dan indeks kerusakan lingkungan. Pengelompokkan ini dilakukan karena kerusakan lingkungan tidak bisa dihitung dengan satuan rupiah. Indeks kerugian rupiah dihitung berdasarkan komponen fisik dan ekonomi, sedangkan kerusakan lingkungan dihitung berdasarkan kemponen lingkungan.

Pengkajian kerentanan Kabupaten Sidoarjo menghasilkan peta kerentanan, potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Peta kerentanan dan detail kajian kerentanan per kelurahan dapat dilihat pada Album Peta Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan rekapitulasi hasil kajian kerentanan Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 15 sampai Tabel 16.

Tabel 15. Rekapitulasi Tingkat Kerentanan Kabupaten Sidoarjo BerdasarkanPenduduk Terpapar dan Kelompok Rentan

NO	JENIS BAHAYA	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KELOMPOK RENTAN			
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	BANJIR	2.233.515	104	4.067	40.831	72.562
2	BANJIR BANDANG	13.668	96	79	1.003	2.003
3	CUACA EKSTRIM	2.233.630	104	4.069	369.303	325.246
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	-	-	-	-	-
5	GEMPABUMI	2.233.825	102	4.069	369.339	325.273
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
7	KEKERINGAN	2.233.825	104	4.058	287.015	324.532

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 16. Rekapitulasi Tingkat Kerentanan Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan

NO	JENIS BAHAYA	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
1	BANJIR	3.468.945	3.495.632	6.964.577	-	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	58.160	435.561	493.721	-	SEDANG
3	CUACA EKSTRIM	5.862.392	3.004.768	8.867.160	-	SEDANG
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	2.186	483.500	485.686	-	RENDAH
5	GEMPABUMI	219.550	430.413	649.963	-	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	143.034	143.034	-	SEDANG
7	KEKERINGAN	-	1.763.378	1.763.378	-	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Kelas kerentanan yang didapatkan adalah hasil dari keseluruhan komponen kerentanan. Tabel 15 dan 16 menunjukkan bahwa kelas kerentanan Kabupaten Sidoarjo diantara sedang dan tinggi. Untuk kerentanan cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas tinggi. Sedangkan, untuk banjir, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor, masuk dalam kelas kerentanan sedang.

Peta kerentanan serta detail kajian kerentanan per kelurahan dapat dilihat pada Album Peta Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil kajian kerentanan untuk seluruh potensi bencana tingkat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dijabarkan sebagai berikut.

3.2.2.1 Banjir

Kajian kerentanan untuk bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 17 dan Tabel 18.

Tabel 17. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Banjir di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KELOMPOK RENTAN			
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	BALONGBENDO	81.163	103	180	2.080	2.210
2	BUDURAN	112.509	102	278	334	2.877
3	CANDI	165.476	103	292	8.978	4.600
4	GEDANGAN	128.389	104	138	3.450	2.497
5	JABON	60.025	104	276	3.301	1.687
6	KREMBUNG	69.017	103	200	5.319	549
7	KRIAN	135.917	105	241	4.403	4.547
8	PORONG	89.731	103	216	118	922
9	PRAMBON	87.551	105	240	215	4.914
10	SEDATI	102.809	106	86	30	5.038
11	SIDOARJO	227.341	102	233	99	7.557
12	SUKODONO	124.125	105	176	3.123	3.324
13	TAMAN	232.490	104	287	1.468	7.252
14	TANGGULANGIN	111.408	104	251	1.460	3.688
15	TARIK	64.889	103	196	1.813	974
16	TULANGAN	103.621	104	257	1.351	7.259
17	WARU	254.271	101	179	1.155	8.782
18	WONOAYU	81.163	103	180	2.080	2.210

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 18. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Banjir di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
1	BALONGBENDO	223.403	21.430	244.833	-	SEDANG
2	BUDURAN	182.223	287.597	469.820	-	SEDANG
3	CANDI	297.168	173.992	471.160	-	SEDANG
4	GEDANGAN	177.257	11.658	188.915	-	SEDANG
5	JABON	171.557	472.707	644.264	-	SEDANG
6	KREMBUNG	83.883	57.977	141.860	-	SEDANG

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
7	KRIAN	291.509	31.252	322.761	-	SEDANG
8	PORONG	91.019	151.134	242.153	-	SEDANG
9	PRAMBON	178.322	114.103	292.425	-	SEDANG
10	SEDATI	241.700	901.665	1.143.365	-	SEDANG
11	SIDOARJO	375.156	207.531	582.687	-	SEDANG
12	SUKODONO	173.566	77.123	250.689	-	SEDANG
13	TAMAN	93.378	201.029	294.407	-	SEDANG
14	TANGGULANGIN	163.750	55.335	219.085	-	SEDANG
15	TARIK	112.399	135.851	248.250	-	SEDANG
16	TULANGAN	193.906	399.961	593.867	-	SEDANG
17	WARU	156.499	109.622	266.121	-	SEDANG
18	WONOAYU	223.403	21.430	244.833	-	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Banjir berpotensi terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 18 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan sedang untuk banjir. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan banjir seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 17 dan 18, di Kabupaten Sidoarjo adalah Sedang.

3.2.2.2 BanjirBandang

Kajian kerentanan untuk bencana banjir bandang di Kabupaten Sidoarjo didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir bandang. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana banjir bandang di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 19 dan Tabel 20.

Tabel 19. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Banjir Bandangdi Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KELOMPOK RENTAN			
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	JABON	1.449	91	10	113	239
2	KREMBUNG	971	101	6	81	156
3	PORONG	10.108	102	56	708	1.413

4	TARIK	1.140	100	7	101	195

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 20. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Banjir Bandang di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
1	JABON	3.195	425.334	428.529	-	RENDAH
2	KREMBUNG	1.020	4.599	5.619	-	RENDAH
3	PORONG	53.945	5.348	59.293	-	SEDANG
4	TARIK	-	281	281	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Banjir bandang berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 1 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan sedang dan 3 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan rendah untuk banjir bandang. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan banjir bandang, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 19 dan 20, di Kabupaten Sidoarjo adalah Sedang.

3.2.2.3 CuacaEkstrim

Kajian kerentanan untuk bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Sidoarjo didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana cuaca ekstrim. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 21 dan Tabel 22.

Tabel 21. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KELOMPOK RENTAN			
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	BALONGBENDO	81.264	103	180	9.659	13.132
2	BUDURAN	112.401	102	279	13.122	15.544
3	CANDI	165.391	103	292	23.408	22.190
4	GEDANGAN	128.266	104	138	17.962	19.615
5	JABON	60.082	104	275	17.820	9.545
6	KREMBUNG	69.073	103	200	14.323	11.558
7	KRIAN	136.026	105	241	18.242	21.577
8	PORONG	89.636	104	216	10.287	12.579
9	PRAMBON	87.535	104	240	26.366	13.667
10	SEDATI	102.606	104	86	22.552	14.549
11	SIDOARJO	227.286	104	233	15.924	30.864
12	SUKODONO	124.284	104	176	27.285	17.300
13	TAMAN	232.592	104	287	21.580	33.342

NO	KECAMATAN	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KELOMPOK RENTAN			
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
14	TANGGULANGIN	111.373	104	252	19.323	14.936
15	TARIK	65.011	105	197	28.237	11.797
16	TULANGAN	103.542	104	257	30.133	17.085
17	WARU	254.407	104	179	32.307	31.749
	WONOAYU	82.855	104	341	20.773	14.217

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 22. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
1	BALONGBENDO	183.555	21.753	205.308	-	SEDANG
2	BUDURAN	408.495	266.706	675.201	-	SEDANG
3	CANDI	716.910	131.840	848.750	-	SEDANG
4	GEDANGAN	559.515	8.171	567.686	-	SEDANG
5	JABON	288.338	230.262	518.600	-	SEDANG
6	KREMBUNG	238.080	144.057	382.137	-	SEDANG
7	KRIAN	461.435	31.289	492.724	-	SEDANG
8	PORONG	177.770	92.524	270.294	-	SEDANG
9	PRAMBON	374.065	68.888	442.953	-	SEDANG
10	SEDATI	218.027	346.754	564.781	-	SEDANG
11	SIDOARJO	198.011	332.272	530.282	-	SEDANG
12	SUKODONO	304.875	156.643	461.518	-	SEDANG
13	TAMAN	312.643	529.705	842.347	-	SEDANG
14	TANGGULANGIN	125.818	84.880	210.697	-	SEDANG
15	TARIK	426.316	204.595	630.911	-	SEDANG
16	TULANGAN	159.929	207.961	367.889	-	SEDANG
17	WARU	169.753	71.509	241.262	-	SEDANG
1	WONOAYU	538.860	74.959	613.819	-	SEDAN

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
8						G

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Cuaca ekstrim berpotensi terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 18 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan sedang untuk cuaca ekstrim. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan cuaca ekstrim seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 21 dan 22, di Kabupaten Sidoarjo adalah Sedang.

3.2.2.4 GelombangEkstrim dan Abrasi

Kajian kerentanan untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Cirebon didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 23 dan Tabel 24.

Tabel 23. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KELOMPOK RENTAN			
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	BUDURAN	-	-	-	-	-
2	JABON	-	-	-	-	-
3	SEDATI	-	-	-	-	-
4	SIDOARJO	-	-	-	-	-
5	WARU	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 24. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
1	BUDURAN	-	108.123	108.123	-	RENDAH
2	JABON	-	297.544	297.544	-	RENDAH
3	SEDATI	-	76.466	76.466	-	RENDAH
4	SIDOARJO	2.186	1.368	3.554	-	RENDAH
5	WARU	-	-	-	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi terjadi di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Terdapat 5 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan rendah untuk gempa bumi. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan gelombang ekstrim dan abrasi, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 23 dan 24, di Kabupaten Sidoarjo adalah Rendah.

3.2.2.5 GempaBumi

Kajian kerentanan untuk bencana gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentananbencana gempa bumi. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 25 dan Tabel 26.

Tabel 25. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Gempa Bumidi Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KELOMPOK RENTAN			
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	BALONGBENDO	81.278	102	180	9.660	13.134
2	BUDURAN	112.401	102	279	13.122	15.544
3	CANDI	165.391	102	292	23.408	22.190
4	GEDANGAN	128.266	103	138	17.962	19.615
5	JABON	60.098	102	275	17.821	9.548
6	KREMBUNG	69.073	102	200	14.323	11.558
7	KRIAN	136.026	104	241	18.242	21.577
8	PORONG	89.636	102	216	10.287	12.579
9	PRAMBON	87.539	103	240	26.366	13.668
10	SEDATI	102.606	102	86	22.552	14.549
11	SIDOARJO	227.290	100	233	15.924	30.864
12	SUKODONO	124.284	105	176	27.285	17.300
13	TAMAN	232.609	103	287	21.581	33.344
14	TANGGULANGIN	111.382	103	252	19.325	14.937
15	TARIK	65.019	102	197	28.241	11.799
16	TULANGAN	103.548	102	257	30.136	17.087
17	WARU	254.524	101	179	32.331	31.763
18	WONOAYU	82.855	102	341	20.773	14.217

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 26. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Gempa Bumi di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
1	BALONGBENDO	-	-	-	-	RENDAH
2	BUDURAN	-	-	-	-	RENDAH
3	CANDI	-	-	-	-	REN

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
						DAH
4	GEDANGAN	-	-	-	-	REN DAH
5	JABON	33.475	17.504	50.979	-	REN DAH
6	KREMBUNG	-	-	-	-	REN DAH
7	KRIAN	-	-	-	-	REN DAH
8	PORONG	-	-	-	-	REN DAH
9	PRAMBON	-	-	-	-	REN DAH
10	SEDATI	34.643	66.573	101.216	-	REN DAH
11	SIDOARJO	2.750	20.985	23.735	-	REN DAH
12	SUKODONO	14.303	31.161	45.463	-	REN DAH
13	TAMAN	2.803	113.032	115.835	-	REN DAH
14	TANGGULANGIN	17.193	33.090	50.283	-	REN DAH
15	TARIK	-	45.685	45.685	-	REN DAH
16	TULANGAN	-	-	-	-	REN DAH
17	WARU	11.510	48.404	59.914	-	REN DAH
18	WONOAYU	102.875	53.980	156.855	-	REN DAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Gempa bumi berpotensi terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 18 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan rendah untuk gempa bumi. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan gempa bumi, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 25 dan 26, di Kabupaten Sidoarjo adalah rendah.

3.2.2.6 KebakaranHutan dan Lahan

Kajian kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 27 dan Tabel 28.

Tabel 27. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sidoarjo

N	KECAMATAN	TOTAL	KELOMPOK RENTAN

O		PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	BALONGBENDO	-	-	-	-	-
2	BUDURAN	-	-	-	-	-
3	CANDI	-	-	-	-	-
4	GEDANGAN	-	-	-	-	-
5	JABON	-	-	-	-	-
6	KREMBUNG	-	-	-	-	-
7	KRIAN	-	-	-	-	-
8	PORONG	-	-	-	-	-
9	PRAMBON	-	-	-	-	-
10	SEDATI	-	-	-	-	-
11	SIDOARJO	-	-	-	-	-
12	SUKODONO	-	-	-	-	-
13	TAMAN	-	-	-	-	-
14	TANGGULANGIN	-	-	-	-	-
15	TARIK	-	-	-	-	-
16	TULANGAN	-	-	-	-	-
17	WARU	-	-	-	-	-
18	WONOAYU	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 28. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
1	BALONGBENDO	-	6.285	6.285	-	SEDANG
2	BUDURAN	-	5.504	5.504	-	SEDANG
3	CANDI	-	10.499	10.499	-	SEDANG
4	GEDANGAN	-	3.741	3.741	-	SEDANG
5	JABON	-	31.904	31.904	-	SEDANG
6	KREMBUNG	-	8.628	8.628	-	SEDANG
7	KRIAN	-	5.109	5.109	-	SEDANG
8	PORONG	-	5.845	5.845	-	SEDANG
9	PRAMBON	-	4.034	4.034	-	SEDANG
10	SEDATI	-	2.877	2.877	-	SEDANG
11	SIDOARJO	-	11.010	11.010	-	SEDANG
12	SUKODONO	-	11.387	11.387	-	SEDANG

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
13	TAMAN	-	4.166	4.166	-	SEDANG
14	TANGGULANGIN	-	7.867	7.867	-	SEDANG
15	TARIK	-	9.233	9.233	-	SEDANG
16	TULANGAN	-	7.001	7.001	-	SEDANG
17	WARU	-	918	918	-	SEDANG
18	WONOAYU	-	7.027	7.027	-	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 18 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan sedang untuk kebakaran hutan dan lahan. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan kebakaran hutan dan lahan, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 27 dan 28, di Kabupaten Sidoarjo adalah sedang.

3.2.2.7 Kekeringan

Kajian kerentanan untuk bencana kekeringan di Kabupaten Sidoarjo didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisa dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kekeringan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan bencana kekeringan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 29 dan Tabel 30.

Tabel 28. Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan untuk Kekeringandi Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KELOMPOK RENTAN			
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	BALONGBENDO	81.278	104	180	-	13.041
2	BUDURAN	112.401	103	277	-	15.550
3	CANDI	165.391	104	292	-	22.173
4	GEDANGAN	128.266	104	138	-	19.578
5	JABON	60.098	103	271	-	9.486
6	KREMBUNG	69.073	103	199	14.275	11.504
7	KRIAN	136.026	105	240	18.210	21.550
8	PORONG	89.636	104	216	10.329	12.577
9	PRAMBON	87.539	104	240	26.383	13.624
10	SEDATI	102.606	105	86	22.479	14.532
11	SIDOARJO	227.290	101	233	15.997	30.883
12	SUKODONO	124.284	106	176	27.177	17.253
13	TAMAN	232.609	104	286	21.551	33.168

NO	KECAMATAN	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	KELOMPOK RENTAN			
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK CACAT	PENDUDUK MISKIN	KELOMPOK UMUR RENTAN
14	TANGGULANGIN	111.382	105	252	19.325	14.896
15	TARIK	65.019	103	197	28.226	11.760
16	TULANGAN	103.548	104	257	30.106	17.062
17	WARU	254.524	101	178	32.058	31.621
18	WONOAYU	82.855	104	340	20.899	14.274

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 29. Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan untuk Kekeringan di Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	KELAS
		TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		
1	BALONGBENDO	-	17.540	17.540	-	SEDANG
2	BUDURAN	-	188.464	188.464	-	SEDANG
3	CANDI	-	115.533	115.533	-	SEDANG
4	GEDANGAN	-	7.885	7.885	-	SEDANG
5	JABON	-	446.104	446.104	-	SEDANG
6	KREMBUNG	-	24.142	24.142	-	SEDANG
7	KRIAN	-	14.673	14.673	-	SEDANG
8	PORONG	-	52.786	52.786	-	SEDANG
9	PRAMBON	-	22.104	22.104	-	SEDANG
10	SEDATI	-	405.219	405.219	-	SEDANG
11	SIDOARJO	-	257.364	257.364	-	SEDANG
12	SUKODONO	-	22.383	22.383	-	SEDANG
13	TAMAN	-	11.262	11.262	-	TINGGI
14	TANGGULANGIN	-	60.257	60.257	-	SEDANG
15	TARIK	-	11.940	11.940	-	SEDANG
16	TULANGAN	-	22.686	22.686	-	SEDANG
17	WARU	-	53.536	53.536	-	SEDANG
18	WONOAYU	-	29.502	29.502	-	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Kekeringan berpotensi terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 17 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan sedang dan 1 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan tinggi untuk kekeringan. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan kekeringan, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 29 dan 30, di Kabupaten Sidoarjo adalah tinggi.

3.2.3. Kapasitas

Kapasitas daerah adalah hal terpenting dalam peningkatan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Kapasitas adalah kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan. keluarga. dan masyarakat yang membuat mereka mampu

mencegah. mengurangi. siaga. menghadapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Adapun aspek kapasitas antara lain kebijakan daerah. kesiapsiagaan. dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pemetaan kerentanan dan kapasitas suatu daerah dalam penanggulangan bencana. maka dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat ketahanan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana.

Kajian kapasitas di Kabupaten Sidoarjo RENAS PB 2015-2019. Penilaian kapasitas untuk tingkat kabupaten/kota berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan kelurahan. Komponen ketahanan daerah berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana. Sedangkan komponen kesiapsiagaan kelurahan berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu. diperlukan penjabaran komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan kelurahan untuk Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu langkah untuk pengkajian risiko bencana.

1. KomponenKetahanan Daerah

Penilaian terhadap kapasitas daerah dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus terkait daftar isian yang nantinya diisi oleh seluruh peserta diskusi yang terkait dengan daerah Kabupaten Sidoarjo. Isian tersebut menyangkut daftar pertanyaan dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang terdiri dari 71 indikator capaian. Tujuh puluh satu indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah dan indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan dengan indikator pencapaian:
1) Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
2) Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
3) Peraturan tentang Pembentukan Forum PRB
4) Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
5) Peraturan Daerah tentang RPB
6) Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
7) Lembaga badan penanggulangan bencana daerah
8) Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana
9) Komitmen DPRD terhadap PRB

b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu dengan indikator pencapaian:
1) Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
2) Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
3) Peta Kapasitas dan kajiannya
4) Rencana Penanggulangan Bencana

c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik dengan indikator pencapaian:
a) Sarana penyampaian informasi kebencanaanyang menjangkau langsung masyarakat
b) Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
c) Komunikasi bencana lintas lembaga minimal benanggotakan lembaga-lembaga dari sector pemerintah. masyarakat maupun dunia usaha
d) Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan peanganan masa kritis
e) Sistem pendapatan bencana yang terhubung dengan sistem pendataaan bencana nasional
f) Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB

g) Penyelengaraan latihan (Geladi) kesiapsiagaan
h) Kajian kebutuhan peralatan dan Logistik kebencanaan
i) Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
j) Penyimpanan/pergudangan logistik PB
k) Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistic yang diselenggarakan secara periodik
l) Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
m) Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat

d. Penanganan Termatik Kawasan Rawan Bencana dengan indikator pencapaian:

a) Penataan ruang berbasisi PRB
b) Informasi penataan ruang yang mudah diakses public
c) Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
d) Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana
e) Desa Tangguh Bencana

e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan indikator pencapaian:

a) Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir
b) Perlindungan daerah tangkapan air
c) Restorasi Sungai
d) Penguatan Lereng
e) Penegakan hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan.
f) Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
g) Pemantauan berkala hulu sungai
h) Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
i) Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
j) Revitasi tanggul. embung. waduk dan taman kota
k) Restorasi lahan gambut
l) Konservasi vegetative DAS rawan longsor

f. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dengan indikator pencapaian:

a) Rencana Kontijensi Gempabumi
b) Rencana Kontijensi Tsunami
c) Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
d) Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
e) Rencana Kontijensi Banjir
f) Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
g) Rencana Kontijensi Tanah Longsor
h) Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor
i) Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan Dan Lahan
j) Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan
k) Rencana Kontijensi Erupsi Gunungapi
l) Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi
m) Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
n) Rencana Kontijensi Kekeringan
o) Sistem Peringatana Dini Bencana Kekeringan
p) Rencana Kontijensi Banjir Bandang
q) Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang
r) Penentuan status tanggap darurat
s) Penerapan sistem komando operasi darurat
t) Pengerahan Tim Kaji Cepat Ke Lokasi Bencana
u) Pengerahan Tim Penyelamat Dan Pertolongan Korban
v) Perbaikan Darurat
w) Pengerahan Bantuan Pada Masyarakat Terjauh

x) Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana

g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dengan indikator pencapaian:

a) Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
b) Pemulihan infrastruktur penting
c) Perbaikan rumah penduduk
d) Pemulihan penghidupan masyarakat

Berikut dipaparkan pada tabel 31, hasil Kajian Ketahanan Daerah di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil survey 71 Indikator Ketahanan Daerah, yang didapat dari diskusi yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo bersama perwakilan SKPD.

Tabel 31. Hasil Kajian Ketahanan Daerah di Kabupaten Sidoarjo

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1,00	0,73	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,76		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,77		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,61		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,78		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,51		

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Dapat dilihat dari tabel ini, bahwa kapasitas daerah Kabupaten Sidoarjo ini berada dalam tingkat Sedang. Dari 7 prioritas yang ada, Kabupaten Sidoarjo sudah sangat baik dalam perkuatan kebijakan dan kelembagaan dan pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu di angka 1.00 yang sudah termasuk Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dan kebijakan di Kabupaten Sidoarjo sudah sangat mendukung dalam prioritas tersebut.

Sedangkan, 5 prioritas lainnya berada di posisi Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo sudah banyak melakukan kegiatan serta memiliki sumber daya yang memadai namun perlu ditingkatkan lagi agar manfaatnya lebih menyeluruh dan penanggulangan bencana yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien.

2. KomponenKesiapsiagaanKelurahan

Komponen kesiapsiagaan kelurahan dikaji berdasarkan parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana. pengelolaan tanggap darurat. pengaruh kerentanan masyarakat. ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah. dan partisipasi masyarakat. Parameter-parameter tersebut dikaji hingga tingkat kelurahan melalui analisa kuisioner kesiapsiagaan yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo untuk seluruh bencana berpotensi. Penjabaran masing-masing parameter dalam kesiapsiagaan kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB)

Pengukuran parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana didasarkan kepada indikator pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan informasi bencana, pengetahuan sistem peringatan dini bencana, pengetahuan tentang prediksi kerugian akibat bencana, dan pengetahuan cara penyelamatan diri. Penilaian parameter ini berdasarkan kepada pengetahuan masyarakat terhadap indikator tersebut.

b. Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD)

Pelaksanaan tanggap darurat didasari pada pencapaian tempat dan jalur evakuasi, tempat pengungsian, air dan sanitasi, dan layanan kesehatan. Indikator pencapaian tersebut memiliki tujuan pada masa tanggap darurat melalui ketersediaan-ketersediaan kebutuhan masyarakat

c. Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM)

Pengaruh kerentanan berdasarkan pada penilaian pengaruh mata pencaharian dan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan masyarakat, dan pemukiman masyarakat.

d. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP)

Masa pasca bencana dibutuhkan dan diharapkan adanya kemandirian masyarakat terhadap dukungan pemerintah melalui jaminan hidup pasca bencana, penggantian kerugian dan kerusakan, penelitian dan pengembangan, penanganan darurat bencana, dan penyadaran masyarakat.

e. Partisipasi Masyarakat (PM)

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui upaya pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dan pemanfaatan relawan desa.

Analisa untuk seluruh bencana berdasarkan kelima parameter tersebut menentukan nilai indeks kesiapsiagaan kelurahan dan level kesiapsiagaan kelurahan perbencana. Penentuan nilai indeks dan level kesiapsiagaan dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan. yaitu level rendah dengan nilai indeks 0-0.333. level sedang dengan nilai indeks >0.333-0.666. dan >0.666-1 untuk kelas tinggi. Rekapitulasi kajian kapasitas untuk seluruh bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Rekapitulasi Kajian Kesiapsiagaan Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BAHAYA	KELAS KESIAPSIAGAAN
1	Banjir	-
2	Banjir Bandang	-
3	Cuaca Ekstrim	-
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-
5	Gempabumi	-
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	-
7	Kekeringan	-

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 32 menunjukkan nilai indeks kesiapsiagaan Kabupaten Sidoarjo untuk mayoritas bencana adalah 0. Ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi bencana berada pada level rendah. Peningkatan kesiapsiagaan diperlukan untuk Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB) dan Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD).

Pengkajian kapasitas terhadap bencana diketahui berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa. Komponen ketahanan daerah berlaku sama untuk seluruh potensi bencana karena pengkajiannya dilakukan terhadap pemerintah daerah. sedangkan komponen kesiapsiagaan

berlaku spesifik untuk setiap bencana. karena pengkajiannya dilakukan terhadap masyarakat desa. Adapun parameter ukur untuk menentukan kapasitas daerah berdasarkan 2 (dua) komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Parameter Kapasitas Daerah

PARAMETER KAPASITAS	BOBOT (%)	KELAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT SPESIFIK BENCANA (LEVEL DESA)	60	≤ 0,333	0,334 – 0,666	> 0,666
KETAHANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (LEVEL PEMERINTAH DAERAH)	40	0,4	0,4 – 0,8	0,8 - 1
KAPASITAS = (0.6 * KESIAPSIAGAAN) + (0.4 * KETAHANAN DAERAH)				

Sumber: Risiko Bencana Indonesia

Penggabungan pengkajian kapasitas daerah dengan kesiapsiagaan kelurahan dilaksanakan dengan pembobotan melalui metode GIS dengan perbandingan 40:60 untuk menghasilkan kapasitas Kabupaten Sidoarjo. Peta kapasitas dan detail kajian kapasitas per kelurahan dapat dilihat pada Album Peta Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan rekapitulasi hasil kajian kapasitas Kabupaten Sidoarjo untuk seluruh potensi bencana dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Kelas Kapasitas Kabupaten Sidoarjo dalam Menghadapi Potensi Bencana

NO	BAHAYA	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
1	Banjir	0,73	-	RENDAH
2	Banjir Bandang	0,73	-	RENDAH
3	Cuaca Ekstrim	0,73	-	RENDAH
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,73	-	RENDAH
5	Gempabumi	0,73	-	RENDAH
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,73	-	RENDAH
7	Kekeringan	0,73	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 34 memperlihatkan kelas kapasitas untuk 8 (delapan) potensi bencana Kabupaten Sidoarjo. Kelas kapasitas tersebut diperoleh dari penggabungan kelas kapasitas daerah yang berlaku sama untuk seluruh bencana dan kelas kesiapsiagaan yang berlaku berbeda untuk setiap bencana.

Tabel di atas diperoleh dari rekapitulasi kajian kapasitas per bencana tingkat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Rekapitulasi indeks kapasitas setiap kecamatan untuk masing-masing bencana berpotensi di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

3.2.3.1 Banjir

Hasil kajian kapasitas bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana banjir dapat dilihat pada tabel Tabel 35.

Tabel 35. Kelas Kapasitas Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Banjir

NO	KECAMATAN	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
1	BALONGBENDO	0.73	-	RENDAH
2	BUDURAN	0.73	-	RENDAH
3	CANDI	0.73	-	RENDAH
4	GEDANGAN	0.73	-	RENDAH
5	JABON	0.73	-	RENDAH
6	KREMBUNG	0.73	-	RENDAH
7	KRIAN	0.73	-	RENDAH
8	PORONG	0.73	-	RENDAH
9	PRAMBON	0.73	-	RENDAH
10	SEDATI	0.73	-	RENDAH
11	SIDOARJO	0.73	-	RENDAH
12	SUKODONO	0.73	-	RENDAH
13	TAMAN	0.73	-	RENDAH
14	TANGGULANGIN	0.73	-	RENDAH
15	TARIK	0.73	-	RENDAH
16	TULANGAN	0.73	-	RENDAH
17	WARU	0.73	-	RENDAH
18	WONOAYU	0.73	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana banjir untuk 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah.

3.2.3.2 BanjirBandang

Hasil kajian kapasitas bencana banjir bandang di Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana banjir bandang dapat dilihat pada tabel Tabel 36.

Tabel 39. Kelas Kapasitas Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Banjir Bandang

NO	KECAMATAN	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
1	JABON	0.73	-	RENDAH
2	KREMBUNG	0.73	-	RENDAH
3	PORONG	0.73	-	RENDAH
4	TARIK	0.73	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana banjir bandang untuk 4 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah.

3.2.3.3 CuacaEkstrim

Hasil kajian kapasitas bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada tabel Tabel 37.

Tabel 37. Kelas Kapasitas Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Cuaca Ekstrim

NO	KECAMATAN	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
1	BALONGBENDO	0,73	-	RENDAH
2	BUDURAN	0,73	-	RENDAH
3	CANDI	0,73	-	RENDAH
4	GEDANGAN	0,73	-	RENDAH
5	JABON	0,73	-	RENDAH
6	KREMBUNG	0,73	-	RENDAH
7	KRIAN	0,73	-	RENDAH
8	PORONG	0,73	-	RENDAH
9	PRAMBON	0,73	-	RENDAH
10	SEDATI	0,73	-	RENDAH
11	SIDOARJO	0,73	-	RENDAH
12	SUKODONO	0,73	-	RENDAH
13	TAMAN	0,73	-	RENDAH
14	TANGGULANGIN	0,73	-	RENDAH
15	TARIK	0,73	-	RENDAH
16	TULANGAN	0,73	-	RENDAH
17	WARU	0,73	-	RENDAH
18	WONOAYU	0,73	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana cuaca ekstrim untuk 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah.

3.2.3.4 GelombangEkstrim dan Abrasi

Hasil kajian kapasitas bencana gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana gempa bumi dapat dilihat pada tabel Tabel 38.

Tabel 38. Kelas Kapasitas Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

NO	KECAMATAN	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
1	BUDURAN	0,73	-	RENDAH
2	JABON	0,73	-	RENDAH
3	SEDATI	0,73	-	RENDAH
4	SIDOARJO	0,73	-	RENDAH
5	WARU	0,73	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana gempa bumi untuk 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah.

3.2.3.5 GempaBumi

Hasil kajian kapasitas bencana gempa bumi di Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana gempa bumi dapat dilihat pada tabel Tabel 39.

Tabel 39. Kelas Kapasitas Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Gempa Bumi

NO	KECAMATAN	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
1	BALONGBENDO	0,73	-	RENDAH
2	BUDURAN	0,73	-	RENDAH
3	CANDI	0,73	-	RENDAH
4	GEDANGAN	0,73	-	RENDAH
5	JABON	0,73	-	RENDAH
6	KREMBUNG	0,73	-	RENDAH
7	KRIAN	0,73	-	RENDAH
8	PORONG	0,73	-	RENDAH
9	PRAMBON	0,73	-	RENDAH
10	SEDATI	0,73	-	RENDAH
11	SIDOARJO	0,73	-	RENDAH
12	SUKODONO	0,73	-	RENDAH
13	TAMAN	0,73	-	RENDAH
14	TANGGULANGIN	0,73	-	RENDAH
15	TARIK	0,73	-	RENDAH
16	TULANGAN	0,73	-	RENDAH
17	WARU	0,73	-	RENDAH
18	WONOAYU	0,73	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana gempa bumi untuk 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah.

3.2.3.6 KebakaranHutan dan Lahan

Hasil kajian kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada tabel Tabel 40.

Tabel 40. Kelas Kapasitas Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

NO	KECAMATAN	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
1	BALONGBENDO	0,73	-	RENDAH
2	BUDURAN	0,73	-	RENDAH
3	CANDI	0,73	-	RENDAH
4	GEDANGAN	0,73	-	RENDAH
5	JABON	0,73	-	RENDAH
6	KREMBUNG	0,73	-	RENDAH
7	KRIAN	0,73	-	RENDAH
8	PORONG	0,73	-	RENDAH
9	PRAMBON	0,73	-	RENDAH
10	SEDATI	0,73	-	RENDAH
11	SIDOARJO	0,73	-	RENDAH

NO	KECAMATAN	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
12	SUKODONO	0,73	-	RENDAH
13	TAMAN	0,73	-	RENDAH
14	TANGGULANGIN	0,73	-	RENDAH
15	TARIK	0,73	-	RENDAH
16	TULANGAN	0,73	-	RENDAH
17	WARU	0,73	-	RENDAH
18	WONOAYU	0,73	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan untuk 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah.

3.2.3.7 Kekeringan

Hasil kajian kapasitas bencana kekeringan di Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari penggabungan analisis ketahanan daerah dan kesiapsiagaan kelurahan. Rekapan hasil kapasitas bencana kekeringan dapat dilihat pada tabel Tabel 41.

Tabel 41. Kelas Kapasitas Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan dalam Menghadapi Potensi Bencana Kekeringan

NO	KECAMATAN	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
1	BALONGBENDO	0,73	-	RENDAH
2	BUDURAN	0,73	-	RENDAH
3	CANDI	0,73	-	RENDAH
4	GEDANGAN	0,73	-	RENDAH
5	JABON	0,73	-	RENDAH
6	KREMBUNG	0,73	-	RENDAH
7	KRIAN	0,73	-	RENDAH
8	PORONG	0,73	-	RENDAH
9	PRAMBON	0,73	-	RENDAH
10	SEDATI	0,73	-	RENDAH
11	SIDOARJO	0,73	-	RENDAH
12	SUKODONO	0,73	-	RENDAH
13	TAMAN	0,73	-	RENDAH
14	TANGGULANGIN	0,73	-	RENDAH
15	TARIK	0,73	-	RENDAH
16	TULANGAN	0,73	-	RENDAH
17	WARU	0,73	-	RENDAH
18	WONOAYU	0,73	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

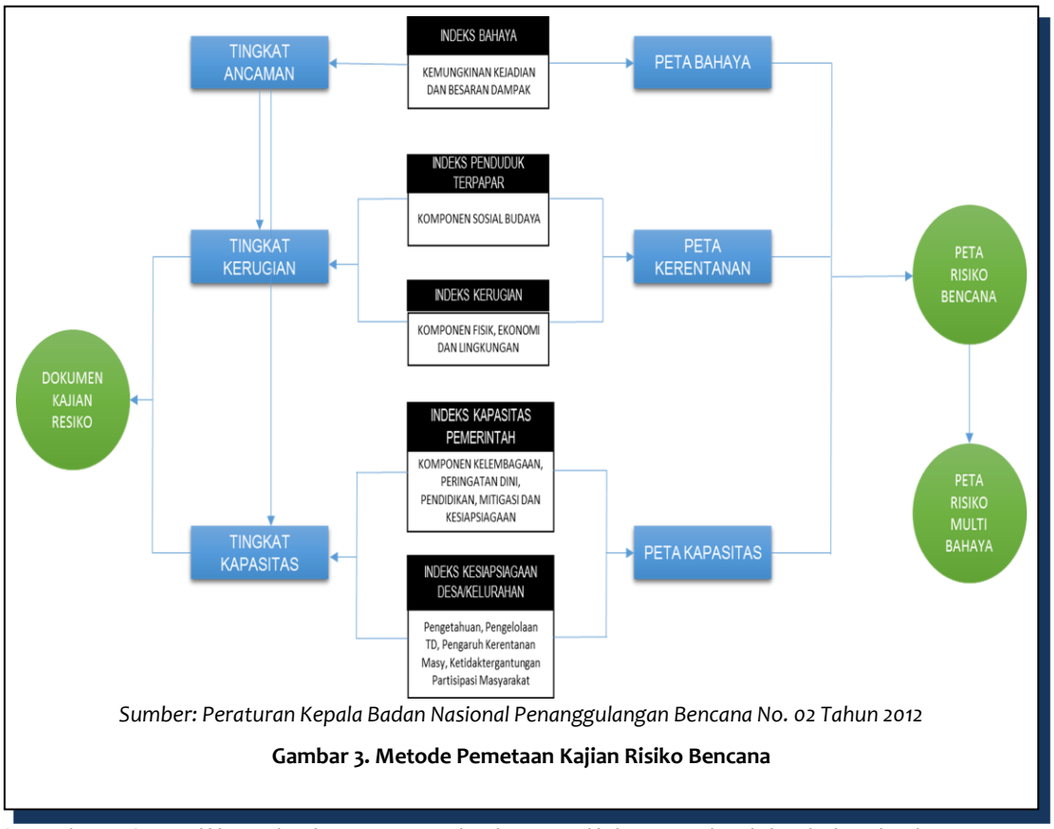
Berdasarkan hasil pengkajian kelas kapasitas bencana kekeringan untuk 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah.

3.3. PETA RISIKO BENCANA

Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko bencana di suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan (overlay) peta bahaya, peta

kerentanan, dan peta kapasitas bencana. Dari hasil kajian peta risiko, dapat ditentukan tingkat risiko bencana yang berpotensi terjadi di daerah.

Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen KRB. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen KRB. Selain itu, dokumen kajian ini juga harus menyajikan rekomendasi kebijakan minimum dalam rencana penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Metode dalam pemetaan risiko dan kajian risiko bencana dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 02 Tahun 2012

Gambar 3. Metode Pemetaan Kajian Risiko Bencana

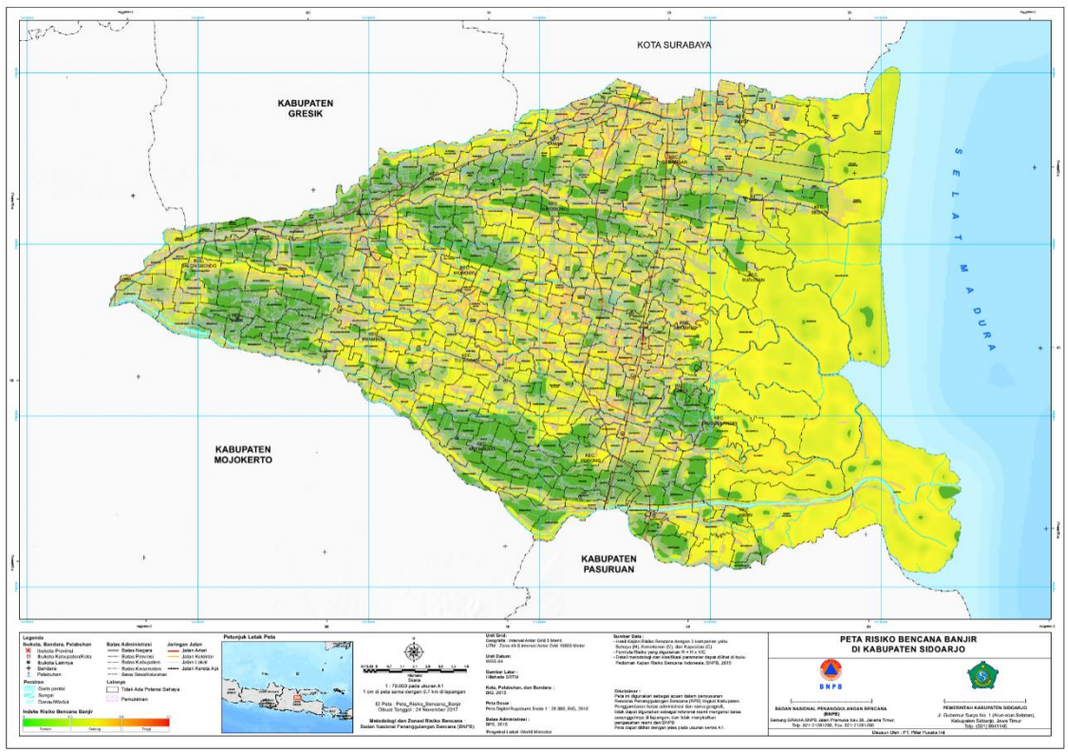
Pada Gambar 3 terlihat bahwa peta bahaya didapat dari indeks bahaya, peta kerentanan didapat dari penggabungan indeks penduduk terpapar dengan indeks kerugian, serta indeks kapasitas didapat dari komponen ketahanan daerah. Penggabungan indeks-indeks tersebut dilakukan dengan menggunakan metode GIS. Sedangkan peta risiko bencana merupakan overlay (penggabungan) dari peta bahaya. peta kerentanan dan peta kapasitas. Dari peta bahaya. peta kerentanan. peta kapasitas dan peta risiko diturunkan hingga menghasilkan tingkat bahaya. tingkat kerentanan. tingkat kapasitas dan tingkat risiko untuk seluruh bencana yang berpotensi terjadi. Tingkat-tingkat yang dihasilkan tersebut digunakan dalam pengkajian risiko bencana hingga menghasilkan kebijakan dalam rencana penanggulangan bencana daerah.

Rangkuman seluruh peta risiko bencana nantinya akan menghasilkan peta risiko multi bahaya. Pemetaan risiko multi bahaya dipersiapkan untuk mengkaji risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan penggabungan hasil kajian peta risiko untuk setiap sejenis bencana.

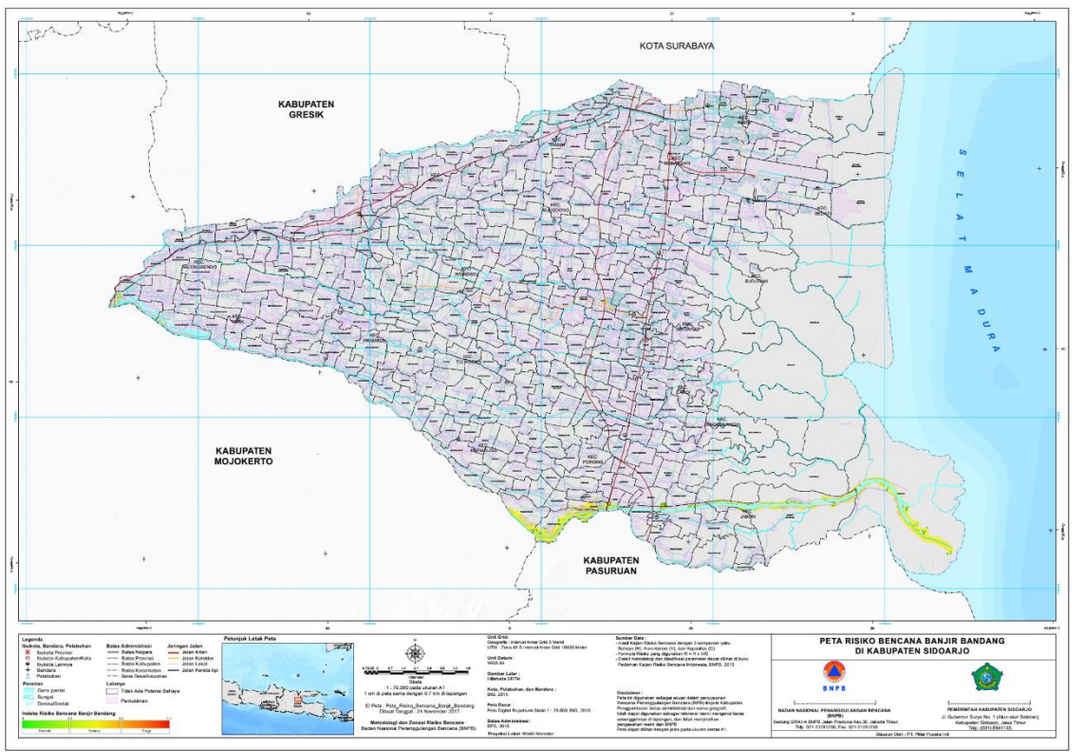
Pemetaan risiko multi bahaya dimaksudkan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana. khususnya wilayah yang memiliki kelas multi bahaya tinggi di daerah. Peta risiko multi bahaya

dihasilkan berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing bahaya. Penjumlahan tersebut berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing bahaya.

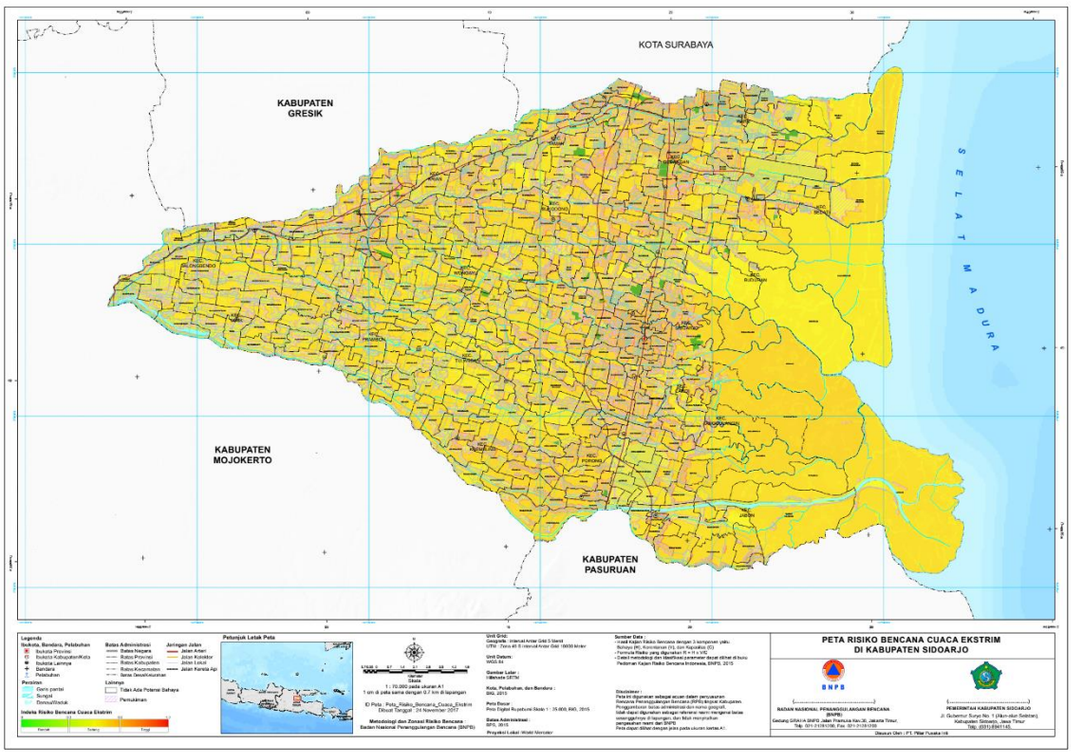
Adapun peta risiko bencana yang berpotensi di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Gambar 4 sampai Gambar 11.



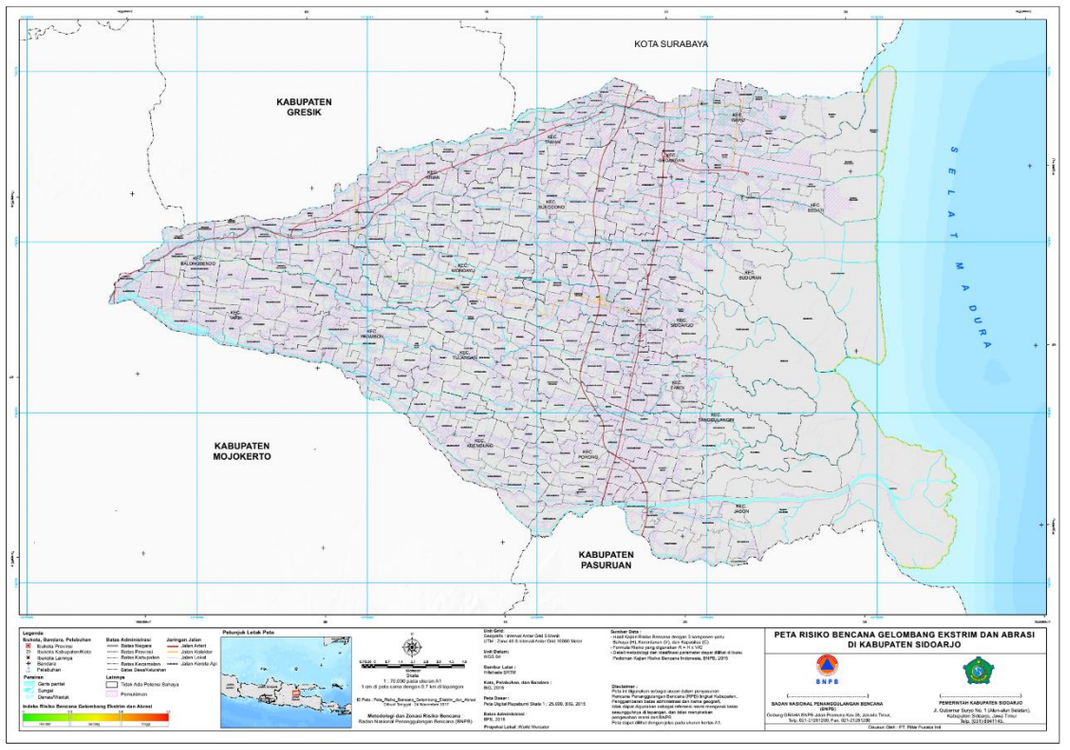
Gambar 4. Peta Risiko Bencana Banjirdi Kabupaten Sidoarjo



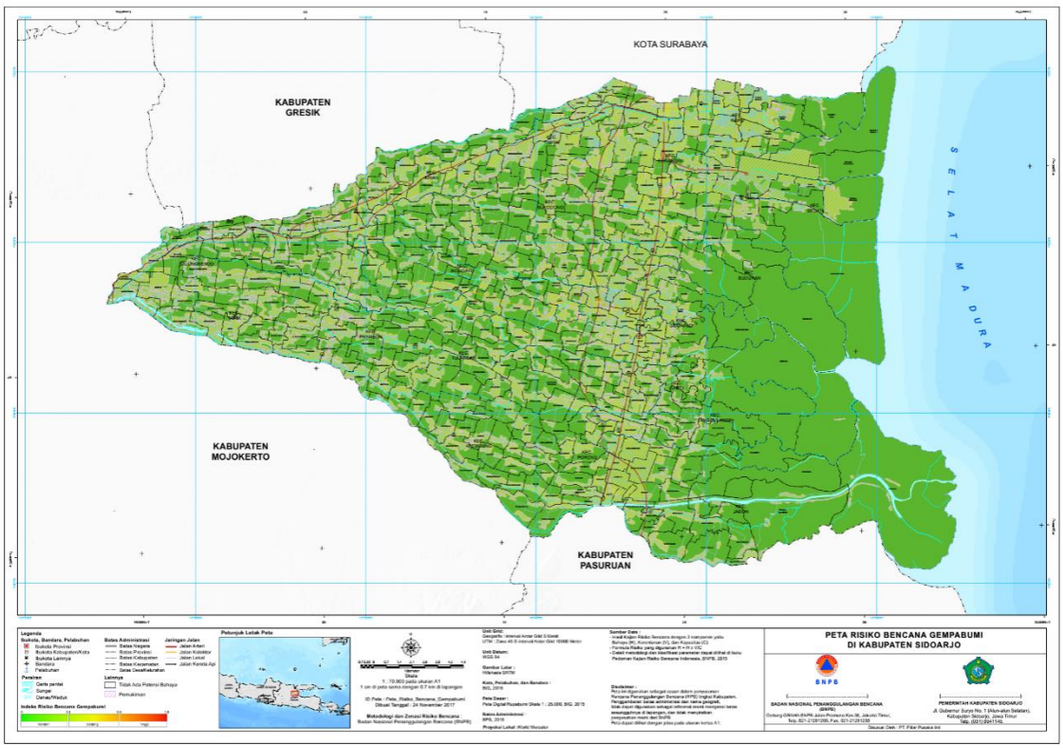
Gambar 5. Peta Risiko Bencana BanjirBandang di Kabupaten Sidoarjo



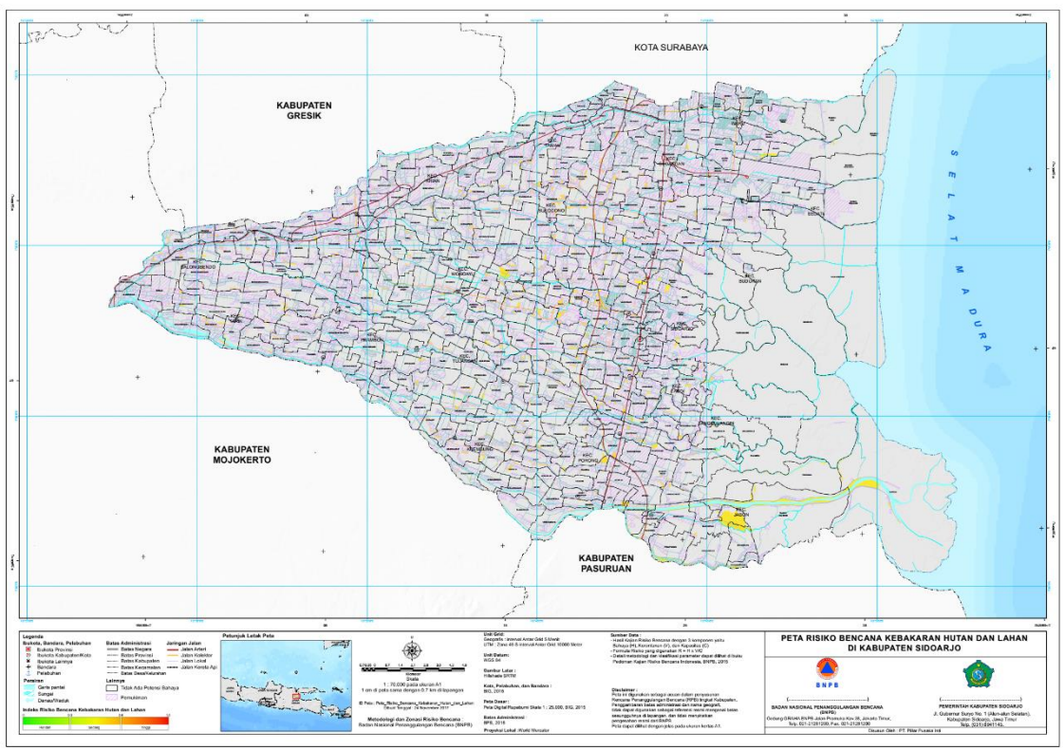
Gambar 6. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Sidoarjo



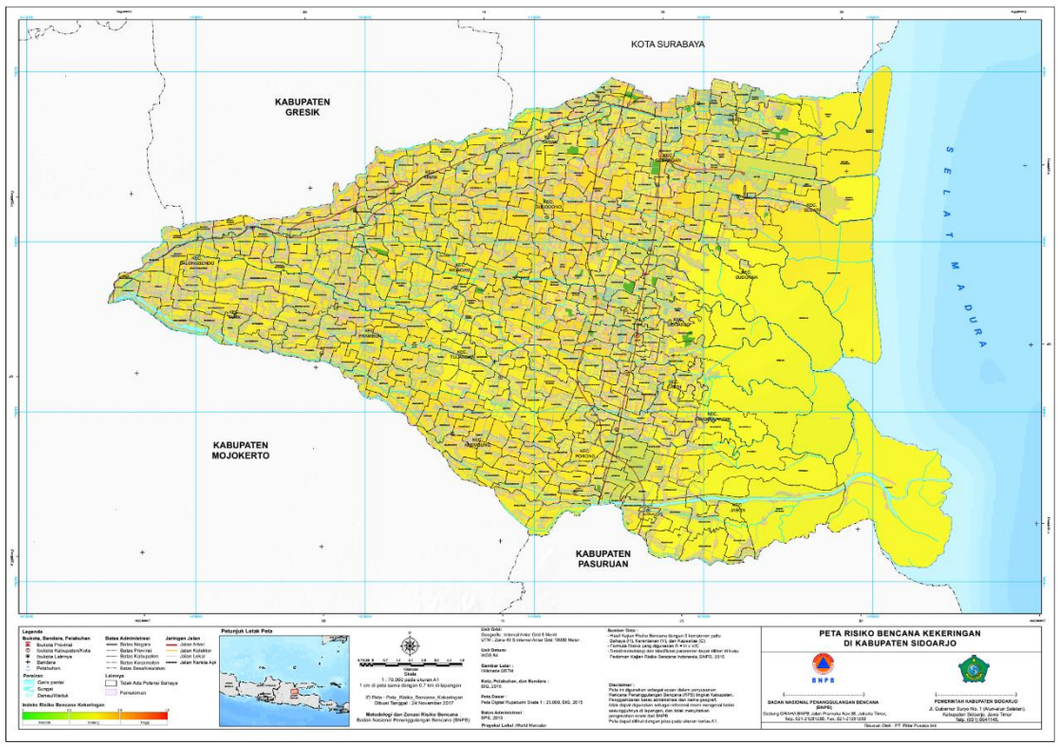
Gambar 7. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sidoarjo



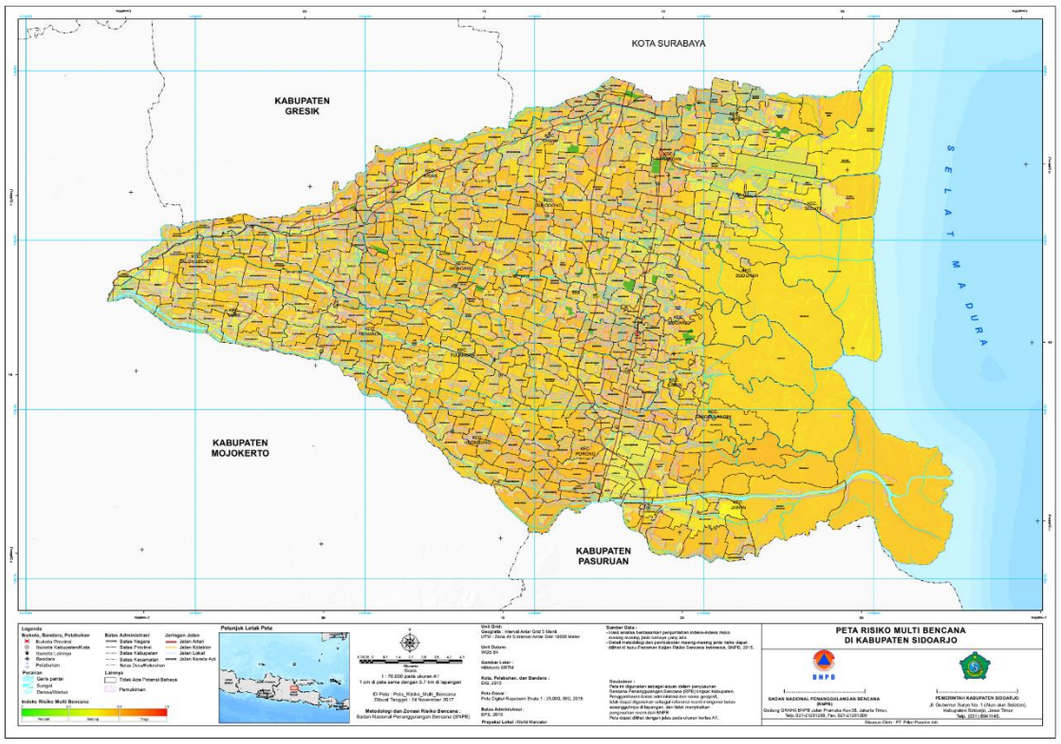
Gambar 8. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 9. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 10. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 11. Peta Risiko Multi-Bencana di Kabupaten Sidoarjo

3. 3.4. KAJIAN RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang dipadukan dengan kapasitas/kemampuan daerah tersebut dalam menghadapi potensi bencana, serta menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi bencana. Setelah mempelajari kelemahan dan celah dalam mekanisme perlindungan dan strategi adaptasi yang ada terhadap bencana, maka hasilnya dapat dijadikan rekomendasi realistis langkah-langkah mengatasi kelemahan dan mengurangi risiko bencana yang telah diidentifikasi. Proses

kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya dokumen ini memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana pada suatu daerah. Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas.
Landasan atau dasar metodologi yang digunakan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 dan Risiko Bencana Indonesia.

3.4.1. Penentuan Tingkat Bahaya
Pengkajian tingkat bahaya memperlihatkan besarnya potensi bahaya di suatu kawasan bagian di Kabupaten Sidoarjo. Pengkajian tingkat tersebut meliputi seluruh ancaman bencana yang diperoleh berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana. Perolehan tingkat bahaya di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Tingkat Bahaya Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BAHAYA	TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Banjir	71.252	TINGGI
2	Banjir Bandang	973	TINGGI
3	Cuaca Ekstrim	71.246	TINGGI
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	215	SEDANG
5	Gempabumi	71.256	RENDAH
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.694	TINGGI
7	Kekeringan	71.256	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 41 memperlihatkan hasil tingkat bahaya keseluruhan bencana di Kabupaten Sidoarjo. Tingkat tersebut berbeda untuk masing-masing bencana. Bencana yang termasuk kelas tinggi adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Gelombang ekstrim dan abrasi, serta kekeringan termasuk kelas sedang. Sedangkan gempa bumi berada pada kelas bahaya rendah.

3.4.2. Penentuan Tingkat Kerentanan
Tingkat kerentanan ditentukan berdasarkan kelas kerentanan yang diperoleh dari penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Kelas penduduk terpapar dikaji berdasarkan komponen sosial budaya. Sementara itu, kelas kerugian dikaji berdasarkan komponen fisik, ekonomi, dan seberapa besar kerusakan lingkungan. Hasil pengkajian tingkat kerentanan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 52. Tingkat Kerentanan di Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BAHAYA	TOTAL PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)			POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS
			TOTAL KERUGIAN FISIK	TOTAL KERUGIAN EKONO	TOTAL KERUGIAN		

				MI		(Ha)	
1	Banjir	2.233.515	3.468.945	3.495.632	6.964.577	-	SEDANG
2	Banjir Bandang	13.668	58.160	435.561	493.721	-	SEDANG
3	Cuaca Ekstrim	2.233.630	5.862.392	3.004.768	8.867.160	-	SEDANG
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	2.186	483.500	485.686	-	RENDAH
5	Gempabumi	2.233.825	219.550	430.413	649.963	-	RENDAH
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	143.034	143.034	-	SEDANG
7	Kekeringan	2.233.825	-	1.763.378	1.763.378	-	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 42 memperlihatkan perbedaan tingkat untuk masing-masing bencana di Kabupaten Sidoarjo. Tingkat kerentanan tinggi didapatkan untuk kekeringan. Banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, serta kebakaran hutan dan lahan termasuk kelas sedang. Sedangkan untuk gelombang ekstrim dan abrasi serta gempa bumi berada pada kelas kerentanan rendah.

3.4.3. Penentuan Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas menunjukkan tingkatan kemampuan daerah dalam melakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melalui diskusi para SKPD terkait penanggulangan bencana, bersama-sama mengisi survey 71 indikator ketahanan daerah Kabupaten Sidoarjo. Rekapitulasi hasil tingkat kapasitas seluruh bencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Tingkat Kapasitas di Kabupaten Sidoarjo

NO	JENIS BAHAYA	KAPASITAS		
		KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS
1	Banjir	0,73	-	RENDAH
2	Banjir Bandang	0,73	-	RENDAH
3	Cuaca Ekstrim	0,73	-	RENDAH
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,73	-	RENDAH
5	Gempabumi	0,73	-	RENDAH
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,73	-	RENDAH
7	Kekeringan	0,73	-	RENDAH

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tabel 43 memperlihatkan tingkat kapasitas di Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan pada setiap bencana. Tingkat kapasitas rendah.

3.4.4. Penentuan Tingkat Risiko

Tingkat risiko bencana didapatkan berdasarkan perolehan bahaya. kerentanan. dan kapasitas di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penggabungan ketiga komponen tersebut sebagai dasar menentukan kelas tingkat risiko bencana. Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Sidoarjo seperti Tabel 44.

Tabel 44. Tingkat Risiko di Kabupaten Sidoarjo

JENIS BAHAYA	KELAS BAHAYA	KELAS KERENTANAN	KELAS KAPASITAS	KELAS RISIKO
BANJIR	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
BANJIR BANDANG	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
CUACA EKSTRIM	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	RENDAH	RENDAH	SEDANG
GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
KEKERINGAN	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Tingkat risiko bencana berdasarkan Tabel 44 di Kabupaten Sidoarjo untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan adalah kelas risiko tinggi. Khusus untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi berada pada kelas risiko sedang. Sedangkan untuk gempa bumi berada pada kelas risiko rendah.

BAB IV
REKOMENDASI

Pengkajian risiko bencana menghasilkan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana untuk seluruh kawasan Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari pengkajian risiko bencana ini menjadi landasan yang kuat bagi Kabupaten Sidoarjo untuk menentukan arah kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana untuk dapat mengurangi jiwa terpapar, harta benda yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak. Dalam implementasi perencanaan penanggulangan bencana tersebut, Kabupaten Sidoarjo harus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dengan peningkatan kapasitas daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kapasitas Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pengkajian kapasitas pada bab sebelumnya menunjukkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana berada pada level sedang. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang lebih efektif dan efisien sehingga ketahanan daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih tinggi levelnya. Peningkatan yang dimaksud berupa rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan penanggulangan bencana didaerah perlu diselaraskan dengan kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana dapat dihasilkan dari analisa kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Kajian kapasitas daerah merupakan gabungan dari hasil kajian ketahanan daerah dan kajian kesiapsiagaan. Berdasarkan hasil kajian tersebut dihasilkan

rekomendasi tindakan untuk Kabupaten Sidoarjo dalam upaya penyelenggaraan bencana yang lebih terencana. Rekomendasi tindakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo harus dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Paparan lebih detail tentang capaian dan tindakan yang diperlukan di Kabupaten Sidoarjo dijelaskan sebagai berikut.

4.1 PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan terdiri dari beberapa indikator. Indikator tersebut adalah Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana, Peraturan Daerah tentang pembentukan BPBD, Peraturan tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan, Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana, dan komitmen DPRD terhadap pengurangan risiko bencana.

4.1.1 KondisiUmum

1. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang ... dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2015 tentang ... yang menyangkut penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo.
2. Dalam pembentukan BPBD, Kabupaten Sidoarjo juga sudah mengacu pada aturan yang dikeluarkan BNPB terkait dengan struktur dan organisasi BPBD. Ini juga diperkuat melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 tahun 2011 mengenai pembentukan BPBD.
3. BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Forum PRB sebanyak 19 komunitas. Komunitas-komunitas ini sudah bekerja sesuai dengan aturan Peraturan Kepala BNPB.
4. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki aplikasi Sigap yang berperan dalam penyebaran informasi bencana dan diperkuat oleh Dinas Kominfo melalui command center. BPBD Kabupaten Sidoarjo juga melaporkan data-data kebencanaan ini ke BPBD Provinsi yang selanjutnya diteruskan ke BNPB secara nasional.
5. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki rencana kontinjensi untuk Letusan Gunung Api Sinabung dan Rencana Penanggulangan Bencana. Akan tetapi, kedua dokumen ini belum diperkuat dengan regulasi daerah.
6. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo sudah disusun secara partisipatif dari multi pihak dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013.
7. Perda RTRW di Kabupaten Sidoarjo sudah mempertimbangkan ancaman bencana dan prinsip-prinsip PRB serta dijalankan dengan koordinasi bersama Bappeda. Sudah ada sanksi penggusuran bagi yang melanggar peraturan ini.
8. DPRD Kabupaten Sidoarjo ini sudah banyak berkontribusi dalam penanggulangan bencana, yang ditunjukkan melalui pengesahan anggaran, penerimaan usulan, dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah khususnya BPBD dalam penanggulangan bencana. DPRD juga mendukung melalui program Jasmas

RekomendasiPilihanTindak

a) Untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan penerapan kebijakan yang sudah ada. Ini juga perlu disebarluaskan kepada masyarakat dan seluruh aparat pemerintahan, agar lebih sadar akan peran masing-masing dalam penanggulangan bencana.
b) Forum PRB yang sudah ada perlu diperkuat dengan aturan dan mekanisme Forum PRB yang lengkap dan detail, untuk mendukung kinerja Forum PRB.
c) Penyebaran informasi kebencanaan di Kabupaten Sidoarjo yang sudah baik perlu optimalisasi yang diperkuat dengan penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan. Media yang digunakan juga sebaiknya disebarluaskan ke masyarakat secara terus-menerus agar masyarakat lebih terbiasa mengakses informasi bencana.
d) Rencana Penanggulangan Bencana yang sudah ada perlu dilakukan dan terus dimonitor pencapaiannya. Selain itu, dapat dilakukan proses evaluasi untuk mendapat pembelajaran yang diterapkan untuk pembaharuan dan implementasi kedepannya.
e) Kabupaten Sidoarjo melalui perangkat daerah sebaiknya terus mendorong Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis kajian risiko bencana diterapkan di masyarakat. Penegakkan hukum yang ada perlu terus dijalankan secara tegas.
f) BPBD dan Forum PRB perlu terus ditingkatkan kapabilitasnya melalui pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kinerja dan efektifitas penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo.
g) DPRD yang bertindak sebagai legislatif perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif dalam pengurangan risiko bencana di daerah, sehingga program kebencanaan bisa difasilitasi pemerintah dengan lebih baik.

4.2 PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU

Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu: 1) Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah; 2) Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah; 3) Peta Kapasitas dan kajiannya; 4) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan indikator tersebut diperoleh rekomendasi pilihan tindak, berikut penjabarannya.

4.2.1 KondisiUmum

1. Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas yang menjadi dasar kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana yang sudah dimiliki juga menjadi dasar bagi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang sudah dibuat.
2. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidoarjo yang telah disusun, sudah disahkan menjadi peraturan daerah yang menjadi landasan bagi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo dalam bekerja menanggulangi kejadian bencana serta mengurangi risiko bencana yang ada.

4.2.2 RekomendasiPilihanTindak

1. Dengan adanya pembangunan dan pertumbuhan masyarakat, dapat dipastikan ada perubahan-perubahan dalam aspek-aspek bencana ini yang perlu diperbaharui. Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan pembaharuan Peta Bahaya, Peta Kerentanan, dan Peta Kapasitas untuk seluruh potensi bencana yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Nantinya, ini akan juga menjadi dasar bagi pembaharuan Kajian Risiko Bencana yang ada.

2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah disusun Kabupaten Sidoarjo dapat diimplementasikan, dimonitoring, dan dievaluasi. Proses-proses yang terjadi dapat menjadi dasar untuk perbaikan rencana penanggulangan bencana selanjutnya.

4.3 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT, DAN LOGISTIK

Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik terdiri dari 13 indikator. Komponennya terdiri dari:

a) Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat;
b) Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya;
c) Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha;
d) Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis;
e) Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional;
f) Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB;
g) Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan;
h) Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
i) Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
j) Penyimpanan/pergudang logistik PB;
k) Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik;
l) Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat;
m) Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat. Berikut penjabaran serta rekomendasi pilihan tindak dari tiap indikator tersebut.

4.3.1 KondisiUmum

1. Secara umum Kabupaten Sidoarjo sudah mempunyai jaringan penyebaran informasi bencana yang dirasa cukup efektif dalam menyebarluaskan informasi kejadian bencana kepada masyarakat, yaitu menggunakan aplikasi Sigap. Aplikasi ini data-datanya selalu diperbaharui oleh Pusdatin dan Pusdalops.
2. Kabupaten Sidoarjo sudah sering melakukan sosialiasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kecamatan-kecamatan. Sosialisasi ini sudah rutin dilaksanakan.
3. Sudah terjalin komunikasi yang aktif antar SKPD di Kabupaten Sidoarjo dalam berbagi peran untuk kegiatan terkait penanggulangan bencana.
4. Saat ini Pusdalops BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah bekerja berlandaskan Surat Keputusan mengenai Pusdalops, yang dirasa sudah efektif dalam merespon kejadian-kejadian darurat bencana.

a) Sistem pendataan bencana Kabupaten Sidoarjo masih belum terintegrasi dengan pendataan Nasional, namun BPBD Kabupaten Sidoarjo melalui Pusdatin secara rutin melaporkan data-data yang ada ke Pusdatin Provinsi.
b) Kabupaten Sidoarjo melalui Diklat Damkar saat ini sudah melaksanakan pelatihan gabungan penggunaan peralatan PB secara berkala. Ini juga sudah dilakukan bertahap dan menghasilkan personil yang terlatih dan dapat merespon saat terjadinya bencana.

c) Sudah dilakukan juga latihan kesiapsiagaan melalui geladi yang dilakukan secara bertahap.
d) Untuk kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan, serta pemeliharaan belum ada kajian kebutuhan dan lembaga khusus yang menangani.
e) Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki gudang penyimpanan peralatan dan logistik bencana.
f) Kabupaten Sidoarjo juga belum memiliki strategi pemenuhan energi listrik dalam keadaan darurat.
g) Untuk pemenuhan pangan, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab. Namun, belum ada rencana dan strategi khusus untuk ini.

4.3.2, RekomendasiPilihanTindak

a) Sosialisasi untuk membangun partisipasi aktif masyarakat untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di lingkungannya harus terus dilakukan secara berkala dan bertahap.
b) Komunikasi bencana lintas lembaga yang sudah terjalin perlu terus dilakukan secara rutin.
c) Kinerja Pusdalops perlu terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan kapasitas.
d) Kabupaten Sidoarjo sebaiknya melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB agar Sistem Pendataan Bencana Daerah bisa terintegrasi dengan Sistem Pendataan Bencana Nasional.
e) Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus sehingga kapasitas personil terus berkembang
f) Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan dapat terus dilakukan secara rutin oleh BPBD dan SKPD di Kabupaten Sidoarjo.
g) Peningkatan Kapabilitas Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah dan pemeliharaan peralatan masih perlu terus didorong dengan ada mekanisme dan kebijakan yang ada. Perlu juga lembaga khusus yang ditunjuk untuk bertanggung jawab akan keperluan ini.
h) Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah sebaiknya didorong agar peralatan dan logistik yang ada terawat dan terpelihara.
i) Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
j) Perlu adanya strategi pemenuhan cadangan pasokan listrik alternatif untuk penanganan bencana dan pemenuhan pangan daerah untuk kondisi darurat bencana. Ini harus didiskusikan oleh semua SKPD terkait sehingga dapat dijalankan secara efektif dan efisien

4.3 PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA

a) Untuk prioritas keempat, yaitu Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana terdapat 5 (lima) indikator, antara lain:
b) Penataan ruang berbasis PRB;
c) Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik;
d) Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB);
e) Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana;
f) Desa Tangguh Bencana.
g) Berikut pembahasan untuk kondisi umum Kabupaten Sidoarjo dan rekomendasi pilihan tindaknya.

4.4.1 KondisiUmum

a) Penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo sedang disusun dan sudah mengacu pada RPB yang dibuat. Untuk informasi penataan ruang Kabupaten Sidoarjo ditangani oleh Bappeda dan sudah dimanfaatkan oleh publik secara luas.
b) Kabupaten Sidoarjo telah memberikan sosialisasi untuk Sekolah dan Madrasah Aman Bencana yang merupakan kegiatan BPBD.
c) Semua rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo sudah disosialisasikan mengenai program Rumah Sakit Aman Bencana.
d) Telah dilakukan peningkatan kapasitas untuk Destana ysng dilakukan oleh BPBD.

4.4.2 RekomendasiPilihanTindak

a) Kabupaten Sidoarjo perlu terus mengawal penerapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah untuk pengurangan risiko bencana yang didasari kajian yang telah dilakukan
b) Peningkatan kapasitas dasar sekolah dan madrasah aman bencana di Kabupaten Sidoarjo perlu ditingkatkan dan diperluas, sehingga nantinya seluruh sekolah dan madrasah yang ada menerapkan program ini.
c) Pengetahuan dan kapasitas rumah sakit dan puskesmas mengenai 4 modul safety hospital pada daerah berisiko perlu terus ditingkatkan. Selain RSUD, program ini dapat juga diterapkan di rumah sakit lainnya di Kabupaten Sidoarjo.
d) Pembangunan Desa Tangguh Bencana yang sudah berjalan perlu terus dimonitor dan dievaluasi. Ini juga bisa diperluas ke beberapa desa lain.

4.5 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA

Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana merupakan prioritas kelima yang terdiri dari 12 indikator, antara lain:

a) Penerapan sumur resapan dan/atau biopori;
b) Perlindungan daerah tangkapan air;
c) Restorasi sungai;
d) Penguatan lereng;
e) Penegakan hukum;
f) Optimalisasi pemanfaatan air permukaan;
g) Pemantauan berkala hulu sungai;
h) Penerapan bangunan tahan gempabumi;
i) Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami;
j) Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota;
k) Restorasi lahan gambut;
l) Konservasi vegetatif DAS rawan longsor.

Selanjutnya akan disampaikan penjabaran kondisi umum dan rekomendasi pilihan tindak pada prioritas ini.

4.5.1 KondisiUmum

a) Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki kebijakan mengenai daerah resapan air, perlindungan daerah tangkapan air, penguatan lereng, oprasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan, restorasi sungai, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ini diatur melalui peraturan daerah dan tercantum dalam rencana kerja di beberapa SKPD, diantaranya Bappeda, DLHK, dan PUPR. Selain itu, sudah ada master plan drainase di Kabupaten Sidoarjo.
b) Namun, belum memiliki kebijakan bangunan tahan gempa bumi dan pemantauan hulu sungai sebagai pencegahan banjir.

c) Pemkab Sidoarjo sudah membuat embung sebagai upaya yang memadai dalam pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan.

4.5.2 RekomendasiPilihanTindak

a) Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun kebijakan untuk mekanisme bangunan tahan gempa bumi sebagai pedoman langkah pencegahan bencana gempa bumi. Sebagai upaya mitigasi, Pemkab Sidoarjo dapat menerapkan aturan untuk bangunan tahan gempabumi sebagai syarat pada pemberian IMB.
b) Kabupaten Sidoarjo dapat membentuk tim pemantauan hulu sungai yang diperkuat dengan kebijakan daerah guna mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang.
c) Pemeliharaan dan peningkatan ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir perlu terus diperhatikan sebagai langkah pencegahan.
d) Peraturan dan kebijakan yang sudah ada perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan diimplementasikan. Ini juga perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala bagaimana kebijakan ini diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

4.6 PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana terdiri dari 24 indikator, yaitu

a) Rencana Kontijensi Bencana Gempabumi;
b) Rencana Kontijensi Bencana Tsunami;
c) Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami;
d) Rencana Evakuasi Bencana Tsunami;
e) Rencana Kontijensi Bencana Banjir;
f) Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir;
g) Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor;
h) Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor;
i) Rencana Kontijensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
j) Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
k) Rencana Kontijensi Bencana Erupsi Gunungapi;
l) Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunungapi;
m) Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi;
n) Rencana Kontijensi Bencana Kekeringan;
o) Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan;
p) Rencana Kontijensi Bencana Banjir Bandang;
q) Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang;
r) Penentuan status tanggap darurat;
s) Penerapan sistem komando operasi darurat;
t) Pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana;
u) Pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban;
v) Perbaikan darurat;
w) Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh;
x) Penghentian status Tanggap Darurat.

Pembahasan indikator-indikator ini akan disesuaikan dengan potensi bencana yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan kondisi-kondisi yang ada. Berikut adalah pemaparan dari indikator-indikator ini.

4.6.1 KondisiUmum

a) Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Rencana Kontinjensi untuk jenis bencana banjir, banjir bandang serta kebakaran hutan dan lahan.
b) Sistem peringatan dini yang baru dimiliki hanya untuk banjir bandang melalui pusdalops.
c) Belum ada rencana kontinjensi maupun sistem peringatan dini untuk gempa bumi dan kekeringan.
d) Ketentuan penetapan dan penghentian status tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo sudah diatur melalui Surat Keputusan Bupati.
e) Kabupaten Sidoarjo telah memiliki Surat Keputusan mengenai Tanggap Darurat yang mencakup sistem komando dan pembagian peran.
f) BPBD Kabupaten Sidoarjo telah memiliki relawan yang terlatih untuk melaporkan data dan informasi bencana melalui kaji cepat. Tim adalah Sekardadu dan Srikandi.
g) Untuk melakukan pertolongan dan penyelamatan saat darurat serta pengerahan, relawan yang akan turun adalah Tagana dan Satgana.
h) Untuk perbaikan darurat bencana diatur oleh BCD dan DPPKA.

4.6.2 RekomendasiPilihanTindak

a) Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempabumi dan kekeringan melalui perencanaan kontijensi perlu dilakukan agar Kabupaten Sidoarjo mempunyai perencanaan yang menyeluruh untuk seluruh kejadian bencana.
b) Untuk rencana kontinjensi kebakaran hutan dan lahan serta banjir dan banjir bandang yang sudah dimiliki Kabupaten Sidoarjo, ini perlu terus diperbaharui secara berkala sehingga data dan penanggulangan bencananya akan terus berjalan dengan efektif.
c) Alat peringatan dini untuk banjir bandang yang sudah ada perlu terus dimonitor dan dipelihara sehingga dapat berfungsi dengan baik saat terjadi bencana.
d) Untuk sistem peringatan dini bencana banjir, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan, perlu didiskusikan dan disepakati sehingga peringatan dini yang ada bisa membantu masyarakat untuk lebih cepat melakukan evakuasi ketika terjadi bencana.
e) Penguatan mekanisme penetapan dan penghentian status darurat bencana sudah baik dengan adanya dasar surat keputusan bupati. Ini bisa ditingkatkan dan diperkuat dengan kebijakan aturan daerah yang memuat mekanismenya.
f) Operasi Tanggap Darurat Bencana perlu diperkuat dengan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan yang terperinci yang memuat sistem komando dan penerapannya.
g) Penguatan kapasitas dan mekanisme operasi tim reaksi cepat untuk kaji cepat bencana dan operasi tim penyelamatan dan pertolongan korban yang sudah dilakukan di tim gabungan yang dibentuk Kabupaten Sidoarjo dapat ditingkatkan dengan melakukannya secara rutin dan terus mengembangkan keahlian-keahlian lainnya yang terkait dengan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan kejadian bencana saat darurat.
h) Penguatan kebijakan dan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana perlu disepakati oleh SKPD di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya ini perlu disosialisasikan kepada tim yang terlibat.

4.7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA

Sebagai prioritas terakhir, pengembangan sistem pemulihan bencana bencana terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu

a) Pemulihan pelayanan dasar pemerintah;
b) Penghentian status tanggap darurat;
c) Pemulihan infrastruktur penting;
d) Perbaikan rumah penduduk.

Kondisi umum di Kabupaten Sidoarjo dan rekomendasi pilihan tindaknya akan disampaikan dalam paparan berikut.

4.7.1. Kondisi Umum

a) Sebagai inisiatif untuk pemulihan layanan dasar pemerintah, Pemkab Sidoarjo telah mekanisme yaitu Surat Keputusan mengenai situasi paska bencana.
b) Untuk infrastruktur penting, belum ada perencanaan dan pertimbangan jangka panjang.
c) Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki landasan yaitu surat keputusan mengenai bantuan sosial.
d) Mengenai pemulihan penghidupan masyarakat Pemkab Sidoarjo sudah berinisiatif untuk membantu masyarakat yang diatur dalam mekanisme yang tertuang dalam Perda mengenai penyelenggaraan bencana dan Perka mengenai hibah dan bantuan sosial.

4.7.2. Rekomendasi PilihanTindak

a) Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana, perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, dan perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana perlu disusun bersama-sama di tingkat SKPD serta didukung Forum PRB yang sudah dibentuk.
b) Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana sudah mengacu pada peraturan daerah ini juga perlu mengkaji kebutuhan masyarakat serta prinsip pengurangan risiko bencana.

BABV
PENUTUP

Penyusunan kajian risiko bencana yangdilakukan di Kabupaten Sidoarjo telah terstandar dan mengikuti aturan yang berlaku serta metode terbaru. Kajian risiko bencana yang disusun secara komprehensif dengan melibatkan instansi lintas sektoral. Hal ini dikarenakan data pendukung dalam pengkajian yang dilakukan merupakan data data yang berasal dari instansi dan lembaga yang berwenang baik di daerah maupun di nasional. Kajian risiko bencana inidiharapakandapatdigunakan sebagai landasan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten Sidoarjo untuk 5 (lima) tahunkedepan agar lebihterarah, terpadu, terstruktur dan terukur

Hasil pengkajian risiko ini diharapkan dapat memberikan arhan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan prioritas bahaya yang ada dan di kaji sebagai upaya menurunkan risiko bencana yang ada, baik dari lingkup lingkungan, sosial, ekonomi maupun infrastruktur.

Pelaksanaan arahan kebijakan penanggulangan bencana membutuhkan partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga usaha sampai pada lapisan masyarakat, Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih meminimalkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR